

Pemikiran Biografi dan Kesejarahan

**suatu kumpulan prasaran
pada berbagai lokakarya**

JILID III

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1984

Pemikiran Biografi dan Kesejarahan

**suatu kumpulan prasaran
pada berbagai lokakarya**

JILID III

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1984**

Penyunting :

1. **Drs. R.Z. Leirissa**
2. **Drs. M. Soenjata Kartadarmadja**

**Gambar kulit oleh :
M.S. Karta**

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan suatu kumpulan dari berbagai pemikiran tentang biografi dan kesejarahan. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan masalah dan gagasan dari berbagai ahli sejarah dan ahli-ahli lainnya dalam rangka pembinaan penulisan biografi dan kesejarahan, yang disampaikan pada berbagai lokakarya dan rapat kerja Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN), Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, selama tahun kerja 1983/1984.

Tujuan penerbitan buku ini ialah sebagai usaha dokumentasi berbagai pemikiran yang berguna untuk pengarahannya, pedoman, dan pegangan bagi para penulis pada bidang biografi dan kesejarahan pada umumnya.

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini membawa manfaat bagi pertumbuhan kebudayaan nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Jakarta, Desember 1984
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
Aspek Sejarah Sosial Dalam Penelitian Sejarah Indonesia (oleh : Djoko Suryo)	1
Beberapa Pendekatan dan Pengalaman Studi Sejarah Sosial Perkotaan (oleh : Usman Pelly)	17
Beberapa Model Penulisan Sejarah Sosial (oleh : Kunto- wijoyo)	19
Beberapa Pandangan Tentang Penulisan Biografi (oleh : AB. Lopian)	44
Dinamisasi Pencatatan Sejarah (oleh : Astrid S. Susanto) ..	52
Ke Arah Penulisan Sejarah Sosial Daerah (oleh : Taufik Abdullah)	57
Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional Melalui Proses Pembinaan Budaya Bangsa (oleh : S. Budhi- santoso)	76
Penulisan Biografi Tokoh-tokoh yang Masih Hidup dan Permasalahannya (oleh : Bambang Sumadio)	88

Segi-segi Praktis Penulisan Bigorafi Tokoh (oleh : RZ. Leirissa, MA.)	94
Sejarah Sosial Kota (oleh : FA. Sutjipto)	102
Teknik Membuat Catatan Dalam Peneltian (oleh : T. Ibrahim Alfian).....	112
FOTO-FOTO	125

ASPEK SEJARAH SOSIAL DALAM PENELITIAN SEJARAH INDONESIA

Oleh : Djoko Suryo

1. *Sejarah Sosial dan cakupannya*

Sebelum Sejarah Sosial dikenal sebagai salah satu bidang Sejarah, Sejarah Politik lebih dahulu dikenal. Sejak lama perhatian sejarah terbatas pada Sejarah Politik, yaitu sejarah yang memusatkan perhatiannya pada masalah negara dan hubungan-hubungannya, dan terutama pada golongan yang memegang kekuasaan dalam negara, seperti raja-raja, pemuka-pemuka militer, dan pemuka-pemuka politik lainnya. Penulis-penulis Sejarah pada abad ke-16 sampai abad ke-18 lebih banyak kegiatannya dalam penulisan biografi raja-raja atau keluarganya. Sering mereka dipekerjakan oleh raja-raja untuk melakukan penulisan tersebut, seperti halnya terjadi di Jawa dengan penulisan **babad** oleh pujangga-pujangga keraton. Mereka menulis sejarah semata-mata mengagungkan kemashuran dan kebesaran raja, dan bukan untuk menceritakan kehidupan rakyatnya. Sesudah itu muncul sejarah agama yang dipengaruhi oleh akibat pertentangan-pertentangan agama yang berabad-abad lamanya. Pada akhir abad ke-18 perhatian terhadap gejala ekonomi tumbuh, berhubungan erat dengan lahirnya Ilmu Ekonomi sebagai

cabang ilmu pengetahuan (*Adam Smith, Matthus*) Karena itu tumbuhkan Sejarah ekonomi pada abad ke-19. Sejarah hukum (*legal history*) juga muncul pada pertengahan abad yang sama dan kemudian diikuti oleh/pertumbuhan cabang-cabang sejarah isinya seperti Sejarah Sosial Sejarah Kesenian, Sejarah Kebudayaan, Peradaban, dan Sejarah Pemikiran/Intelektual. Pengaruh romanticisme, nasionalisme dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat pada periode ini cukup berarti. Perhatian orang terhadap bidang-bidang sejarah yang tersebut terakhir ini makin meningkatkan tumbuhnya spesialisasi. Misalnya dalam Sejarah Sosial Ekonomi lahir spesialisasi seperti Sejarah Agraria, Sejarah Demografi, Sejarah Perdagangan, Sejarah Industri, Sejarah Uang dan Bank dan sebagainya.

Timbulnya spesialisasi ini di satu pihak telah menyebabkan sejarawan berkenalan dengan bidang yang semula ada di luar perhatiannya, di lain pihak bidang sejarah semakin luas melampaui batas-batas Sejarah Politik yang konvensional.

Tidak berbeda dengan Sejarah Ekonomi dan bidang-bidang sejarah lainnya, Sejarah Sosial dalam pertumbuhannya menjadi lawan bagi Sejarah Politik. Apabila Sejarah Politik lebih menitik beratkan kepada golongan elite, maka Sejarah Sosial menitik beratkan pada golongan non-elite. Keterbatasan Sejarah Politik dalam menjelaskan/menerangkan proses sejarah ingin dilengkapi oleh Sejarah Sosial, dengan mengungkap proses kehidupan yang ada di bawah permukaan Sejarah Politik yang konvensional. Kemampuan Sejarah Sosial mengungkapkan sisi lain dari kehidupan masyarakat menyebabkan Sejarah Sosial semakin mantap kedudukannya. Selain itu adanya teori atau konsep-konsep sosiologi yang dipergunakan dalam pendekatan bidang sejarah ini telah menyebabkan tidak saja hubungan sejarah dengan sosiologi menjadi lebih dekat, tetapi juga telah membuat sejarah menjadi lebih peka terhadap masalah-masalah sosial dalam penelitiannya.

Dalam arti luas obyek Sejarah Sosial mencakup segala segi kehidupan masyarakat selain kegiatan politik. Sering erat hu-

bungannya dengan bidang sejarah lainnya sehingga sering sulit dibedakan secara tegas. Beberapa segi yang dapat dimasukkan dalam kategori ini antara lain ialah Sejarah Kota, Sejarah Pedesaan, Sejarah Kelembagaan, sejarah kelompok-kelompok sosial tertentu baik formal maupun informal seperti kelompok sosial di bawah tanah (*underworld*), perbanditan, perampokan dan yang sejenis, serta segi-segi lain yang berhubungan dengan kehidupan sosial suatu masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Secara sempit, sering perhatian Sejarah Sosial lebih dipusatkan kepada problem-problem sosial, seperti kemiskinan, kelaparan, kebodohan, keterbelakangan dan kemerosotan moral. Masalah-masalah yang berhubungan dengan kepincangan dalam pengadaan pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan (*basic need*) pada dasarnya merupakan sumber pertama bagi timbulnya problem sosial. Demikian juga halnya dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan perubahan sosial, perubahan tata nilai, agama dan tradisi kebudayaan, ikut mempengaruhi timbulnya problem sosial.

2. *Kedudukan Sejarah Sosial Dalam Historiografi Indonesia*

Penggarapan Sejarah Sosial merupakan salah satu langkah untuk menuju Dekolonisasi Historiografi Indonesia.¹⁾ Historiografi Kolonial yang dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan Sejarah Nasional Indonesia, dalam beberapa segi dapat dipenuhi dengan penggarapan Sejarah Sosial. Dengan melalui penggarapan ini kepincangan-kepincangan yang terdapat dalam historiografi Kolonial dapat segera diatasi tidak saja melalui perubahan aspek dinamis dari masyarakat Indonesia dari peran pasif ke peran yang aktif dalam proses sejarahnya. Pengungkapan berbagai segi kehidupan sosial dari berbagai kelompok masyarakat dari berbagai lingkungan komunitas akan memperjelas gambaran sejarah masyarakat Indonesia dari masa lampau yang telah diabaikan dalam historiografi kolonial. Penelitian Sejarah Sosial baik di lingkungan masyarakat kota maupun desa akan ikut menyumbangkan perkembangan historiografi Indonesia modern, dan memperluas cakrawala Sejarah Nasional Indonesia.

3. *Aspek Sejarah Sosial Dalam Penulisan Sejarah Kota Beberapa Kemungkinan.*

Untuk menentukan segi-segi Sejarah Sosial yang patut diperhatikan dari suatu Sejarah Kota dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengenal tuplogi kota pusat pertumbuhannya (*growth centre*), dan struktur sosialnya.²⁾ Berbagai tipe kota yang terdapat di Indonesia pada dasarnya dapat dibedakan atas: tipe bekas kota kerajaan, kota kolonial, kota administratif, kota dagang, atau industri kota pedalaman, kota pantai, atau tipe kota campuran.³⁾ Tiap tipe pada dasarnya memiliki pertumbuhan sendiri-sendiri dan corak kelompok-kelompok sosialnya sendiri-sendiri. Pada pusat kota bekas kerajaan, seperti Yogyakarta, Surakarta misalnya, pusat pertumbuhannya sering bersumber pada pemerintahan kerajaan. Struktur fisik kota biasanya masih dapat dikenal. Kelompok sosial dan yang mendiami kota ini juga masih dapat dikenal ciri-cirinya seperti adanya golongan bangsawan, golongan priyayi dan golongan orang kebanyakan "wong cilik". Nama-nama kampung/komunitas sering masih pula dapat dirunut dan dapat dihubungkan dengan pemerintah keraton. Status dan kewajiban dari kelompok sosialnya yang hidup dalam kampung-kampung semula juga memiliki hubungan dengan keraton. Penggarapan sejarah kehidupan kelompok sosial di lingkungan kota semacam ini adalah memungkinkan. Demikian juga pada kota-kota kolonial dapat diperhatikan kehidupan dari golongan-golongan sosial yang berbeda-beda menurut ras dan kedudukan dalam pemerintah kolonial. Di lingkungan kota administratif, kelompok sosial pamongpraja atau priyayi sering lebih menonjol lainnya, sehingga segi-segi kehidupan dari kelompok ini dapat diperhatikan. Di kota-kota dagang, kelas pedagang memiliki peranan penting dalam kehidupan kota dan sekitarnya. Biasanya sifat multietnik pada kota-kota dagang menonjol, kelompok sosial yang lain yang mungkin dapat diperhatikan pada kota dagang atau kota industri adalah kelompok buruh, pekerja, imigran-imigran, yang datang dari daerah pedalaman atau daerah lain.

Sering tata ruang lingkungan kota (*organization of space*) dipengaruhi oleh jenis *central growth* yang dominan pada masing-masing kota.⁵) Keadaan tata ruang ini ikut mempengaruhi permukiman dan kelompok-kelompok sosialnya.

Tidak jarang pertumbuhan kota ikut ditentukan pula oleh potensi daerah pedalaman, seperti tersedia tidaknya dagangan di kota-kota pelabuhan atau kota dagang. Adanya hubungan perdagangan antara kota-kota dan pedalaman/pedesaan sering memberikan tempat bagi golongan pedagang perantara untuk menjadi pengusaha dalam sektor ekonomi antara daerah ini. Penggarapan kelompok pedagang perantara ini dapat pula diperhatikan dalam sejarah sosial.

Hubungan pertumbuhan kota dengan daerah pedalaman dapat juga dilihat dari segi tersedianya prasarana, seperti jalan dan alat transpor yang ikut mempengaruhi komunikasi antara dua lingkungan tersebut. Pada kota-kota tertentu pembangunan jalan kereta api memiliki arti penting bagi perkembangan kota, seperti kota-kota Surabaya dan Semarang, terutama sejak akhir abad ke-19.⁶) Jaringan komunikasi ini sering ikut memperkuat sentralitas kota terhadap lingkungan daerah sekelilingnya.⁷) Dan dalam beberapa juga memperkuat jaringan perhubungan kelompok sosial pemegang ekonomi antara pusat kota dan daerah pedalaman.

Masalah-masalah pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman dapat pula diperhatikan dalam pengungkapan sejarah sosial di kota. Demikian juga masalah urbanisasi dan penambahan penduduk merupakan unsur penting yang dalam problem pemukiman, perumahan dan pencemaran lingkungan kota, serta timbulnya masalah sosial lainnya, seperti kriminalitas, pelacuran, perjudian, yang merupakan

4. *Penutup*

Penulisan Sejarah Sosial sangat penting bagi perkembangan historiografi Indonesia dan wawasan Sejarah Nasional Indonesia. Penelitian Sejarah Sosial dapat dilakukan baik dalam lingkungan

kota atau desa, maupun dalam unit-unit sejarah lokal di daerah Indonesia. Berbagai aspek sejarah sosial dapat dipilih dalam penulisan Sejarah Kota Indonesia, sesuai dengan unsur-unsur yang potensial dalam pertumbuhan kota masing-masing.

Catatan

1. Mengenai dekolonisasi Historiografi Indonesia, lihat Sartono Kartodirdjo, dalam *pemikiran dan perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif* (Jakarta, 1982).
2. Mengenai Pertumbuhan kota dan tipologinya dalam T.C. Mc. Gee, *Southeast Asian City* (London, 1962); dan J.D. Comhaire dkk., *How Cities Grew, The Historical Sociology of Cities* (N.J., 1959).
3. Lihat P.D. Milone, *Urba Areas in Indonesia, Administrative Census Concepts* (Berkeley, 1966); C. Geertz, *the Social History of an Indonesia Town* (Cambridge, 1965; dan mengenai tipe kota-kota petani, lihat Disertai F.A. Sutjipto, *Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura abad XVII sampai medio abad XIX*. UGM, 1983.
4. Soal kelompok etnik dalam kota-kota tertentu dapat dilihat contohnya pada Donald E. Wilmott, *The Chinese of Semarang, A Changing Minority Community in Indonesia* (New York, 1960).
5. Mengenai beberapa bentuk tata ruang lingkungan dan perubahan-perubahannya baca E.A.J. Johnson, *The Organization of Space in Developing Country* (Cambridge, 1970).
6. Mengenai pembuatan kereta api dapat dibaca misalnya, dalam J.P. de Bordes, *De Aanleg van Spoorweg Semarang – Vorstenlanden*, ('s-Gravenhage, 1870); dan N.H. Hanket, *De Anleg van Spoorwegen on Midden-Java* (Amsterdam, 1965).
7. Lihat Albert Fishow, *American Railroads and the Transportation of the Antebellum Economy* Cambridge, 1965). Lihat pula Robert W. Fogel, *Railroads and American Economic Growth, Essays in Econometric History* (Cambridge, 1965).

BEBERAPA PENDEKATAN DAN PENGALAMAN STUDI SEJARAH SOSIAL PERKOTAAN

Oleh : Usman Pelly

1. Pendekatan Masalah Perkotaan

Bagi ahli Ilmu Sosial sedikitnya ada dua kemungkinan pendekatan permasalahan perkotaan dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Kedua pendekatan ini bersifat diakronik (*diachronic approach*) dan menurut horizon pandangan yang luas (Fox, 1974 : 47).

Pendekatan pertama, ialah dengan memfokuskan diri pada hubungan ideologis yang mengikat kota dan desa secara timbal balik (*vice-versa*). Dalam pendekatan ini yang diukur ialah bagaimana motif ideologis masyarakat yang lebih luas melekat dalam budaya kota dan bagaimana pula suasana budaya kota itu memproyeksikan dirinya ke pedalaman (*hinterland*). Contoh pendekatan pertama ini dapat dilihat umpamanya pada Harris (1956) yang melukiskan etos kota (*urban ethos*) sebuah kota kecil di Brazilia. Di sini Harris mendiskripsikan sebuah etos kota yang bertahan karena adanya isolasi dan pertambahan penduduk yang relatif kecil. Yang menarik ialah pengungkapan bahwa etos itu berasal dari tradisi sejarah mediteranean dan latin

Amerika yang diperkuat oleh keterlibatan warga kota tersebut dalam industri ekonomi setempat.

Karya Abner Cohen (1969) tentang pedagang-pedagang perantau suku Hausa yang hidup secara eksklusif di kota Lagos Nigeria, menunjukkan betapa kondisi ekonomi dalam masyarakat yang lebih luas dan jarak ruang lingkup yang besar telah mempersatukan kelompok etnis ini kembali (*retribalism*) dalam satu kubu ekonomi yang diikat dalam satu asosiasi Tijjanya yang sangat religius. Karya Geertz (1965) yang terkenal itu umpamanya telah mengungkapkan bagaimana proses *involusi* (pembusukan) masyarakat Jawa membentuk kondisi sejarah sosial kota-kota tertentu di Pulau Jawa.

Pendekatan kedua, ialah dengan menelusuri interaksi kota sebagai sebuah faktor sosio-ekonomis dan politik dalam satu kesatuan organisasi masyarakat. Kedua faktor ini (sosio-ekonomi dan politik) sekaligus dipandang sebagai produk (hasil) dan prosedur (penghasil) dan berbagai faktor seperti aliansi politik, sektor ekonomi dan struktur sosial kota. Dalam hubungan ini si peneliti melihat kota dalam kaitan susunan politik dan ekonomi di mana dia berada.

Pendekatan ini dilakukan umpamanya oleh Miner (1965). Banton (1957), Van der Berghe (1964) dan Gulick (1967). Mereka menempatkan keseluruhan kota sebagai unit diskripsi dalam suatu kerangka perbandingan lintas budaya (*cross-cultural comparison*) yang tentu saja di sana-sini diperlukan reduksi psikologis dan sosiologis.

2. *Dinamika studi perkotaan*

Dalam pendekatan ideologis dan interaksional dinamika studi perkotaan barulah tampak apabila konsep "adaptasi" (Fox 1974) atau "adaptasi yang kreatif" (Bruner 1974) diintegrasikan. Konsep ini mengangkat perspektif hubungan kota dengan perubahan sosial yang terjadi. Kota dari masa kemasa senantiasa terlibat dalam proses penyesuaian diri di mana faktor eksternal dan lingkungan sosial budaya serta kondisi internal

politik dan ekonomi memainkan peranan yang penting. Dengan demikian seorang peneliti harus mengaji hubungan yang berlangsung terus-menerus antara suasana kota dan pabrik eksternal sosial budaya.

Lingkungan (*environment*) kota tidak perlu diartikan terbatas sebagai keterlibatan kota dengan prasarana fisik seperti air ledeng, electrifikasi, jenis tanah atau rata-rata curah hujan. Tetapi lingkungan kota tersebut mencakup juga keseluruhan faktor-faktor sosial budaya yang sebagian mungkin ditimbulkan oleh nilai-nilai desa (*hinterland*) yang meng"conditioning" situasi perkotaan. Adaptasi terhadap lingkungan eksternal sepanjang sejarah akan menunjukkan perubahan-perubahan bentuk ideologis, sedangkan adaptasi internal akan menghasilkan perubahan-perubahan di bidang organisasi pemerintahan kota, struktur masyarakat dan pengaturan pemukiman. Perubahan ini dianggap merupakan refleksi dari fungsi-fungsi ekonomi kota yang berkembang sepanjang waktu. Demikianlah proses adaptasi kota dan dampaknya terhadap organisasi masyarakat kota akan memberikan konsep-konsep dasar dalam penelitian interaksional ideologis dan perkembangan setting kota sepanjang waktu.

3. *Mencari Pola Adaptasi Perantau di Kota Medan*

Penelitian kami (1981/1982) memfokuskan diri dalam mencari pola adaptasi dua kelompok etnis perantau (Minangkabau dan Mandailing) di Kota Medan. Studi komparatif ini mengungkapkan perubahan-perubahan dan kelangsungan tradisi perantauan mereka di kota Medan dalam kaitan dominasi penduduk asli kota (*host population*), yaitu Melayu Deli/Pesisir sebelum dan sesudah kemerdekaan (1950).

Penelitian ini mengombinasikan kedua jenis pendekatan diachronic di atas : (1) melihat hubungan ideologis yang mengikat kota dan desa secara timbal-balik, dan (2) menelusuri interaksi kota sebagai sebuah faktor sosio-ekonomis dan politik dalam satu kesatuan organisasi masyarakat, serta (3) menginte-

grasikan konsep "adaptasi" yang kreatif untuk melihat hubungan kota dengan proses perubahan sosial.

Penelitian ini mengungkapkan hubungan ideologis antara kampung halaman (*home villages*) dan tempat perantauan (*migratory area*) di perkotaan. Hubungan ideologis yang berakar dari pandangan kosmologi ini merupakan "missi budaya" (*cultural mission*) yang ternyata menentukan corak adaptasi kedua kelompok teknis ini diperkotaan di satu pihak dan bentuk hubungan mereka dengan kampung halaman di pihak lain. Kedua kelompok etnis ini mendorong warganya untuk memenuhi missi budaya mereka. Missi budaya orang Minangkabau ke perantauan ialah "memperkuat dan memperkaya kampung halaman (Alam Minangkabau)", dengan harta dan ilmu pengetahuan. Hanyalah perantau yang sukses dan berhasil yang "welcome" pulang ke kampung. Mereka tidak membiarkan warganya "pulang langkitang" (seperti pulang kepala keong ke sarangnya), begitu waktu pergi merantau begitu pula keadaannya waktu pulang. Tidak ada toleransi bagi mereka yang gagal. Pulang dan pergi membawa missi budaya inilah yang merupakan siklus perantauan. Rantau bagi mereka bukanlah pemukiman yang permanent tetapi tempat sementara. Namun kegagalan di rantau berarti "pembuangan" di rantau selama-lamanya. Keadaan inilah salah satu sebab terindusirnya pola rantau baru, yaitu rantau cina (*permanent migration*), yang kemudian diikuti pula oleh perantau-perantau yang sukses tetapi enggan pulang balik kekampung.

Berbeda dengan orang Minangkabau, misi budaya perantauan orang Mandailing didasarkan atas ekspansi territorial. Pemilikan dan penguasaan tanah di rantau dianggap merupakan bahagian dari Batak harajoan (kerajaan Batak). Anak dan tanah adalah simbol keberuntungan dan kekuasaan (*men power*), hasil dari "sahala hasangoon" (harkat kepribadian), yang disebut juga oleh Kraemer (1957 : 67) sebagai dorongan (komplek) menjadi manusia nomor satu. Karena missi budaya perantauan Mandailing adalah untuk memperluas territorial,

mereka tidak seperti orang Minangkabau, orang Mandailing tidak mempunyai kewajiban untuk memboyong pulang hasil usaha perantauan ke kampung halaman. Sebaliknya, mereka yang gagal "welcome" pulang kampung untuk kembali menggarap tanah pusaka. Kegagalan mereka dipundakkan kepada kaum kerabat di kota yang telah berhasil.

Pola perantauan kedua kelompok etnis ini menentukan corak dan bentuk hidup perantauan, terutama dalam pemilihan pekerjaan (*occupation*), orang Minang cenderung untuk memilih pekerjaan yang bebas (*independent*) seperti di lapangan bazaar ekonomi seperti penjaja dan pedagang kaki lima, dan pekerjaan professional (dokter, pengacara, notaris jurnalis). Orang Mandailing lebih menyenangi pekerjaan tetap yang terikat dalam garis birokrasi, seperti pegawai negeri/swasta, polisi, militer dan bertani. Pemilihan okupasi ini menentukan pula corak pemukiman di kota. Orang Minangkabau akan memilih tempat di sekitar pusat-pusat pasar, berdesak-desak dengan orang-orang Cina. Sedang orang Mandailing menyenangi tempat yang luas dan tenang untuk membangun "sahala harajoan" (kerajaan pribadi), sebab itu mereka menyebar ke pinggiran kota. Corak pemukiman ini menentukan pula karakteristik hubungan antara pendatang dan penduduk asli kota. Orang Minang yang merasa hidup dirantau sementara, tidak berkepentingan untuk (segera) memiliki tanah, tidak seperti orang Mandailing. Sebab itu proses asimilasi dengan penduduk asli kota (Melayu) yang menguasai tanah-tanah adat di kalangan perantauan Mandailing berproses sangat lancar. Di masa pemerintahan kolonial Belanda, di mana kekuasaan sultan-sultan Melayu berjaya, terjadi proses "melayunisasi" di kalangan orang-orang Melayu, membuang marga Batak dan memperoleh hak-hak atas tanah adat dan lapangan pekerjaan dalam birokrasi Kesultanan Melayu.

Perubahan yang terjadi dalam tampuk kekuasaan politik sesudah kemerdekaan telah mendorong perubahan strategi adaptasi kelompok-kelompok etnis perkotaan. Orang Mandailing umpamanya, berusaha menggantikan posisi dominan orang

Melayu di bidang birokrasi pemerintahan. Usaha ini tidak berhasil sepenuhnya karena setelah kemerdekaan kelompok-kelompok Batak Toba hasil didikan Missi-zending Kristen mengalir dalam jumlah yang lebih besar dari pada jumlah semua pendatang orang Mandailing yang telah bermukim sebelumnya di Kota Medan. Demikianlah kompetisi dan aliansi silih-berganti di antara kelompok-kelompok etnis untuk memperebutkan dominasi budaya kota.

Penelitian ini mencoba mengungkapkan bahwa proses asimilasi para pendatang ke kota tidak sama sekali ditentukan sikap suka atau tidak suka (*willingness*) penduduk asli kota (*host population*) seperti yang diklaim oleh Skinner (1969) dalam penelitiannya terhadap perantau-perantau Cina di Muangthai. Begitu juga proses adaptasi mereka tidak dapat hanya diterjemahkan dalam kerangka *push-pull* (faktor-faktor mendorong dan menarik) paradigma ekonomis dan demografis. Seseorang harus melihat interaksi antara "missi budaya" dan suasana budaya politik kota (*urban cultural setting*) yang banyak membentuk strategi adaptasi para penghijrah khususnya dan masyarakat kota umumnya di sepanjang masa.

Kelemahan menggunakan keseluruhan kota sebagai unit diskripsi ternyata tidak dapat terelakkan, banyak faset-faset kehidupan kota yang terasa signifikan tidak terjamah. Salah satu yang menarik, tetapi tidak terjangkau erat oleh penelitian ini ialah pengungkapan kedudukan budaya dan politis kelompok etnis Jawa yang secara demografis porsinya cukup besar (29,0%) dari pendudukan Kota Medan yang berjumlah hampir 1.50 juta orang itu (bandingkan: Toba Batak 14,0%, Cina 14,0% Mandailing Tapanuli Selatan 13,0%, Minangkabau 11,0%, Melayu 6,0%, Karo, 5,0%, dan Aceh 4,0%). Kelompok etnis Jawa pada umumnya menduduki strata sosial yang relatif rendah. Mereka ini adalah generasi kedua dari bekas kuli kontrak perkebunan Sumatra Timur di jaman penjajahan Belanda. Dewasa ini mereka telah menjadi warga Kota Medan, terutama disebabkan karena permukiman mereka yang dahulu terletak di luar kota, sekarang

telah termasuk daerah perkotaan baru. *Marginal people* yang Mayoritas ini ditengah kelompok-kelompok etnis yang sedang bersaing keras untuk kelangsungan hidup dan dominasi merupakan obyek penelitian sosial yang menarik.

4. *Masalah dan keterbatasan dalam studi perkotaan*

Kendatipun penelitian ini penulis lakukan dengan mengambil lokasi sebagian besar di Kota Medan, di mana penulis dibesarkan, dan kedua populasi yang menjadi obyek penelitian corak budayanya tidak pula sing bagi penulis, tetapi faktor-faktor itu hanyalah memberikan kemudahan dalam pengenalan pertama lapangan studi.

Pendekatan yang diakronik dalam sejarah sosial perkotaan memerlukan ketajaman dalam perumusan masalah. Masalah tersebut harus cukup terbatas dalam jangkauan waktu, fasilitas dan kemampuan yang tersedia. Konsep-konsep teoritis akan dapat diaplikasikan untuk mendukung konsep-konsep baru yang muncul dalam penelitian lapangan, apabila ada ketajaman dan keterbatasan dalam perumusan masalah, dan keluasaan jangkauan horizon di mana permasalahan itu ditempatkan. Dalam konstalasi inilah suatu generalisasi yang memadai dapat dikembangkan.

Hambatan-hambatan teknis yang selalu menyertai studi perkotaan antara lain : (1) Memilih waktu dan cara yang tepat menemui responden/informan. Kesibukan hidup di kota telah banyak menutup peluang bagi kita untuk melakukan wawancara yang intensip (*depth interview*). Banyak wawancara harus dilakukan di kantor-kantor dalam waktu yang terbatas, tidak jarang di kedai kopi atau di restoran, bahkan kadang-kadang di pinggir jalan, di atas beca atau bus kota. Tidak ada ketentuan waktu yang ideal untuk semua warga kota untuk menemui mereka, mereka sibuk dan *mobile*. Mungkin bagi kelompok elite (pembesar atau tokoh-tokoh masyarakat), waktu sore sekitar pukul 17.00–18.00 kalau dia tidak berada di lapangan golf adalah waktu yang tepat untuk ditemui di rumahnya. (2) Kemajemuk-

an warga kota menyebabkan kesukaran penelitian untuk mengembangkan *rapport* (i.c. Kuntjaraningrat, 1981 : 162). Pemilikan simbol dan atribut yang berbeda antara peneliti dan informan dapat memperkuat prasangka yang menyebabkan tidak lancarnya komunikasi bersemuka. Untuk mengatasi masalah ini penulis umpamanya harus memakai taksi untuk mewawancarai seorang tokoh, tanpa datang dengan sedan bukan tidak mungkin hanya anjing herder sang tokoh saja yang menyambut di pintu rumah! (3) Penggunaan alat-alat elektronik untuk merekam pembicaraan dan observasi seperti tip dan kamera akan sangat membantu. Kecuali kalau ada pembatasan keberatan pihak responden/informan. Terutama mereka akan menolak apabila pembicaraan akan mengarah kepada masalah-masalah yang peka, seperti masalah politik atau pandangan-pandangan yang dianggap subyektif terhadap kehidupan kelompok etnis atau agama tertentu. Secara etis keberatan-keberatan ini harus kita hormati. Kecurigaan dan rasa was-was kelompok atau orang yang didatangi hendaklah segera diatasi dengan menunjukkan identifikasi yang jelas, terutama kehadiran peneliti di kalangan orang Cina. Susah untuk meyakinkan bahwa kedatangan kita bukan dalam urusan pajak atau minta sumbangan uang. Jalan ke luar yang mulus ialah datang bersama seorang murid keturunan Cina dan kita diperkenalkan sebagai gurunya. Hampir semua data-data dari kantor-kantor harus "dibeli" tidak ada yang gratis di kota.

Bagaimana memulai penulisan laporan? Pada umumnya peneliti telah mempunyai garis besar (*out-line*) isi laporan yang hendak digarap. Umpamanya (1) Pendahuluan, (2) Landasan teoritis dan pengkajian pustaka, (3) Laporan inti penelitian lapangan, (4) Kesimpulan dan saran-saran. Ada dua cara untuk memulai penulisan ini. Cara yang tradisional ialah dengan memulai satu demi satu dari point *out-line* tersebut di atas. Cara ini jelas cukup sistematis dan konsistensi penghidangan materinya akan lebih terjamin. Kelemahan utama ialah dalam pengaturan stamina penulis. Ada kecenderungan penulis untuk berla-

ma-lama di bagian satu dan dua (Pendahuluan dan Landasan teoritis). Atau kedua bagian ini akhirnya telah merebut energi penulis hingga pada waktu sampai kebagian ini si penulis sudah dalam keadaan letih dan jenuh. Dalam keadaan seperti ini penulis cenderung untuk menulis bagian inti ini sekedar untuk memenuhi hal-hal yang telah diintroduksi (seperti janji-janji yang telah terlanjur dibuat). Tentu saja laporan inti seperti ini tidak akan menampilkan analisa yang segar, tajam dan dinamik. Cara kedua, ialah dengan memulai menulis laporan inti. Ingatan dan pikiran mengenai lapangan masih segar. Keadaan ini sangat membantu penulis untuk mengembangkan analisa dari lapangan dalam horizon yang lebih luas, tanpa diintrik oleh introduksi yang telah ditulis sebelumnya. Apabila terdapat pendataan yang kurang, si peneliti akan dengan mudah mengatasinya, karena hubungan dengan lapangan masih belum lama terputus. Setelah selesai bagian inti laporan, barulah dimulai penghantaran laporan tersebut dalam bab pendahuluan. Jadi di sini kita menulis hasil-hasil penelitian yang telah selesai ditulis sebelumnya, dan penulisan mengenai konsep-konsep teoritis akan terseleksi kepada hal-hal yang sangat relevan yang akan mendukung konsep-konsep yang telah ditemukan di lapangan. Tentu saja setiap orang punya gaya pemecahan masalah sendiri, termasuk juga cara memecahkan masalah penulisan ilmiah. Sebab itu cara mana yang lebih efisien terpulang kepada pilihan kita masing-masing.

5. *Penutup*

Sejak semula penulis tidak ingin menyajikan tulisan ini sebagai sebuah "bimbingan skripsi" penulisan sejarah perkotaan. Tetapi hanyalah sebagai introduksi terhadap kerja yang telah ada di hadapan kita. Introduksi ini didasarkan atas pengalaman penulis, tentu saja sangat subyektif sifatnya.

Seperti telah diuraikan di atas kedua pendekatan studi perkotaan : (1) melihat hubungan ideologis yang mengikat kota dan desa (*hinterland*) secara timbal balik, dan (2) mene-

lusuri interaksi kota sebagai sebuah faktor sosio-ekonomis dan politis dalam satu kesatuan organisasi masyarakat, bukanlah merupakan pilihan (alternatif yang sifat dichotomis), bahkan kedua pendekatan ini harus diperlengkapi dengan konsep adaptasi yang kreatif dari masyarakat perkotaan agar dapat mengangkat hubungan fungsional perkotaan dengan perubahan sosial yang terjadi dari masa ke masa. Semoga alternatif ini pun dapat kelak diperlengkapi untuk mendapatkan kesempurnaan.

DAFTAR KEPUTUSAN

1. Banton, Michael
1957 *Est African City : A Study of Tribel Life in Free-town*, Oxford University Press, London.
2. Bruner, Edward M.
1974 *The Expression of Ethnisisity in Indonesia, In Urban Ethnisisity*, Cahen ed. pp 257280 Tavistock, London
3. Cohen, Abner
1969 *Custom and Polities in Urban Africa: A Study of Migrants in Yoruba Town*, University of California Press Berkeley.
4. Fox, Richard
1974 *Rationale and Romance in Urban Anthropology, In City Ways*, John Friedl, Noel J. Chrisman eds. Thomas Y. Crowell Company, N.Y.
5. Greety, Clifford
1965 *The History of an Indonesia Town* MIT Press, Cambridge.
6. Gulick, John
1967 *Tripoli: A Modern Arab City*, Harvard University Press Cambridge.
7. Harris, Marvin
1956 *Town and Country in Brasil*, Columbia University Press New York.

8. Kuntjaraningrat,
1981 *Methode Penelitian Ilmu-ilmu Masyarakat*, Gramedia Jakarta.
9. Miner, Horace
1953 *The Primitive City of Tinbuctoo*, Primieton University Press, Princeton.
10. Pelly, Usman
1982 *Urban Migration and Adaptation in Indonesia: A Case Study of Minangkabau and Mendailing Batak Migrants in Medan Worth Sumatra* Ph. D. Dissertation, University of Illionis Urbana.
11. Van der Berghe, Pierre L.
1964 *Caneville : The Sosial Structure of a South African Town*. Wesleyan University Press, Middle town Com.

BEBERAPA MODEL PENULISAN SEJARAH SOSIAL

Oleh : Kuntowijoyo

Sekalipun sejarah sosial sudah merupakan gejala baru dalam penulisan sejarah sejak sebelum Perang Dunia II, tetapi sebagai sebuah gerakan yang penting baru mendapat tempat sekitar tahun 1950-an. Di Perancis aliran penulisan sejarah *Annales* yang dipelopori oleh Lucien Febre dan Marc Bloch menjadi model bagi generasi baru penulis sejarah sosial yang semakin kuat kedudukannya dalam dunia penulisan sejarah. Sejak 1958 dengan terbitnya majalah *Comparative Study on Society and History* lengkaplah sudah pengaruh aliran *Annales* terutama di Amerika. Barangkali tradisi sejarah sosial yang berbeda muncul di Inggris, sebagai sumber inspirasi yang kuat dalam penulisan sejarah di luar daratan Eropa, tetapi kehormatan terbesar sebagai pelopor sejarah sosial rupanya masih saja dipegang oleh sarjana-sarjana Perancis. itu. Penulis-penulis sejarah sosial di Amerika biasanya mengakui lebih banyak mendapat pengaruh Perancis daripada Inggris.

Sejarah sosial mempunyai bahan garapan yang sangat luas dan beraneka ragam. Kebanyakan sejarah sosial juga mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah ekonomi, sehingga menjadi semacam sejarah sosial-ekonomi. Tulisan Marc Bloch, *French*

Rural History, misalnya, bukan semata-mata sejarah dari petani, tetapi juga masyarakat desa dalam arti sosial-ekonomi. Tradisi tulisan semacam ini, yang menjadikan masyarakat secara keseluruhan sebagai bahan garapan, hanyalah salah satu macam saja dari sejarah sosial. Dalam pengertian sejarah sosial masih banyak lagi yang dapat dikerjakan, selain yang meneliti masyarakat secara total atau global itu. Tema-tema seperti sejarah sebuah kelas sosial, terutama sejarah kaum buruh, menjadi tema yang penting dalam sejarah sosial di Inggris, dan tentu saja juga bagi kebanyakan penulis sejarah yang berhaluan Marxis. Sejarah peranan sebuah kelas, sepanjang ia tetap merupakan sejarah dari sebuah unit masyarakat dengan ruang lingkup dan waktu yang tertentu dapat digolongkan dalam sejarah sosial. Namun, sebuah tulisan tentang kelas sosial, misalnya kelas menengah, yang tanpa ruang dan waktu yang jelas tidak akan menjadi tulisan sejarah. Tulisan sejarah masih harus mempertimbangkan segala keunikan, dengan membatasi diri pada lingkup ruang dan waktu yang tertentu. Demikianlah misalnya buku Heather Sutherland, *The Making of Bureaucratic Elite*, merupakan sebuah karya sejarah karena ia tidak membicarakan keumuman yang ada pada kelas elite birokrasi, tetapi keunikan-keunikan yang terdapat di dalamnya terutama karena ruang lingkup waktu dan ruang yang terbatas. Generalisasi yang mungkin terdapat dalam buku itu masih mempunyai derajat keberlakuan yang terbatas, jadi bukan membicarakan kelas birokrat pada umumnya. Selanjutnya, pembicaraan mengenai sebuah kelas sosial tidak selalu hanya terbatas dalam pengungkapan mengenai kelas itu sendiri. Tulisan Emmanuel Le Roy Ladurie, *The Peasants of Languedoc*, misalnya, tidak hanya membicarakan mengenai petani, tetapi juga mengenai masyarakat pedesaan pada umumnya. Jadi tulisan Laddurie itu juga dapat digolongkan dalam sebuah sejarah total atau global.

Tema lain yang dapat digarap oleh sejarah sosial ialah tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Tulisan-tulisan Mousnier tentang pemberontakan petani adalah salah satu contohnya.

Demikian juga tulisan Sartono Kartodirdjo, *Peasants' Revolt of Banten in 1888*, barangkali merupakan sejarah sosial pertama yang ditulis dalam historiografi Indonesia. Dalam tulisan Sartono itu, sebagaimana pada umumnya "sejarah baru", telah digunakan pendekatan-pendekatan yang memanfaatkan teori dan konsep ilmu-ilmu sosial. Dengan penggunaan ilmu-ilmu sosial, sejarawan mempunyai kemampuan menerangkan yang lebih jelas, sekalipun kadang-kadang harus terikat pada model teoritisnya. Keterikatan ini dapat mempunyai akibat pada rekonstruksi yang tidak lengkap, sebab harus menuruti logika dan seleksi sebuah model yang eksplisit.

Institusi sosial juga merupakan bahan garapan bagi sejarah sosial. Termasuk di sini ialah tulisan Philip Aries, *A Century of childhood* yang membicarakan mengenai lembaga keluarga, terutama mengenai bagaimana anak-anak di besarkan pada abad ke-17 dan ke-18. Tema semacam ini sangat menarik karena dapat mengungkapkan asal usul sejarah dari kelembagaan dunia modern yang tentu mempunyai perspektif ke depan yang penting. Transformasi masyarakat dengan adanya pembagian kerja sosial yang semakin rumit dan differensiasi sosial yang semakin bercabang. Dalam sejarah Indonesia kita belum banyak mengerti misalnya bagaimana anak-anak dibesarkan pada abad-abad yang lalu, bahkan dari keluarga-keluarga yang mungkin menyimpan banyak keterangan sejarah seperti kaum bangsawan. Sumber sejarah mengenai keluarga bangsawan di masa lalu masih cukup banyak dan tersimpan dengan baik, sehingga dapat merupakan bahan kajian sejarah sosial.

Akhirnya, sejarah sosial dapat mengambil fakta sosial sebagai bahan kajian. Tema seperti kemiskinan, perbanditan, kekerasan, kriminilitas dapat menjadi sebuah sejarah. Demikian juga sebaliknya kelimpahruahan, kesalehan, kekesatriaian, pertumbuhan penduduk, migrasi, urbanisasi, dan sebagainya. Demikianlah misalnya karya Peter Laslett, *The Illicit Love (?)* yang mengungkapkan mengenai lahirnya anak-anak haram pada masyarakat Inggris pada zaman Vitorian yang terkenal dengan

ketertiban moralnya. Dengan data-data dari catatan-catatan gereja terungkaplah ikhwal sosial tentang percintaan yang tersembunyi itu. Sumber-sumber sejarah Indonesia sebenarnya juga sangat kaya dengan bahan-bahan sejarah sosial yang termasuk kelompok ini.

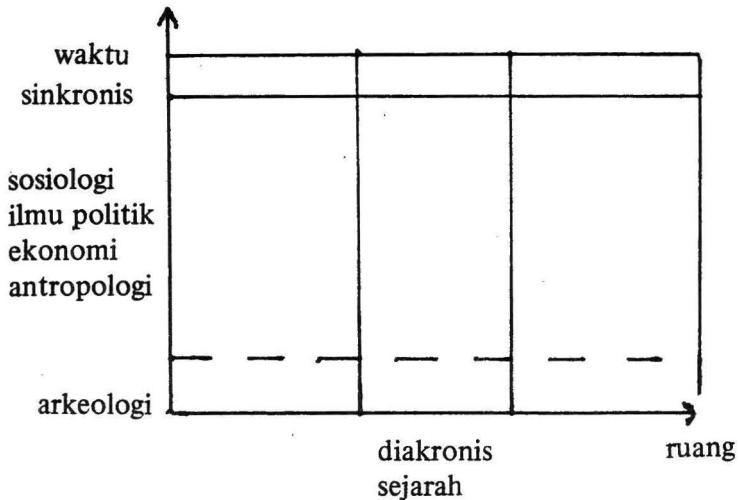
Dari semua tema penulisan itu akan dibahas di sini tema yang pertama, yaitu sejarah sosial yang menjadikan masyarakat sebagai bahan kajian. Kalau kita menulis tema-tema lain, baik mengenai kelas sosial, peristiwa sosial, institusi sosial maupun fakta sosial, seolah-olah kita mengadakan sebuah spesialisasi dengan cara mengisolasi tema garapan kita dari permasalahan yang sebenarnya sangat kompleks. E.J. Hobsbawm berusaha untuk mengesahkan apa yang disebut "*societal history*" atau "*history of society*" untuk membedakan dengan sejarah sosial yang menulis mengenai hal-hal yang sebagian-sebagian itu.¹ Sejarah sosietaI demikian selanjutnya akan disebut saja sejarah sosial — memerlukan usaha yang membuat kerangka utuh mengenai masyarakat, dengan kata lain yang total atau global, sejarah masyarakat sebagai keseluruhan. Sejarah kota termasuk dalam kategori sejarah sosial ini. Penelitian dan penulisan sejarah sosial ini memerlukan strategi yang berbeda dengan penulisan sejarah sosial yang lainnya.

Dalam hubungan strategi penulisan sejarah sosial inilah tulisan ini berusaha untuk menjelaskan beberapa model yang dapat dipakai dalam mengorganisasikan dan mensistisasikan tulisan sejarah itu. Model sangat penting dalam setiap penelitian, baik ilmu-ilmu alam ataupun ilmu sosial. Untuk sejarah, model akan memberikan inspirasi heuristik yang berguna dalam pencarian dan pengumpulan bahan serta penyusunan. Seperti dikatakan oleh Hobsbawm, setiap penulisan sejarah sosial memerlukan sebuah model, yang sekalipun tidak sangat formil dan terperinci strukturnya, setidaknya-tidaknya sebagai sebuah kerangka yang menentukan ke arah prioritas penelitian dan asumsi-asumsi pokok penulis sejarah mengenai kajiannya. Dengan kerangka akan nampak lingkaran pusat (*central nexus*) atau lingkaran hu-

bungan dari permasalahan yang sedang digarap. Seperti diketahui bahwa sebuah sistim sosial merupakan kesatuan dari unit-unit yang saling berhubungan, demikian juga sebuah "sistem sejarah" merupakan hubungan dari unit-unit yang menjadi satuan yang lebih besar. Lingkaran sebab-akibat, pengaruh, dan perbuatan dapat merupakan sebuah sistem apabila strukturnya menjadi jelas.

Untuk melukiskan sebuah sistem sosial dari suatu kurun sejarah, seperti misalnya tulisan Marc Bloch mengenai feodalisme Eropa, model sangat penting. Sekarang saatnya kita membedakan antara model yang bersifat sinkronis dan diakronis. Dalam sebuah model yang sinkronis masyarakat digambarkan sebagai sebuah sistem yang terdiri atas struktur dan bagiannya. Pendekatan struktural dan fungsional dalam ilmu-ilmu sosial menyanar pada model sinkronis yang melihat potret masyarakat dalam keadaan statis, dalam keadaan waktu nol. Dalam penelitian etnografis misalnya kita temukan lukisan deskriptif tentang pola integrasi yang terperinci dari suatu masyarakat sama seperti halnya orang membuat tatabahasa deskriptif untuk melukiskan bentuk-bentuk bahasa. Sebuah model sinkronis lebih mengutamakan lukisan yang meluas dalam ruang dengan tidak memikirkan terlalu banyak mengenai dimensi waktunya. Sebaliknya, model yang diakronis lebih mengutamakan memanjangnya lukisan yang berdimensi waktu, dengan sedikit saja luasan ruangnya. Model sinkronis kebanyakan digunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan juga arkeologi, sedangkan model sinkronis digunakan oleh ilmu sejarah. Untuk menggambarkan hubungan antara ilmu sosial yang sinkronis dengan yang diakronis kami kutipkan gambar dari buku Johan Galtung, *Theory and Method of Social Research*² sebagai berikut :

Gambar 2 : Hubungan Ilmu Sosial sinkronis dan diakronis



Suatu model yang umum bagi lukisan sinkronis biasanya dimulai dengan gambar tentang lingkungan material dan historis, kemudian sumber-sumber produksi, konsekuensi dalam struktur ekonomi seperti masalah pembagian kerja, tukar-menukar barang, akumulasi, distribusi dari surplus, dan sebagainya, serta hubungan sosial yang timbul karena latar belakang itu. Model yang umum ini dapat dipakai sebagai ancar-ancar dalam penulisan, tetapi sejarawan juga seharusnya memakai model-model dari ilmu sosial yang diakronis. Model diakronis yang menawarkan bukan saja sebuah struktur dan fungsinya, melainkan suatu gerak dalam waktu dari kejadian-kejadian yang konkrit harus menjadi tujuan utama dari penulisan sejarah. Dengan lain perkataan, sebuah model dinamis. Namun perlu pula diingatkan bahwa dalam model diakronis pun sejarawan tidak seharusnya memakai model-model pertumbuhan yang umum, seperti misalnya model materialisme historis dari Marxisme atau model pertumbuhan dari kaum non-Marxis semacam Rostow

dengan tingkatan-tingkatan perkembangan ekonominya. Sejarawan harus mencari model perkembangan diakronis dengan melihat kepada bahan-bahan dan aktualitasnya. Lebih daripada kepada model-model kemudian menerapkannya dengan paksa pada lukisan sejarahnya. Oleh karena pertumbuhan sejarah suatu masyarakat tertentu tentu mempunyai jalan yang berbeda di samping persamaan yang mungkin ada maka untuk setiap masyarakat perlu adanya model tersendiri.

Model diakronis akan menunjukkan bagaimana "evolusi dari sebuah bentuk budaya dan menghilangkan rekaan waktu nol", demikian Jan Vansina; tokoh sejarawan yang banyak menggunakan tradisi lisan dalam mengungkapkan masa lalu dari masyarakat yang belum mengenal huruf.³ Model diakronis akan menjadi pelengkap yang sempurna bagi penulisan yang sinkronis. Bagi sejarawan yang selalu melihat sekaligus kepada *structure* dan *conjuncture*, bahwa struktur bukan suatu gejala pada waktu nol yang tak berubah, tetapi sesuatu yang selalu mengalami transformasi sepanjang waktu. Rangkaian kejadian yang susul-menyusul tidak saja menjawab mengenai apa yang ada, tetapi juga mengapa sesuatu itu ada bagaimana terjadinya. Hubungan kausal, pengaruh, perbuatan-perbuatan dengan kesengajaan, merupakan esensi dari penulisan sejarah. Sejarah bukannya suatu susunan sinkronis dari kejadian, atau kerelasi antara variable yang merupakan urutan sebuah situasi, tetapi suatu urutan dinamis atau dialektis dengan waktu yang jelas.

Mengenai bagaimana model diakronis atau dinamis itu ditulis, Jan Vansina dalam tulisan yang sama menyebutkan dua macam model. Pertama ialah model yang *narrative*. Dalam model ini masyarakat atau budaya digambarkan secara evolusi, bagaimana ia tumbuh dari awal sebagai suatu gejala yang unik dengan mengingat kepentingan dari semua detailnya. Perkembangan sejarah dilihat sebagai sebuah rangkaian mata rantai kausalitas yang secara terus-menerus menumbuhkan gejala baru dalam masyarakat atau budaya. Kedua, sebuah model diakronis dapat bermula dari sebuah situasi secara sinkronis, dan melalui

situasi antara menuju kepada situasi terakhir. Tentu saja untuk setiap situasi yang sedang dilukiskan seluruh bukti-bukti harus dikemukakan dengan jelas, sehingga nampak perkembangannya. Model dinamis yang demikian ini dapat nampak sebagai berganti-gantinya situasi, atau model sinkronis yang dibuat berurutan. Untuk model dinamis yang pertama, masyarakat atau budaya dilihat perkembangannya dari tingkat yang paling sederhana menuju kepada tingkat yang semakin kompleks, sedangkan untuk model yang kedua tekanan terletak dalam situasi yang merupakan potongan-potongan. Dalam kedua-duanya sebenarnya model sinkronis dan diakronis selalu merupakan kelengkapan, dan hubungan antara kedua model itu merupakan sebuah dialog yang berjalan dalam bentuk dialektik. Artinya, sebuah keadaan yang mapan dan terstruktur selalui dinegasikan oleh perkembangannya sendiri.

Perkembangan sejarah yang nampak dalam dinamika masyarakat timbul karena adanya kekuatan-kekuatan sejarah, baik yang berupa kekuatan alam, seperti misalnya ada dan tidaknya sumber-sumber ekonomis, pertumbuhan penduduk, kepentingan-kepentingan sebuah keas, grup atau individu, penemuan teknologi baru, ideologi, kepercayaan, pengaruh-pengaruh luar, dan sebagainya. Dalam model yang dinamis ini sangat penting ialah adanya *duration*, kelangsungan dalam waktu, jadi bukan semata-mata *function*. Sejarah berupa urutan, kejadian yang mengawali, dan rangkaian sebab akibatnya. Oleh karena itu sejarah bukan hanya mengemukakan keumuman dari ilmu yang monothetis, tetapi keunikan-keunikan dari ilmu yang ideografis. Maka sangat perlu bagi sejarawan untuk menciptakan sendiri modelnya yang paling tepat menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam dinamika sosial-sejarah suatu masyarakat.

Oleh karena itu tulisan ini bermaksud untuk mengemukakan beberapa contoh model yang telah dipakai oleh sejarawan dalam merekonstruksikan masa lalu. Maksud dari tulisan ini ialah supaya dengan pemakaian model, rekonstruksi masa lalu dapat mempunyai daya menerangkan yang lebih kuat tanpa

adanya penyederhanaan sebagaimana sering terjadi dalam penulisan ilmu-ilmu sosial yang lebih cenderung kepada generalisasi. Dari hasil pembacaan sejarah sosial, setidaknya dapat ditemukan enam model, yang masing-masing kami beri nama (1) model volusi, (2) model lingkaran sentral, (3) model interval, (4) model tingkat perkembangan, (5) model jangka panjang menengah pendek, dan (6) sistematis.

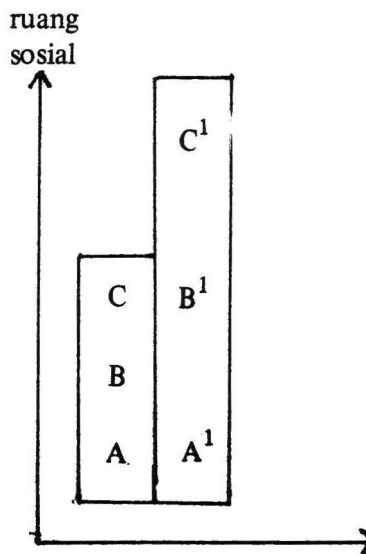
Model Evolusi

Model yang pertama ini disebut model evolusi untuk menunjukkan jenis penulisan yang melukiskan perkembangan sebuah masyarakat itu berdiri sampai menjadi sebuah masyarakat yang kompleks. Tentu saja model ini hanya dapat diterapkan pada bahan kajian yang memang mencoba mengaji masyarakat dari permulaan berdirinya, yaitu jika memang sumber-sumber sejarahnya memungkinkan untuk penulisan yang begini. Kebanyakan kota-kota di Amerika Serikat memenuhi kriteria tersedianya bahan untuk jenis penulisan ini. Karya Kenneth A. Lockridge, *A New England Town: The First Hundred Years, Dedham, Massachusetts, 1636–1736* adalah salah satu contoh dari tulisan dengan model evolusi.⁴ Dalam buku itu Kota Dedham yang merupakan sebuah kota New England tempat para imigran dari Eropa datang ke Amerika digambarkan pada mulanya adalah sebuah *utopian commune*. Ketika kota itu masih muda dan lambang-lambangnyanya masih serba sederhana, kehidupan masyarakat berpusat pada kegiatan keagamaan di gereja, pada kehidupan politik yang bersifat komunal. Masyarakat komunal itu kemudian mengalami kemunduran dengan adanya kekuatan sejarah baru yang musuh berupa kegiatan komersial dan industri dan menjadikan Dedham sebagai pinggir dari Kota Boston yang sedang berkembang. Dedham yang semula adalah desa yang statis dengan kehidupan ekonominya yang agraris mulai runtuh. Pusat keagamaan gereja tidak lagi merupakan jantung–hati kesempurnaan, sebab kota sudah menggantikan desa. Kehidupan komunal, egalitarian, digantikan oleh perbedaan-perbedaan sosial dan penyimpangan politik. Proses ini

terjadi dari tahun 1636 sampai 1686 selama lima puluh tahun dari kehidupan kota kecil itu.

Sebagai gantinya Dedham menjadi sebuah kota provinsi, dengan adanya komunitas baru, politik baru, dan masyarakat baru, dan masyarakat. Dalam kota yang baru itu muncul bentuk demokrasi baru yang sedang mengalami perkembangan, demokrasi yang bermula dari hak-hak individu dan menjadi ideologi yang berpengaruh sejak revolusi Amerika serta menjadi semakin kuat dalam abad ke-19 menggantikan "demokrasi" yang disebut sebagai "*conservative corporate voluntarism*" yang menjadi ciri pokok masyarakat komunal para pendatang baru di Amerika.

Untuk jelasnya model evolusi itu dapat digambarkan demikian :



Gambar 2. Model Evolusi

Gambar itu menjelaskan bahwa semakin jauh waktu berjalan, semakin kompleks kehidupan masyarakat. Dalam waktu pertama, dengan masyarakat yang mempunyai komponen (A, B, C) dengan sub komponen misalnya (x, y, z) pada komponen A, dan sub komponen (k, l, m) pada komponen B, dan sub komponen (r, s, t) pada komponen C, masih menunjukkan ciri-ciri yang sederhana. Dengan adanya kemajuan dalam perdagangan dan industri komponen itu menjadi (A^1, B^1, C^1) , masing-masing dengan sub komponen yang lebih banyak, dan berbeda secara kualitatif. Misalnya komponen A^1 terdiri dari sub komponen $(x^1, y^1, z^1, \dots, x^n, y^n, z^n)$, demikian pula untuk komponen-komponen yang lainnya. Pada buku Lockridge digambarkan bahwa (A, B, C) berlangsung kurang lebih selama 50 tahun dan (A^1, B^1, C^1) selama 50 tahun kemudian. Dan kota itu akan terus berkembang menjadi bagian dari kota kesibukan Kota Boston. Dedham sebenarnya menunjukkan gambaran yang umum dari pengalaman sejarah bangsa Amerika dan karena itu membaca sejarah Dedham juga membaca sejarah Amerika.

Sekalipun untuk sebuah kota di Indonesia model penulisan yang mengikuti dari awal pertumbuhan perumpakan pekerjaan yang tak mudah, misalnya melihat evolusi dari sebuah desa yang semakin ramai menjadi kota hampir-hampir tidak mungkin, kota-kota yang sengaja didirikan seperti Batavia yang kemudian menjadi Jakarta, atau kota-kota pelabuhan, kota-kota setasiun kereta api dan semacamnya dapat ditulis dengan model ini.

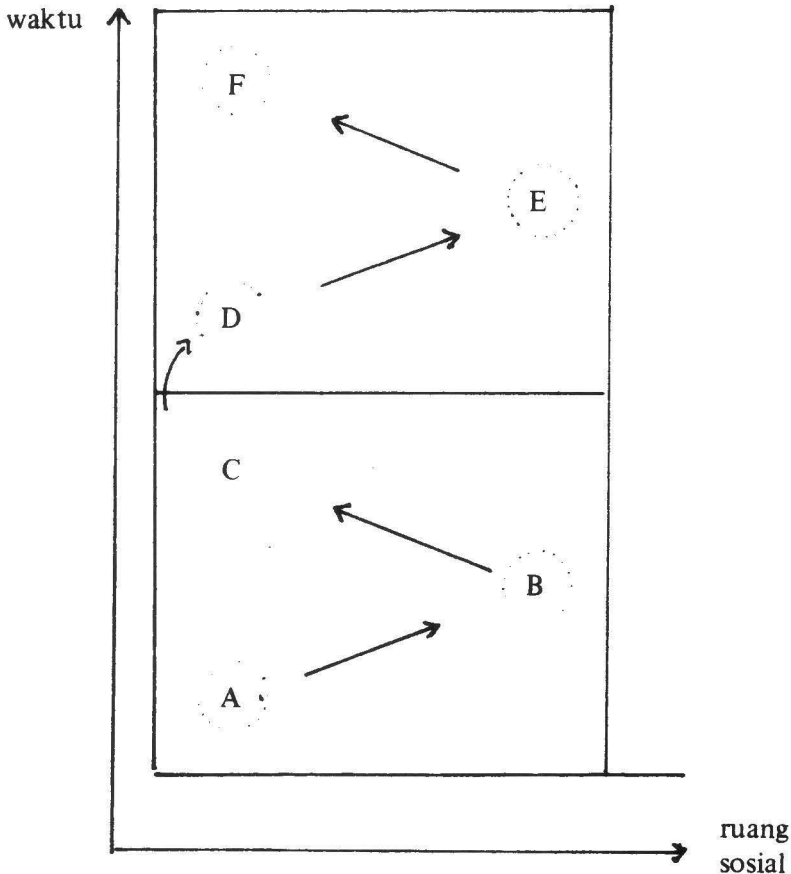
Model Lingkaran – Sentral

Model ini tidak menulis mengenai kota atau masyarakat dari awal, tetapi dari titik yang sudah menjadi. Setiap penulisan yang bertolak dari titik sejarah di tengah-tengah demikian biasanya selalu mulai dengan lukisan sinkronis tentang masyarakat itu, baru kemudian secara diakronis ditunjukkan pertumbuhannya. Model lingkaran-sentral ini diambil dari telaah atas tulisan LeRoy Ladurie. *The Peasants of Languedoc*⁵ yang melukiskan

masyarakat petani di Languedoc, Perancis, pada abad ke-16 dan ke-17. Dengan studi tentang arsip-arsip tanah, *compoix*, Ladurie mengungkapkan perkembangan sejak akhir abad ke-15 sampai permulaan abad ke-18 yang merupakan fase kedua dari rangkaian perkembangan sosial-ekonomi fase pertama pada jaman pertengahan (abad ke-11 sampai ke-15), fase kedua (akhir abad ke-15 sampai awal abad ke-18) di zaman modern dan fase mutakhir (dari 1750-1950).

Ladurie memulai dengan adanya gejala baru dalam penilikan tanah dan konsekwensi sosial-ekonomisnya, sebagai basis dari uraian diakronisnya kemudian. Kemudian tulisan itu dilanjutkan dengan mengemukakan eksplosi penduduk dan akibat-akibatnya pada ekonomi, pembagian tanah, konsentrasi tanah, pemiskinan penduduk. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan munculnya ekonomi baru yang berupa persoalan upah, sewa, laba, dan pemiskinan golongan penerima upah di pedesaan. Secara *progresive* masing-masing kekuatan sejarah *mentransformasikan Languedoc*. Semua itu dalam pembagian buku Ladurie memasukkan dalam bab *Malthusian Renaissance* untuk menekankan pengaruh dari pertumbuhan penduduk pada sejarah sosial-ekonomi. Dalam kerangka pemikiran demografis ini, terdapat urutan dinamika sejarah yang secara bergantian berpusat pada lingkaran tertentu, dan merupakan hubungan sebab-akibat pokok, dan membentuk suatu gerakan tersendiri yang membuat sejarah maju dalam secara diakronis dan sekaligus menjadi lebih maju secara sinkronis. Demikianlah maka setelah adanya *Malthusian Renaissance* timbul gejala besar yaitu timbulnya kesadaran baru dan perjuangan sosial, "*New States of Conciousness and Social Struggle*". Kegagalan surplus pertanian untuk menopang pertumbuhan penduduk sudah mencapai tingkat kematangan dan menghasilkan kesadaran baru, yang berupa reformasi agama yang pada taraf tertentu menggugat sistim sosial yang tak lagi mendukung kesejahteraan sosial ekonomi itu, menyebabkan timbulnya keresahan sosial dan pemberontakan.

Tentu saja penuturan dalam buku Ladurie tersebut jauh lebih kaya dan tak dapat disederhanakan dalam tulisan ini. Namun sebagai sebuah gambaran visual, gambar di bawah ini barangkali akan menerangkan lebih banyak dari cara Ladurie menggarap tulisannya.



Gambar 3. Model lingkaran-sentral

Kejadian A mempunyai akibat-akibat di sekitarnya karena A merupakan pusat dari sebuah lingkaran. Pada gilirannya A dan lingkarannya menyebabkan terjadinya pusat B yang juga di sekitarnya ada sejumlah gejala lagi. Dan seterusnya, sampai sejarah masyarakat mencapai lingkaran yang berpusat pada F. Dinamika sejarah merupakan perkembangan logis dari serentetan gejala sejarah yang saling berpautan. Dalam sejarah pertanian, perkembangan penduduk yang memiskinkan masyarakat itu telah dicoba diatasi dengan usaha mengubah lembaga-lembaga sosial melalui bermacam ideologi baru dan kekerasan. Perkembangan sejarah babak berikutnya ialah Revolusi Industri yang membawa masyarakat agraris menjadi masyarakat industrial dan menjawab secara memadai tantangan perkembangan penduduk yang sudah terjadi sejak permulaan abad ke-16 itu.

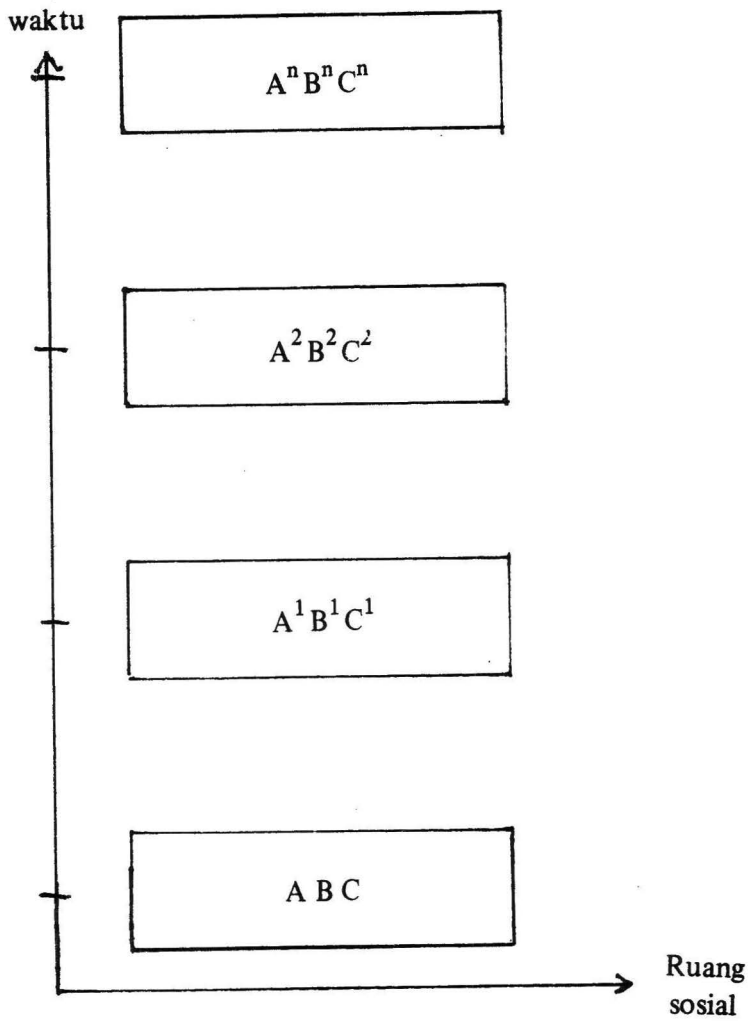
Dalam sejarah Indonesia barangkali sulit untuk mencari sepadan dari model ini, karena perkembangan Sejarah Indonesia banyak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar, seperti imperialisme. Tetapi, jika kita melihat lebih dalam lagi, barangkali perkembangan sejak zaman Mataram Lama sampai Mataram dapat dilihat dari perspektif semacam ini. Apakah hipotesa demografis memang berlaku untuk sejarah Indonesia dalam menerangkan jatuh bangunnya kerajaan dan sistem sosial, tentu sangat tergantung kepada tersedianya sumber dan keahlian menafsirkan sumber itu.

Model Interval

Model ini merupakan kumpulan dari lukisan sinkronis yang diurutkan dalam kronologi sehingga nampak perkembangannya, sekalipun tidak nampak benar hubungan sebab-akibat. Model ini terpikirkan misalnya ketika kita mendapatkan keterangan dari suatu zaman pada periode tertentu mengenai suatu masyarakat tertentu. Kemudian secara kebetulan ada pula keterangan mengenai masyarakat itu pada periode yang lain, tanpa adanya mata rantai yang menghubungkan antara dua periode itu. Demikian seterusnya sehingga urutan lukisan sinkronis itu

dapat menunjukkan secara tak sempurna perkembangan diakronisme. Dalam sejarah Indonesia misalnya, kita ingat bahwa pada tahun 1868 pemerintah kolonial mengadakan survai pedesaan di Jawa dan Madura yang sebagian hasilnya diterbitkan dalam Bergsma, *Eindresume* yang banyak menjadi sumber penulisan sejarah pedesaan itu. Untuk daerah Pati Jawa Tengah, kebetulan Burger yang melihat pentingnya laporan 1868 membuat laporan tentang desa-desa tertentu di Pati pada tahun 1928 dengan perbandingan tahun 1868 itu.⁶ Kebetulan pula Bachtiar Rivai tertarik untuk menulis daerah yang sama pada tahun 1958⁷, dan selanjutnya Frans Husken tertarik untuk menulis daerah yang sama pada tahun 1976⁸. Dengan tidak sempurna sebenarnya kita mendapatkan beberapa lukisan sinkronis, 1868, 1928, 1958, dan 1976. Orang dapat dengan mudah menangkap perubahan-perubahan masyarakat dengan membaca secara kritis analisa-analisa tahun-tahun itu. Dengan kata lain, kita dapat memperoleh, sebuah model diakronis yang berupa tahun-tahun tertentu secara interval.

Untuk menggambarkan dalam bentuk visual kiranya adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Model Interval

Prospek dari pendekatan ini dapat dilihat dari kemungkinan tersedianya sumber sejarah, terutama kalau kita mengingat bahwa sensus penduduk di Indonesia tidak secara teratur. Ada sejumlah bahan-bahan statistik yang memungkinkan untuk menulis secara ini, setidaknya karena adanya sensus pada tahun 1905, 1920, 1930, 1960, dan seterusnya. Dari data-data sensus ini tentu dapat dilihat perkembangan suatu unit geografis tertentu seperti sebuah kota atau daerah.

Model Tingkat Perkembangan

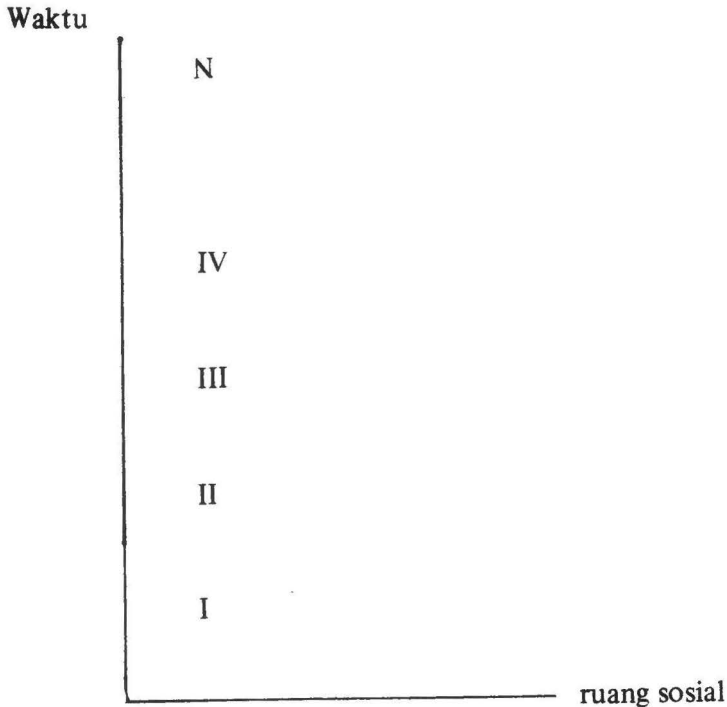
Model ini adalah penerangan dari teori perkembangan masyarakat yang diangkat dari sosiologi. Model-model yang banyak dipakai dalam menerangkan perkembangan sejarah ialah Marx atau Rostow. Di sini akan dikemukakan tulisan Neil J. Smelser tentang Revolusi Industri sebagai contoh, yaitu *Sociological History: The Industrial Revolution and the British Working-Class Family*⁹. Dalam tulisannya yang dengan tegas dinyatakan sebagai sejarah sosiologis itu, sosiolog Smelse memakai model differensiasi struktural untuk melukiskan tahap-tahap perkembangan Revolusi Industri dan masyarakat Inggris, deskriptif dan bercorak unik. Smelser dengan sengaja mendekat Revolusi Industri eksplisit yang diambil dari pemikiran sosiologis. Dengan singkat model ini mengatakan bahwa dalam sebuah kondisi tertentu dari suatu disequilibrium sosial, struktur sosial akan berubah sedemikian rupa sehingga peranan yang semula meliputi berbagai tipe kegiatan menjadi semakin terspesialisasi; dengan kata lain, struktur sosial menjadi semakin kompleks dan dipilah-pisahkan. Dengan model analitis yang abstrak inilah dapat disoroti perkembangan ke arah masyarakat industri di mana pun dan kapan pun. Kunci dari pendekatan Smelser ialah *structural differentiation*, yaitu proses semakin menuju kepada spesialisasi.

Untuk menerangkan tingkatan-tingkatan perkembangan Smelser memakai model tujuh tingkat. Tingkat pertama ialah adanya ketidakpuasan dengan peranan yang sudah dilembagakan, atau dengan organisasi dari peranan itu sendiri. Misalnya

ialah ketidakmampuan dari sistem pasar untuk membagi kemakmuran, ketidakmampuan keluarga untuk mendapatkan upah yang layak, dan sebagainya. Tingkat kedua, gejala yang bersumber pada ketidakpuasan, itu, seperti kekhawatiran, permusuhan, dan fantasi tentang keruntuhan. Di sini juga nampak adanya konflik-konflik sosial. Ada juga fantasi tentang sebuah utopia yang mengagungkan masa lalu, yang dapat berupa sebuah ideologi yang melahirkan gerakan sosial. Tingkat ketiga, penanganan dan penyaluran dari gejala kerusakan sosial. Agen-agen dari kontrol sosial, seperti polisi, jaksa, press, pemimpin masyarakat, dan sebagainya mulai aktif dalam kampanye untuk menahan gejala yang mengancam kestabilan sosial itu. Tingkat keempat, munculnya gagasan-gagasan baru yang mencoba menunjukkan jalan ke luar dari ketidakpuasan itu. Tingkat kelima, usaha dalam bentuk yang institusional yang mungkin akan meredakan ketidakpuasan itu. Di sini proses perubahan bergerak dari general ke yang khusus. Dalam bidang ekonomi, arah ini dapat nampak dalam usaha untuk mengadakan pembaharuan untuk mengatur ketenagakerjaan melalui peraturan-peraturan yang meringankan problem-problem sosial. Tingkat keenam, usaha untuk mengukuhkan bentuk-bentuk lembaga yang baru dengan berbagai macam inovasi. Tingkat ketujuh, bentuk kelembagaan yang baru itu dikonsolidasikan sebagai ciri yang permanen dari struktur sosial. Selanjutnya, Smelser membagi pembabakan waktu berdasarkan ketujuh tingkat perkembangan itu.

Untuk mudahnya, secara umum model itu dapat digambarkan di bawah ini :

Gambar 5. Model Tingkat Perkembangan

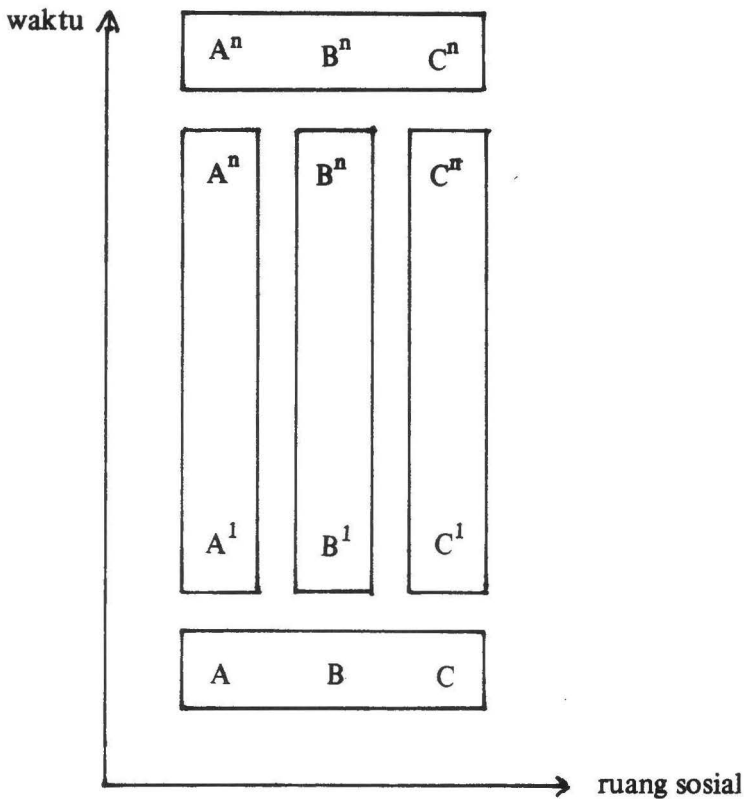


Untuk Indonesia, pengenalan industrialisasi terjadi dalam sebuah masyarakat kolonial, dan rupa-rupanya perkembangan setelah itu tidak sepenuhnya memenuhi model yang dilukiskan oleh Smelser itu. Oleh karena itu tentu saja untuk menerapkannya dalam sejarah sosial Indonesia model yang lebih tepat harus lahir dari kenyataan sejarah atau sosiologi masyarakat Indonesia sendiri. Modifikasi diperlukan mengingat misalnya adanya struktur sosial ekonomi yang dualistis, atau plural, dalam masyarakat Indonesia, sehingga industrialisasi yang menimpa satu sektor sosial ekonomi dapat mempunyai implikasi lain bagi sektor yang lain. Modifikasi yang sama harus dilakukan bagi model-model perkembangan lainnya.

Model Jangka Panjang – Menengah – Pendek

Model ini diambil dari Fernand Braudel menangani sejarah sosial. Dalam bukunya yang merupakan karya utama, yaitu *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II* yang terbit dalam dua jilid tebal dan merupakan hasil kerja selama 20 tahun, Braudel membagi sejarah dalam tiga macam keberlangsungan. Pertama, ialah sejarah jangka panjang yang perubahannya sangat lamban, merupakan perulangan yang konstan dan perkembangan waktu yang tak dapat dilihat. Sejarah ini terutama mengenai hubungan manusia dengan lingkungannya, atau apa yang disebutnya sebagai *geografical time*. Kedua, ialah perkembangan yang lamban, tetapi dapat dirasakan ritmenya. Di sinilah letak sejarah dari kelompok sosial atau pengelompokan sosial, atau sejarah sosial itu sendiri. Braudel menyebutnya sebagai sejarah jangka menengah yang menempati sebuah "*Social time*". Ketiga, ialah sejarah jangka pendek, yaitu sejarah dari kejadian-kejadian, *l'histoire evenementielle*. Di sini sejarah berjalan dengan serba cepat, pendek-pendek, dalam *fluktuasi* yang menggelisahkan. Braudel menyebutnya sebagai sejarah yang berdimensi individual, atau *individual time*. Khusus mengenai sejarah struktur, dikatakannya bahwa dalam setiap struktur ada elemen perubahan, gerakan, sehingga struktur juga nampak sebagai konjunktur.

Dalam bentuk gambar, pendekatan Braudel akan berupa sebagai di bawah ini :



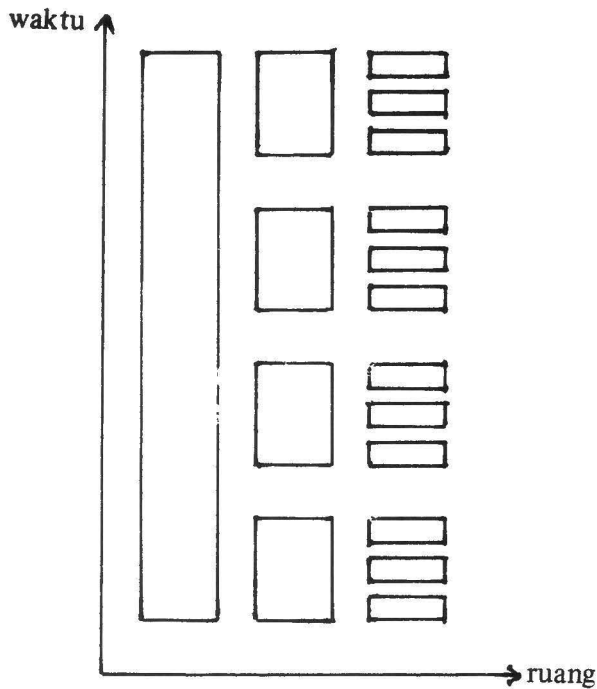
Gambar 7. Model Sistimatis

Dalam sejarah Indonesia banyak sekali kemungkinan untuk menggarap sejarah sosial dengan model ini. Sebagai contoh misalnya disertasi Soetjipto Tjiptoatmodjo (1983) mengenai Selat Madura nampak sedikit banyak usaha ke arah penulisan sejarah yang demikian.

Model Sistematis

Model ini terutama sangat sesuai untuk menelusur sejarah sosial dalam arti perubahan sosial. Model ini diambil dari membaca buku Thomas C. Cochran, *Social Change in America*,¹¹ yang mencoba membuat pendekatan yang sistematis terhadap perubahan sosial di Amerika dalam abad ke-20. Ia memulai bukunya dengan mengemukakan elemen-elemen sosial yang akan dijadikannya ukuran bagi perubahan sosial itu. Ia mencoba menerapkan pendekatan *behavioral sciences* untuk sejarah, dan mencoba melihat sejarah Amerika dengan demikian. Hasilnya ialah sebuah sejarah institusional, yang menekankan lebih banyak pada perubahan dalam perilaku yang terkondisi secara sosial lebih daripada pada uraian sejarah yang melukiskan kejadian politik, orang-orang besar, dan kejadian-kejadian yang menarik. Dalam tulisan itu ia ingin memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial dari zaman yang terdahulu telah mengalami perubahan yang radikal pada tahun 1900 sampai 1970. Untuk itu ia menguraikan masing-masing perubahan dalam masing-masing lembaga sosial, dan akhirnya ia membuat analisa mengenai ciri-ciri pokok masyarakat Amerika dalam abad ke-20 ini.

Untuk menunjukkan secara jelas, kiranya gambar di bawah ini dapat direnungkan.



Gambar 6. Model Jangka Panjang Menengah – Pendek

Sistematika penulisan semacam ini tentu banyak menjadi model bagi penulisan mengenai perubahan sosial. Tulisan W.F. Werthein, *Indonesian Society in Transition* juga memakai model semacam ini.

Akhirnya, sebuah penulisan sejarah sangat tergantung kepada kondisi obyektif, berupa tersedianya sumber, dan kondisi obyektif, berupa kemampuan penulis sejarah. Maksud dari uraian mengenai model ini kiranya jelas, yaitu meningkatkan ke-trampilan sejarawan dalam menentukan strategi penulisan yang paling tepat sesuai dengan kondisi obyektif dan subyektif, serta tujuan dari penulisan itu sendiri.

+ Makalah untuk Pekan Pengarahan Tenaga Penulis/Peneliti Biografi dan Kesejarahan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Tanggal 5 s/d 9 Juni 1983 di Wisata Hotel Internasional, Jakarta.

Catatan

1. E.J. Hobsbawm, "From Social History to the History of Society", dalam Felix Gilbert dan Stephen R. Graubard (eds.), *Historical Studies Today* (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1972), 1–26. Kutipan selanjutnya juga diambil dari karangan ini.
2. Johan Galtung, *Theory and Methods of Social Research* (New York: Columbia University Press, 1969).
3. Jan Vansina "Culture Through Time", dalam Raoul Naroll dan Ronald Cohen (eds.), *A Handbook of Method in Cultural Anthropology* (New York: Culumbia University Press, 1970), 165–179.
4. Kenneth A. Lockridge, *A New England Town: The First Hundred Years, Dedham, Massachusetts, 1636–1736* (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1970).
5. Emmanuel LeRoy Ladurien *The Peasants of Languedoc* (Chicago: University of Illionis Press. 1976).
6. D.H. Burger, "Raport over de Desa Pekalongan in 1868 en 1928" *Economische Beschrijving*, I. 1–12.
7. Bachtiar Rivai, "Bentuk Milik Tanah dan Tingkat Kemakmuran: Penyelidikan Pedesaan di Daerah Pati, Djawa Tengah (Disertasi, 1958).
8. Frans Husken, "Perkembangan Historis di Daerah Pedesaan Pantai Utara Jawa", *Cakrawala Majalah Penelitian Sosial*, 8, 5, 441–462.
9. Neil J. Smelser, "Sociological History: The Industrial Revolution: and the British Working-Class Family", dalam bukunya sendiri, *Essays in Sociological Explanation* (Englewood Sliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1968), 76–91

10. Fernand Braudel, *The Mediterranean World in the Age of Philip II* (New York. Harper & Row, PUblishers, 1972), Vol, I dan Vol. II. Baca terutama *Preface*.
11. Thomas C. Coehran. *Social Change in America: The Twentieth Century* (New York: Harper & Row, Publishers, 1972).

BEBERAPA PANDANGAN TENTANG PENULISAN BIOGRAFI

Oleh : AB. Lopian

Sebenarnya telah banyak karangan tentang penulisan biografin yang pernah disampaikan dalam rangka proyek IDSNI dari Departemen P dan K. Menurut hemat saya, suatu kajian dari makalah-makalah tersebut (yang telah diterbitkan dalam satu jilid di bawah judul *Pemikiran Biografi, Kepahlawanan dan Kesejarahan* (tahun 1980—1981) sudah cukup untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan tugas kita, yakni menulis biografi pahlawan atau tokoh nasional.

Ada perasaan canggung pada saya ketika menerima permintaan untuk mempersiapkan sebuah ceramah mengenai metode penulisan biografi. Maklumlah, sampai sekarang saya sendiri belum pernah menghasilkan sebuah karya yang berbentuk biografi sehingga saya mulai bertanya pada diri sendiri, bagaimana sebaiknya mendekati persoalan yang diberikan kepada saya sekalipun dengan kesadaran penuh bahwa penulisan biografi bukanlah bidang keahlian saya. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan: Andaikan saya seorang penulis biografi, atau, andaikan saya ditugaskan untuk menulis sebuah biografi, apakah

yang harus saya lakukan agar supaya hasil tulisan saya dapat memenuhi syarat-syarat minimal?

Saya kira jawaban logis pertama-tama adalah membaca sebanyak mungkin biografi-biografi yang terkenal untuk belajar bagaimana penulis telah berhasil menyajikan suatu kisah riwayat hidup seorang tokoh. Bahan-bahan apa yang dipergunakan penulis untuk memperoleh data dan cara bagaimana ia memperolehnya; bagaimana ia membagi-bagi data itu dalam bab-bab tertentu, dengan kata lain, bagaimana ia membuat periodisasi tentang riwayat tokoh yang sedang disorotinya; bagaimana ia mengungkapkan hal-hal yang kontroversial, bagaimana hal-hal negatif dikemukakan tanpa mengurangi jasa-jasa tokoh itu; bagaimana caranya menyajikan data yang terkumpul itu dalam suatu cerita yang utuh?; dan sebagainya.

Biografi merupakan salah satu bentuk karya sejarah. Oleh sebab itu segala persyaratan tentang penulisan karya sejarah berlaku pula bagi penulisan biografi, seperti hal-hal yang menyangkut pengumpulan data, termasuk kritik terhadap sumber (tertulis maupun yang lisan), dan sebagainya. Di sini bukan tempatnya untuk membahas masalah kritik sumber yang sangat penting dalam penelitian sejarah. Setiap penulis dengan sendirinya sudah harus bersikap kritis dalam mempergunakan sumbernya. Yang kita persoalkan pada kesempatan ini ialah tahap terakhir, yakni tahap penulisan.

Sebelum melangkah ke tahap penulisan, sudah tentu ada beberapa hal yang telah ditentukan atau disepakai lebih dahulu. Misalnya, jenis biografi apa yang hendak ditulis (biografi lengkap, *political biography*, atau yang menyangkut segi lain seperti musik, sastra, olah raga, ilmu pengetahuan, dan sebagainya), sasaran pembaca kepada siapa biografi ini ditujukan (murid sekolah dasar, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, dan sebagainya). Tujuan penulisan biografi (sekedar sebagai dokumentasi, untuk memperkenalkan tokoh, sebagai studi kasus untuk mengenal zamannya atau untuk memahami perjuangan golongannya, dan sebagainya), dan lain-lain. Penentuan hal-hal tersebut

akan menentukan pula gaya penulisan, tingkat penyajian (*level of explanation*), dan pemilihan data.

Apabila dikatakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan (*science*) dan sekaligus juga suatu seni (*art*), maka di sinilah kita melihat ambivalensinya dengan jelas. Kalau tingkat pengumpulan data beserta kritik sumber merupakan suatu kegiatan ilmiah, maka pada tahap penulisan segi seninya mulai muncul. Data yang terhimpun bisa sama pada dua orang peneliti, dan interpretasi data mungkin juga bisa sama, akan tetapi kisah sejarah yang ditulis (dalam hal ini biografi) akan selalu berbeda apabila ditulis oleh orang yang berlainan. Sebab baik gaya penulisannya mau pun pilihan data yang terpakai dalam penulisan berbeda antara satu penulis dengan orang yang lain.

Berhubung dengan kenyataan ini agak sukar — barangkali juga tidak akan mungkin — untuk menyusun suatu metode khusus, mana yang terbaik untuk menulis biografi. Masing-masing penulis mempunyai gayanya sendiri-sendiri, dan gaya ini berkembang secara individual pada tiap penulis sesuai dengan bakat dan tingkat kemampuannya. Demikian pula cara memilih data relevan yang akan dipergunakan (data pokok, data penunjang, data yang cukup dimasukkan sebagai catatan-kaki), lagi pula cara menyusun datanya menurut urutan tertentu (yang tidak selalu harus menurut urutan kronologis), merupakan suatu "seni" tersendiri yang akan berbeda-beda pada berbagai penulis. Sebab tidaklah semua data yang dikumpulkan itu akan diperlukan untuk menulis biografi. Selalu perlu diadakan seleksi, dan seleksi ini ditentukan oleh corak, bentuk dan tujuan biografi yang telah ditetapkan lebih dahulu. Memang harus ada *exhaustiveness* (ketuntasan) dalam usaha kita mencari data, akan tetapi ketuntasan ini dilaksanakan di dalam pembatasan yang telah ditentukan lebih dahulu. Misalnya, sebuah *political biography* perlu ketuntasan dalam menghimpun data yang relevan dalam sektor politiknya.

Ada pula gaya penulisan yang menonjol-nonjolkan beberapa bagian saja, sedangkan bagian-bagian lain kurang diperhati-

kan. Penulisan semacam ini dapat disamakan dengan sebuah lukisan karikatur di mana beberapa ciri wajah seorang tokoh diperbesar. Akan tetapi cara melukis demikian memerlukan ketrampilan yang khas. Tidak semua pelukis dapat membuat karikatur yang baik sehingga kita dapat mengenal segera tokoh yang dilukis itu walaupun ciri-ciri orang itu proporsional tidak lagi sama seperti keadaan yang sebenarnya. Demikian pula dalam penulisan biografi yang karikaturistis ada kemungkinan kita tidak bisa mengenal tokohnya lagi apabila penulisnya kurang mampu.

Masalah penyajian, *level of explanation*, adalah masalah komunikasi yang juga merupakan suatu seni tersendiri. Penulis yang satu akan lebih berhasil menyampaikan pesannya dari penulis yang lain, dan keberhasilan ini disebabkan oleh tingkat kemampuannya untuk berkomunikasi. Ada penulis yang hanya bisa berkomunikasi dengan suatu kelompok tertentu saja (remaja, rekan-rekan seprofesi, kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, dan sebagainya), sedangkan ada penulis yang dapat berkomunikasi dengan segala lapisan masyarakat. Jelaslah bahwa dalam hal-hal demikian tidak dapat diberi metodenya. Sebagaimana halnya dengan berbagai ketrampilan mengandung sifat-sifat seni, setiap pelaksanaan harus memperkembangkan metode tersendiri dan menemukan bentuknya yang khusus. Dalam proses mencari bentuk ini dan proses mencoba serta menguji metode mana yang lebih baik dan sesuai, maka jalan yang terbaik — menurut hemat saya — adalah menerima dari sekian banyak karya biografi yang sudah ada. Dengan kata lain, *apprenticeship*, masa belajar sebagai magang, kita jalankan dengan membacabaca biografi sebanyak mungkin.

Syarat penting yang lain ialah masalah keakraban dengan subyek yang diteliti. apakah subyek itu berupa suatu permasalahan, peristiwa, atau seorang tokoh. Lingkungannya perlu dikenal lebih dahulu untuk dapat memahami seluk-beluk mengenai subyek bersangkutan. Kita tidak akan bisa menulis biografi yang baik mengenai, misalnya, seorang pencipta musik atau

komponis, apabila kita sama sekali tidak mempunyai latar belakang pengetahuan tentang hakekat musik dan mengenal dunia profesi seniman musik. Demikian pula biografi mengenai seorang tokoh ilmu pengetahuan tentu tidak akan berhasil baik jika penulisnya tidak belajar memahami dunia pengetahuan yang menjadi spesialisasi sang tokoh. Paling banyak penulis demikian hanya bisa mengatakan betapa "hebat" tokoh itu, tanpa bisa menerangkan makna dari pada kegiatan atau penemuan tokoh tersebut.

Tetapi dalam keakraban dengan subyek ini kita perlu juga mengambil jarak sepatutnya, karena apabila penulis terlampu terlibat dengan subyek, ada kecenderungan subyektivitas (hal yang memang tidak dapat ditiadakan seratus persen) akan lebih menonjol. Pemujaan tanpa kritik terhadap tokoh akan menjerumuskan kita pada penulisan hagiografi dengan menggambarkan sang tokoh sebagai seorang yang suci yang telah berada dalam tingkat yang bukan manusiawi lagi. Namun di pihak lain kita memerlukan pula suatu prasaan *affinity* dengan subyek, suatu hubungan yang dekat yang mau mengerti tindakan-tindakan dan langkah-langkah sang tokoh dalam perjalanan hidupnya, baik langkah-langkah yang kita menganggap salah, maupun tindakan-tindakan yang terpuji. Andaikan saya harus menulis biografi, maka saya tidak akan memilih seorang tokoh yang "asing" bagi saya, yakni asing dalam pengertian dunia perjuangan hidupnya, cara-cara berpikir dan bertindak, nilai-nilai yang dipegang serta cita-cita yang dikejarinya. Perasaan asing tersebut tentu saja dapat diatasi apabila kita mau belajar mengenal dan memahaminya, akan tetapi kemauan untuk mempelajari sudah tentu tergantung pada perasaan simpati terhadap sang tokoh yang menjadi subyek penulisan.

Sebagaimana dikatakan di atas, penulisan sejarah (termasuk biografi) tidak hanya merupakan *art* semata-mata. Segi *science* pun memainkan peranan yang sangat penting. Sebab kita tidak menulis sebuah fiksi, melainkan suatu karya yang harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setiap ungkapan yang

diketengahkan harus didasarkan atas sumber-sumber yang dapat dipercaya. Demikian pula suatu hubungan kausal yang kita letakkan antara suatu fakta atau peristiwa dengan fakta/peristiwa yang lain harus logis, sedangkan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik harus masuk akal sehingga dapat diterima oleh pembacanya.

Di samping itu penulisan karya ilmiah harus memenuhi tiga syarat penting ("syarat *abc*"), yakni harus *accurate*, *brief* dan *clear*. Profesor Johannes menterjemahkannya dalam bahasa Indonesia sebagai (dengan urutan Izin): *andak* (orief), *bayan* (clear), dan *cermat* (accurate). Uraian yang *andak* berarti uraian yang tidak bertele-tele, yakni membuang kata-kata yang mubazir dan ucapan yang berlebih-lebihan. Uraian yang *bayan* berarti uraian yang jelas dan yang dapat dimengerti, atau dengan kata lain, suatu uraian di mana pesan yang mau dikomunikasikan berhasil disampaikan. Sedangkan uraian yang *cermat* adalah uraian di mana setiap kata yang dipergunakan telah dipertimbangkan dengan matang, dan setiap data yang disajikan telah diuji keabsahannya.

Sebagai penutup, berikut ini diberi tiga contoh penulisan biografi politik untuk memperlihatkan perbedaan gaya penulisan-nya. Di sini dipilih fragmen tentang periode menjelang berakhirnya kekuasaan sang tokoh bersangkutan.

1. Mao's ebbing strength deppended upon the loyalty of the military to their dying chief. After Lin's fall, none moves Preciptiously in support of the various civilian rivals to the throne. The military chose not to force Teng Hsiao-piing upon the recalcitrant chairman after Chou En-lai's death. They allowed him to die quiently, and then they moved swiftly in support of Hua Kuo-feng against the "inner court". Mao had ruled, and then he did not rule but reigned. He had enjoyed the ultimate power to reshape he destiny of his nation and then sufferd the total frustration of pysical enfeeblement white retaining the mental cuity to see what had befallen him. This complex politi-

cian who embodied with such intensity so many conflicting qualities had undergone a full range of human experience.

(Michel Oksenberg, "The political leader" dalam *Mao Tse-tung in the scales of history*, Dick Wilson (penyunting). Cambridge University Press, 1978, halaman 116).

2. The general atmosphere in Delhi was one of gloom. Most people were convinced that in Teen Murti lay a stricken Caesar. Some suggested that the best thing Nehru could now do for India was to send the uncertainty by resigning but January 1964 it was announced that he had completely recovered but on his first visit to parliament on 10 February it was quite obvious that he had not. His left side was still paralysed and he dragged his foot. He was forced to speak sitting down and his articulation was difficult. His mind seemed as sharp as ever though there were signs after an hour or so that it was becoming blunted. Those present seemed to recognize — perhaps for the first time — that Nehru was an old and weary man. (Michael Edwardes, *Nehru, a political biography*. Pelican Books, 1973, halaman 324).
3. (sesudah 11 Maret 1966)

Though Sukarno remained as President and Prime Minister the way was now prepared, if he was not willing to accomodate himself gracefully to the new situation for his eclipse by gradual stages. He was certainly not prepared to accept a diminished aauthority on those terms and the following twelve months were, accordingly, months of growing bitterness and frustation as his power were reduced by appropriate constitutional steps, his orders ignored and his policy overturned.

(J.D. Legge, *Sukarno, a political biography*. Pelican Books, 1973, halaman 403–404).

Kepustakaan

Ankersmit, F.R.

"Het narratieve evelement in de geschiedschrijving, "*Tijdschrift voor Geschiedenis*, tahun 91, no. 2, 1978, halaman 181-213.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Pemikiran biografi, kepahlawanan dan kesejarahan. Suatu kumpulan prasaran pada berbagai lokakarya. Jakarta, 1980/1981.

Edwardes, Michael

Nehru, a political biography. Pelican Books, 1973

Johannes, HI

Gaya berbahasa keilmuan. Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 1979.

Legge, J.D.

Sukarno, a political biography. Pelican Books, 1973.

Wilson, Dick

Mao Tse-tung in the scales of history. A preliminary assessment organized by The Cina Quarterly. Cambridge University Press, 1978.

Dibagi dalam 10 bab, masing-masing menyoroti satu aspek dari Mao, yakni: The Philosopher (Benjamin I. Schwartz), The Marxist (Stuart R. Schram), The Political Leader (Michel Oksenberg), The Soldier (Jacques Guiller-maz), The Teacher (Enrica Collotti Pischel), The Economist (Christopher Howe & Kenneth R. Walker), The Patriot (Frederic Wakeman Jr), The Statesman (John Gittings), The Chinese (Wang Gungwu), The Innovator (Edward Friedman).

DINAMISASI PENCATATAN SEJARAH

Oleh : Astrid S. Susanto

Pencatatan sejarah pada umumnya dilakukan berdasarkan data dan fakta masa lalu dengan tujuan utama untuk merekamnya untuk generasi berikut. Perekaman kejadian merupakan tujuan utamanya. Hasil perekaman ini lalu disebarluaskan, kadang-kadang menjadi buku wajib untuk sekolah atau universitas, untuk dijadikan buku referensi apabila suatu kejadian tertentu secara ilmiah dibahas dan memerlukan pertanggungjawaban ilmiah pula. Sering terlupakan bahwa pencatatan kejadian telah melalui "persepsi dari perekamnya dan karenanya telah mengalami interpretasi" pula. Dengan demikian bahan referensi sebenarnya telah merupakan *data sekunder* dan bukan lagi merupakan data primer. Memang ada kalanya data primer sukar diperoleh, sehingga orang terpaksa menggunakan data sekundernya saja, sebagai sumber yang paling otentik.

Pembacaan dan pembahasan sejarah karenanya lebih berorientasi pada masa lalu, ingin menyampaikan kepada pembaca masa kini "bagaimana situasinya pada waktu kejadian sedang terjadi" (dengan menitikberatkan pada "sedang terjadi"). Pencatatan demikian memang diadakan dengan harapan agar orang mendekati kebenaran kejadian sebanyak mungkin, sehingga

ga tafsiran-tafsiran yang "salah" tidak akan terjadi. Buku yang berusaha untuk mencerminkan hal-hal demikian ialah buku catatan yang diterbitkan oleh Bismarck sendiri yang telah mengalami perubahan nama judulnya (dan mungkin pula isinya). Dalam terbitan I dari buku catatannya, Bismarck menamakan bukunya *Erinnerungen und Gedanken* (kenangan dan pemikiran), sedangkan dalam terbitan berikutnya buku tersebut diberi nama terbalik, yaitu *Gedanken und Erinnerungen*. Hanyalah seorang ahli sejarah yang jeli atau seorang yang ingin membuat doktrinya akan membandingkan kalimat-perkalimat kedua buku tersebut, yang diterbitkan oleh penulisnya dalam jangka priode yang berbeda. Leopold van Ranke seorang ahli sejarah Jerman yang terkenal telah membahas betapa perlunya penulisan dan perekaman sejarah memerhatikan unsur 1) priode pencatatannya 2) siapa pencatatnya dan 3) bagaimana visie (politik) pencatat 4) dalam kondisi sosial-ekonomi-politik apa pencatat menulis 5) budaya masyarakat yang dibahasnya, maupun budaya pribadi pencatat : apakah ia tergolong lingkungan budaya yang sama atau yang berbeda? Dari sedere nama penulis Inggris tentang sejarah yang terkenal antara lain ialah Harold Nicholson hingga zaman Romawi yaitu Tacitus yang telah mencatat berbagai keadaan masyarakat dan budaya. Harold Nicholson lebih terkenal dalam penulisan sejarah internasional dan berbagai bangsa. Spengler terkenal dengan bukunya *Untergang des Abendlandes* yang telah menganalisa berbagai kebudayaan bangsa Barat dan sampai pada kesimpulan bahwa setiap (budaya) bangsa/negara berkembang sebagai tumbuh-tumbuhan yang pertama mengenal masa berkembangnya, kemudian masa rontok dan masa mati. Arnol Toynbee juga mengadakan analisa berbagai secara mirip dengan Spengler, hanya dengan keadaan yang lebih optimistik dari pada Spengler. Pencatatan yang dilakukan oleh Tacitus lebih menjelaskan "apa adanya", tetapi sekaligus perlu diperhatikan bahwa karena ia membahas lingkungan bangsa yang berbudaya berbeda penerimaan analisa/pencatatannya perlu dilakukan dengan hati-hati. Demikian pula Cae-

sar sebagai panglima terkenal mempunyai buku catatan yang lebih sederhana dalam lebih menitikberatkan "apa adanya", tetapi kenyataan bahwa orang dahulu hanya sedikit sekali yang mempunyai kebiasaan mencatat peperangan "nun jauh di sana", telah mengakibatkan bahwa buku Caesar merupakan suatu keharusan bagi setiap anak sekolah SD di Eropa, dengan akibat bahwa untuk dapat mengerti tulisan Caesar tentang berbagai peperangan, ia harus belajar bahasa Latin (= bahasa mati tersebut).

Dari dunia Indonesia sendiri terkenal Negara Kertagama dan berbagai babad, yang selalu kita dekati dengan sangat hati-hati, yaitu menyadari adanya unsur *Dichtung und Wahrheit*. Pertanyaan yang timbul ialah : mengapa penulisan bangsa kita sendiri lebih kita dekati dengan "hati-hati", padahal tulisan orang asing tidak/ditelan begitu saja sebagai *Wahrheit*. Dalam hubungan ini perlu dipertanyakan jenis buku apa yang ingin kita terbitkan : (1) buku yang menamakan kesadaran nasional dan berbangsa terutama untuk generasi berikut ?, atau (2) buku catatan "apa adanya" untuk dipakai sebagai referensi?. Karena kedua jenis buku ini diperlukan Nama-nama yang disebut tadi: mulai dari Tacitus dan Caesar hingga ke Spengler, Tynbee dan Bismarck dan Nicholson (hanya untuk menyambut beberapa nama saja) semuanya berusaha untuk mempengaruhi pembaca, walaupun tetap dalam usaha untuk bersikap se-obyektif mungkin. Tentang Bismarck yang banyak menulis tentang dirinya, bahkan banyak sekali "reserve" harus kita pergunakan sebagai sikap kita, mengingat bahwa ia menulis tentang dirinya. Memang demikianlah halnya sikap pembaca kritis seharusnya, bila ia membaca autobiografi seorang tokoh atau jenis buku seperti Sindy Adams tentang Sukarno dengan tambahan sub-title "*as told by Sukarno himself*". Bahkan buku dari Ktut Tantri tentang *Revolt in Paradise* yang sangat membela dan merayu hati seorang pembaca Indonesia, perlu dibaca beberapa bagiannya dengan *reserve*, mengingat bahwa Ktut Tantri menulis juga tentang keterlibatan dirinya dalam revolusi tersebut. Memang

barang siapa dalam tahun-tahun revolusi berada di pedalaman ingin sekali melihat wajah Ktut Tantri tersebut dan memang banyak jasanya bagi bangsa Indonesia, tetapi bagi seorang ahli sejarah ada bagian-bagian yang akan dibaca dengan "*reserve*". Hal ini tidak berarti bahwa buku-buku seperti itu tidak diperlukan, bahkan sebaliknya: makin banyak buku populer sejarah makin baik. Dengan demikian timbullah pertanyaan berikut: jenis buku apa yang ingin ditulis dan diterbitkan oleh Proyek IDSN?

Kiranya untuk suatu proyek agak terlalu sukar untuk menerbitkan buku-buku sejarah yang berbobot "tidak luput dari kesalahan", mengingat bahwa buku sejarah selalu meminta waktu yang lama untuk diuji kebenaran dan ketepatannya. Dari berbagai penerbitan tampak pula, bahwa dokumen asli sengaja atau tidak sengaja, kurang dipergunakan. Memang jelas bahwa tugas dari proyek ini ialah untuk menunjang "popularisasi kesadaran berbangsa pada masyarakat". Proyek ini tidak bermaksud untuk menerbitkan buku ilmiah sejarah apalagi untuk tingkat perguruan tinggi. Memang masih banyak sekali kekurangan sumber-sumber sejarah yang dapat diperoleh (*available*) untuk pembaca Indonesia, apalagi pembaca yang secara ilmiah ingin mengadakan analisa lanjutan. Umpamanya dapat dikatakan: Indonesia belum memiliki buku yang secara otentik diterbitkan oleh/bersama Departemen Luar Negeri tentang rangkaian perjanjian yang telah dibuat antara RI dengan luar negeri, semenjak lahirnya Republik ini. Kita belum memiliki buku yang umpamanya membawa dokumen-dokumen perjanjian Indonesia — Belanda secara lengkap mulai dari Linggarjati, Renville hingga Konferensi Meja Bundar. Memang suatu disertasi telah dibuat oleh Dr. Anak Gede Agung, tetapi bahan tersebut tidak "*available*" untuk umum, sehingga seandainya bahan-bahan asli itu dipakai di sana, kita tidak mengetahuinya dan kita juga tidak mengetahui bagaimana analisisnya tentang perkembangan tersebut. Tetapi yang jelas ialah bahwa dokumen-dokumen sebagai yang paling asli, belum ada terbitnya. Demikian pula tentang

Irian Jaya, tentang Asia Afrika dan lain-lain, seperti juga masalah yang sekarang sangat berkembang (dalam arti negatif) masalah yang dulu dikenal dengan pengakiran dwikewarganegaraan dan lain-lain. Masalah Timor-Timur sudah perlu mulai dikumpulkan datanya dan kalau perlu pada suatu waktu yang *favourable* diterbitkan untuk dijadikan bahan ilmiah untuk masyarakat ilmu pengetahuan. Termasuk lagi banyak kejadian bangsa kita dalam 38 tahun ini, termasuk masalah ASEAN dan perkembangan awalnya yang ada atau kurang ada kaitannya dengan MAPHILINDO dan lain-lain, seperti juga tentang Konperensi Non-blok dan lain-lain. Kiranya antara Lembaga Riset Kebudayaan Nasional dan Proyek IDSN mengenai hal ini perlu diadakan pembicaraan yang memungkinkan pembagian pekerjaan sebelum penyusunan dokumen-dokumen ini makin sukar.

KE ARAH PENULISAN SEJARAH SOSIAL DAERAH

Oleh : Tauik Abdullah

I

Tak ada salahnya jika saya "mengingatkan" (mudah-mudahan kata ini tepat) kembali pada seluruh buku lama, yang terbit akhir tahun 1950-an. Buku yang saya maksud ialah tulisan W.F. Ertheim yang berjudul *Indonesian Society in Transition* (Bandung/The Hague). Dalam buku ini Wertheim mencoba menganalisa corak perkembangan berbagai sektor kehidupan sosial — ekonomi, politik, agama, kebudayaan, perburuhan — dari sudut historis-sosiologis. Dengan memakai pendekatan kedua disiplin ini ia ingin menunjukkan bagaimana dinamik masyarakat-masyarakat di Indonesia — sejak dari zaman purbakala, sampai terwujudnya negara kesatuan — bisa dimengerti. Dengan lebih dulu memisah-misahkan secara konseptual sektor-sektor ke dalam analisa yang bercorak kronologis. Dengan cara begini ia sekaligus dapat memakaikan kerangka teoritis yang telah "lebih dhulu" dimilikinya dan membuat analisa terperinci tentang masing-masing sektor. Maka tampaklah dalam sistematisasi pengaturan yang bersifat dialektis dalam menghadapi dinamik kesejarahan dan kelihatan pula pemberian keterangan (*explanation*) yang bernada neo-Weberian dalam menganalisa struktur dari periode-periode tertentu.

Tentu semua hal ini syah, *valid*, dalam penulisan ilmiah, baik dari sudut pendekatan historis, maupun sosiologis. Sejarah bukan saja harus bersifat selektif (dalam arti tidak semua harus disebut dan tak seluruhnya harus didetailkan) tetapi juga harus diterangkan. Dalam pemberian keterangan ini, bukan hanya masalah kausalitas yang bisa menarik perhatian, tetapi juga — dan sering sekali — karakter apa yang bisa dilukiskan terhadap peristiwa yang dihadapi. Maka dalam hal ini seorang ilmuwan diharuskan untuk menentukan ukuran-ukuran tertentu untuk bisa memberikan karakter itu. Inilah yang biasa disebut konseptualisasi. Ada peristiwa yang disebut "revolusi", ada pula "pemberontakan", sedangkan yang lain dikatakan "*coup d'état*", "putsch" dan bahkan bisa pula "huru-hara", "pembangkangan", dan entah apa lagi. Apa dasarnya? Selanjutnya sifat kemungkinan kesejajaran dua peristiwa perlu pula ditentukan. Apakah "peristiwa kelaparan" ada kaitannya dengan "peristiwa huru-hara"? Apakah hanya suatu-ko-insidensi, atau lebih dari itu. Kalau lebih, maka apa dasar teoretis yang bisa mengkaitkan kedua peristiwa atau fonomena itu? Dalam hal ini jika Wertheim — atau siapa saja — merasa perlu memakai alat analisa dari suatu teori tertentu, maka yang terjadi adalah hal yang wajar saja. Namun studi Wertheim — suatu yang bagi saya tetap merupakan salah satu *landmark* dalam studi tentang Indonesia — seperti telah saya singgung tadi lebih menekankan corak proses dari masing-masing sektor. Sehingga kita dipaksa untuk mengadakan sintesa sendiri, jika ingin mengerti "karakter" suatu zaman tertentu dengan mempertimbangkan interaksi dari berbagai macam sektor kehidupan itu.

Dari sudut pengerjaan ilmiah — terlepas dari kerangka teoretisnya — corak studi ini adalah yang relatif kurang sukar diselenggarakan. Tetapi, masalahnya ialah apakah corak yang seperti ini yang dimaksud dengan sejarah sosial? Ataukah studi ini barulah usaha untuk melihat proses sejarah Indonesia secara sektoral? Sebelum melanjutkan pembicaraan barangkali bisa dipakai dua ilustrasi lagi sebagai bahan perbandingan.

Dalam mengawasi berbagai masyarakat politik (atau negara, sebagai suatu kesatuan politik), salah satu hal yang menarik perhatian Barrington Moore ialah bahwa ada saatnya anggota masyarakat memperlihatkan kepatuhan kepada otoritas, tetapi ada pula kalanya mereka "berontak". Maka timbulah pertanyaan, mengapa? Secara hipotetis — artinya sepanjang pengetahuannya tentang sejarah bisa menunjukkan — artinya sepanjang pengetahuannya tentang sejarah bisa menunjukkan — ia memperkirakan bahwa hal itu bisa dikembalikan kepada konsep "ketidakadilan". Tetapi, bisalah "ketidakadilan" secara operasional dikonseptualkan? Maka Barrington Moore membagi masalahnya atas tiga kelompok, yaitu otoritas, pembagian kerja, dan distribusi barang dan jasa (yaitu perwujudan kesamaan). Ketidakwajaran dari masing-masing tiga hal ini adalah pertanda dari "ketidakadilan". Dan, jika begitu secara hipotetis dapat diperkirakan bahwa "ketidakadilan" ini akan bisa menyebabkan berbagai reaksi — mulai dari sikap apatis sampai dengan perlawanan.

Inilah kerangka teoretis awal yang dipakai. Bertolak dari kerangka ini maka Barrington Moore meninjau secara khusus sejarah gerakan buruh di Jerman selama kurang lebih satu abad (sejak 1848 ke atas). Dengan pendekatan ini maka mendapatkan jawab yang dianggapnya cukup tepat bagi masalah pokok yang diajukan. Tentu saja pemilihan : (1) sejarah pekerja, (2) di Jerman, (3) dalam periode 1848–1950-an ini bertolak pula dari suatu pertimbangan yang masak. Dalam ancang-ancang teoretisnya Barrington Moore, memang telah pula lebih dahulu mengadakan studi sejarah perbandingan.

Jadi, berangkat dari suatu pertanyaan pokok, yang semula disebutnya "*moral outrage*" ia mengadakan studi mendalam tentang salah satu sektor masyarakat yang sedang mengalami peralihan. Periode ini bukan saja adalah saat terjadinya berbagai perubahan politik yang drastis, tetapi adalah pula saat industrialisasi mulai berkembang. Ketika ini pula kapitalisme, telah

memperhatikan kelanjutannya, imperialisme seperti disebut Lenin dan Hobhouse) dan bahkan pula tantangannya (sosialisme). Ini ilustrasi pertama.

"Pada tahun 1619 tukang-tukang roti di London mengusulkan kepada pejabat yang berwewenang untuk menaikkan harga roti". Tentu saja usul ini didukung dengan perincian biaya yang keluar dan sebagainya. Meskipun tukang-tukang roti tersebut bisa menghasilkan roti setiap hari ribuan potong, tetapi usahanya masih bersifat rumah tangga.

Demikianlah awal kisah dari studi Peter Laslett tentang Inggris menjelang munculnya "zaman industri". Studi yang diberi judul romantis ini — "Dunia kita yang telah hilang — secara jelas dan hidup melukiskan situasi sosial Inggris, dengan melihatnya dari berbagai aspek kehidupan mulai dari struktur kelas sosial, tingkat kemakmuran disiplin sosial, sistem otoritas, sampai dengan perubahan-perubahan yang tengah terjadi. Dalam uraian ini, Laslett tidak saja berusaha mencernakan statistik yang kering ke dalam suatu uraian yang lebih mantap, tetapi juga mencoba menangkap perasaan-perasaan yang terpancar dari kehidupan zaman yang diteliti itu. Bagaimana suasana sosial dan suasana pribadi menghadapi peralihan ekonomi yang tengah terjadi? Memang bagi Laslett salah satu fungsi sejarah adalah memang cermin diri dilihat dalam perspektif waktu. Dengan pembagian yang bersifat waktu ini, katanya, perbandingan yang menyangkut tempat pun bisa dilakukan.

Studi Barrington Moore dan Laslett memperlihatkan dua hal yang sama. Yaitu keduanya bertolak dari suatu pertanyaan pokok (tentu saja hal ini dibimbing oleh suatu filsafat dan kesadaran sejarah tertentu) dan mencari jawab pada pendekatan pada materi sejarah. Meskipun pendekatan berbeda-beda, kedua buku ini lebih mencari jawab pada pendekatan sejarah yang bersifat struktural. Dengan kata lain, "peristiwa" atau *event* tidaklah terutama dilihat dari sudut mata-rantai peristiwa (*chain of event*), tetapi dalam kaitannya dengan lingkungan struktural.

Ketiga contoh di atas memperlihatkan corak penulisan sejarah yang berbeda-beda. Tetapi sudah bisa ditebak bahwa lain daripada *Wertheim* (yang ingin menemukan corak atau karakter dari "masyarakat Indonesia dalam peralihan" dalam suatu untaian waktu yang bermula sejak adanya sejarah) dan tak pula sama dengan Barrington Moore (yang bertolak dari suatu pertanyaan pokok yang telah dikonseptualisasikan secara ketat), Laslett lebih ingin mendapat gambaran yang jelas tentang proses dan struktur sosial tentang *zaman tertentu dan daerah tertentu*. Dengan kata lain Laslett mengajukan pertanyaan pokok relatif "terbuka" (ia bertanya bagaimana, bukan mengapa") jika dibanding dengan Barrington Moore, dan membahas daerah dan waktu yang relatif terbatas, jika dibanding dengan Wartheim. Dengan begini studi Laslett sebenarnya lebih bisa merupakan model dari suatu penulisan sejarah sosial daerah. Studinya cukup detail — tanpa harus terbawa oleh rekonstruksi peristiwa yang bersifat naratif — tanpa harus menjerumuskan diri pada rentetan peristiwa yang bersifat skematis.

Tetapi apakah sejarah sosial itu sesungguhnya? Laslett menyebut studinya sebagai *social structural history*. Wertheim dan Barrington Moore lebih merupakan sosiolog yang memakai sejarah untuk menerangkan struktur suatu masyarakat (Wertheim) atau mencari validitas dari suatu pra-anggapan teoretis (Barrington Moore).

II

Sejarah sosial adalah "Cinderella dari penulisan sejarah", kata seorang ahli sejarah. Maksudnya tentu saja, bahwa studi ini, meskipun penting (bukankah Cinderella cantik?); tetapi tidak diperlakukan secara wajar (bukankah Cinderella harus selalu bergaul dengan abu dan arang di dapur?). Hal ini tidaklah terlalu mengherankan karena asal usul sejarah tidaklah bermula dari uraian terperinci tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Sejarah dimulai dari kisah-kisah, baik yang historis bisa "dibuk-

tikan” maupun yang bersifat legendaris ataupun mithologis. Dalam kisah atau cerita itulah romantisme hari lampau ditempatkan dan dalam ini pula perbandingan hari ini dan hari lampau biasanya diadakan. Maka berbagai ucapan tentang sejarahpun disebut — mulai dari *“tebleau”* dari ketololan manusia sampai dengan “gerakan manusia dalam mencapai tingkat kemanusiaan yang tertinggi”. Dan lagi, bukankah kisah jauh lebih menarik? Bukankah pula cerita perang, revolusi, dan wabah, serta kisah tentang kelakuan para raja, presiden, dan perdana menteri jauh lebih memukau? Apakah artinya pemikiran orang kecil tentang masalah kecil jika dibanding dengan renungan pemikir besar tentang hal yang besar?

Tetapi dengan berkembangnya berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan dan makin dihadapkannya manusia dengan berbagai hal yang tanpa preseden sebelumnya maka pertanyaan haru pun muncul pula. Sementara sifat *narrative* atau kisah dari penulisan sejarah tetap merupakan salah satu sifatnya yang utama (bukankah ada yang pernah mendefinisikan penulisan sejarah sebagai *“nothing but a story?”*), pertanyaan-pertanyaan baru yang diajukan terhadap kelampauan dan harapan baru yang dihadapkan kepada ilmu sejarah menyebabkan perhatian harus diarahkan pula kepada hal-hal yang tidak bersifat *evenemental*, atau “Keperistiwaan”. Di samping pertanyaan “apa, siapa, bila, di mana”, dan yang biasanya diiringi dengan “mengapa”, maka makin muncul pula pertanyaan “bagaimana”. Tidak lagi sekedar pertanyaan yang bersifat fragmentaris, tetapi menyeluruh, holistik, yang mulai diajukan.

Dalam hal ini maka suatu fenomena tidaklah bisa dilihat sebagai hal yang terisolasi dan fenomena lainnya. “Angka-angka kependudukan”, kata Ogburn, “berarti pasar, kekuatan militer, harga tanah. Kematian berarti sakit dan ketidak berdayaan”. Jika dibalik, tentu bisa dikatakan, bagaimana mungkin kita akan bisa mengetahui fluktuasi ekonomi, kegiatan militer

dan keresahan agraris jika tidak disadari pula adanya peristiwa peristiwa kependudukan yang berada di belakangnya? Bila dilanjutkan, maka bisa pula diajukan pertanyaan, "bisakah diketahui dengan baik kelas-kelas sosial jika basis ekonomi masyarakat tidak disadari? Dan bagaimana basis ekonomi diketahui jika peranan pasar" (sebagai wakil proses produk dan distribusi moderen) dan nilai tanah (sebagai dasar status lama) tak dikenal?

Dengan ilustrasi sederhana ini, jelaslah bahwa perhatian utama dari sejarah sosial ialah bagaimana masyarakat mempertahankan dirinya, mengatur hubungan sesamanya (seperti status dan wibawa) dan bagaimana pula memecahkan masalah dalam berhadapan dengan lingkungan (alamiah ataupun sosial) dan dengan tetangga. Jadi bukanlah untaian dan tindakan-tindakan para aktor sejarah yang terlalu dipentingkan tetapi pola dari perilaku itu. Bagaimanakah kaitan perilaku — yang menghasilkan *event* yang merupakan bahan cerita sejarah itu — dengan situasi sosial yang mengitarinya? Situasi sosial yang seperti apakah menghasilkan suatu corak perilaku tertentu? Jadi sejarah sosial itu menunjukkan perhatian pada aktivitas sosial dalam kaitannya dengan perkembangan dunia sosial secara keseluruhan.

Kalau begitu hal-hal apa saja secara lebih jelas yang perlu diperhatikan? Maka dalam hal ini kategori-kategori masalah yang diuraikan oleh H.J Perkin (1969) bisa menolong. Jika masyarakat sebagai sasaran penelitian historis secara analogi bisa dianggap sebagai suatu organisme, maka yang menjadi sasaran perhatian ialah ekologi, anatomi, fisiologi, patologi dan psikologi. Tentu kata-kata ini belum berarti apa-apa selain memang istilah-istilah yang biasa dipakai dalam merangkum peristiwa organisasi tetap yang dimaksudkan ialah :

Pertama, lingkungan alamiah dari masyarakat yang diteliti. Dalam konteks sejarah Asia Tenggara, misalnya hal ini telah lama disadari dengan adanya perbedaan struktural — dan

karenanya juga corak pola perilaku historis — antara masyarakat dari "dataran rendah" dengan "pengunungan" (*palin* dan "*hill*"). Sejarah Thailand, Burma dan Indo China sama sekali tak akan bisa dimengerti tanpa kesadaran ekologis yang paling "sederhana" ini. Di tahun 1930-an Van Laur, yang memakaikan konsep-konsep sosiologis Max Weber dalam mengerti sejarah Indonesia dan Asia Tenggara telah pula memperkenalkan perbedaan antara kerajaan "maritim" dan "agraris". Demikian pula bisa dilihat "kemungkinan" adanya perbedaan antara "kota" dan "desa" — suatu perbedaan lingkungan yang bukan alami-hah, tetapi hasil dinamik kehidupan sosial. Tentu saja perbedaan ekologis memberi akibat pula pada konsep kosmologis dari masyarakat tersebut. Bagaimanakah dunia ini dilihat dan selanjutnya bagaimanakah konsep hubungan antara manusia dan alam?

Kedua, bagaimanakah masyarakat mengatur dan menyusun dirinya? Atau bagaimanakah corak struktur sosial? Apakah dasar dari pelapisan sosial? Mengapakah si A harus dianggap di atas, sedang si B "di bawah?" Berapakah besarnya penduduk dan bagaimanakah pola distribusinya? Apakah kesesuaian antara jumlah penduduk dengan sekolah yang tersedia? Dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan "struktur" ialah tidak hanya gambaran yang "data" dan "statis", tetapi suasana dalam mana individual hidup dan bergerak — mulai dari keluarga sampai ke klub tennis dan partai politik. Maka dalam hal bisa secara hipotetis, umpamanya, bisa diperkirakan, bahwa makin dalam rasa keagamaan suatu masyarakat maka makin mungkin susunan masyarakat mebanggakan hirarki spiritual itu. Dan makin hal ini didukung oleh distribusi kekuasaan dan ekonomi, maka makin bertahanlah struktur tersebut.

Ketiga, ialah bagaimana struktur itu berfungsi. Bagaimana sumber daya alam dan manusia diatur dengan baik agar masyarakat

bisa berfungsi. Sejarah sosial tidak atau menyibukkan diri dengan pertanian perdagangan atau moneter (semua ini adalah urusan ilmu ekonomi), tetapi, bisakah suatu uraian sejarah sosial tentang berfungsinya masyarakat tanpa memperhatikan hal-hal tersebut? Politik, administrasi pemerintahan pada ahli administrasi, dan perundangan pada ahli hukum, tetapi bukankah hal-hal tersebut mempunyai implikasi sosial? Bukankah hal-hal tersebut mempunyai implikasi sosial? Bukankah hal-hal tersebut bisa membuat realitas baru dalam corak hubungan sosial dan berfungsinya masyarakat? Jika begitu hal-hal tersebut harus diperhatikan.

Keempat, ialah menyangkut masalah sosial dan usaha untuk mengatasinya. Ketika Budi Utomo berdiri, misalnya, yang menjadi alasan dari kehadirannya ialah untuk mengatasi "kebodohan" dan "kemelaratan". Tentu saja kedua ini adalah hasil konseptualisasi, tetapi catatan historis juga bisa mencatat peristiwa aktual yang menghasilkan konseptualisasi itu.

Kelaparan, epidemi pecahnya keluarga, proses proletarisasi, dan sebagainya, bisa juga dikembalikan kepada kedua hal tersebut. Tentu masalah sosial ini masih bisa ditambah, tetapi jika masyarakat hanyalah tahu masalah tanpa ada usaha untuk mengatasinya, maka tak satu masyarakat pun akan bisa bertahan. Maka dengan begini perahitian tentu harus pula ditujukan kepada berbagai macam organisasi sosial dan berjenis pranata dan kelembagaan sebagai mekanisme untuk menahan dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Pranata kawin dan upacara yang mengsyahkannya tidak sekedar kaitan dua manusia dan dua keluarga tetapi juga lebih penting, pemecahan dari kemungkinan terjadinya krisis akibat tak adanya saluran yang bisa membendung dorongan-dorongan individual dalam kehidupan sosial.

Adapun organisasi sukarela — profesi, partai politik, pendidikan dan sebagainya — tidaklah sekedar untuk menyalurkan hasrat bersama, tetapi juga, dan barangkali lebih penting, berfungsi sebagai komunitas-perantara dari individu dengan ma-

syarakat luas dan bersifat *impersonal*. Bukankah organisasi ini hanya ada dalam masyarakat yang sedang telah mengajak moderen? Setidaknya begitulah kata Durkheim dan tampaknya demikian pulalah catatan sejarah menunjukkannya.

Akhirnya yang kelima ialah kenyataan bahwa masalah sosial diselesaikan atau dielakkan atau bahkan ditunda tergantung pada psikologi masyarakat tersebut. Bagaimana masyarakat beraksi terhadap masalah yang dihadapi? Maka kalau begitu berarti harus dipersoalkan kerangka dalam melihat masalah itu. Dengan kata lain, kita berhadapan dengan masalah *makna*. Dengan ucapan lain lagi, kita bertemu agar soal *nilai*. Dalam hal ini sejarah sosial terpaksa harus menjadikan sistem pemikiran, agama, sastra, mithos dan sebagainya sebagai bahan penelitian. Bagaimana semua ini bergumul dan membentuk suatu sistem nilai yang dominan dan kemudian menjadikannya sebagai alat untuk melihat dan mengerti realitasnya dan menjadi dasar dari interpretasi terhadap lingkungan yang bergerak. Atau kalau menurut mithologi yang diperkembangkan Berkhofer (*behavioral approach*), maka ahli sejarah sosial adalah "*observer*" yang mencoba menangkap interpretasi "*actor*" terhadap situasi yang mengitarinya. Interpretasi inilah yang bisa diangap sebagai dasar dari corak perilaku si aktor.

Begitulah sejarah sosial bersifat "menyeluruh" — tidak berhenti pada kisah dan proses tetapi melanjutkan pada uraian tentang struktur, tidak terpukau pada peristiwa dan tokoh besar tetapi mencoba "menangkap" hal kecil dan orang kecil tidak roman yang kualitatif, tetapi data yang bisa diperkirakan secara tepat. Tetapi apakah ini artinya kita harus mempunyai suatu *total history*, sejarah yang ideal yang merekam segala sesuatu dan memperlakukan segala sesuatu secara adil?

III

Sejarah total bukanlah yang ingin dicapai. Bukan saja hal ini pada tahap sekarang masih sangat *ideal*, bahkan *utopian*,

untuk Indonesia pun kemungkinan itu terbatas. Bagaimana pun ilmu sejarah tidaklah semata-mata tergantung pada teori, metoda dan teknik, tetapi harus pula ditunjang oleh tersedianya catatan (*records*) yang berbagai jenis itu. Tanpa ini, maka penelitian dan penulisan sejarah tak akan mungkin bisa dilakukan. Dan tersedianya catatan adalah sesuatu yang langka untuk periode-periode tertentu dan daerah-daerah tertentu di Indonesia ini.

Kalau begitu, meskipun sejarah sosial bersifat "menyeluruh", maka dalam pengerjaannya ia harus dibimbing oleh dua hal pokok. Yang pertama ialah "batas" yang jelas dari sasaran penelitian. Makin pendek kerangka *waktu*, makin mungkin bisa dikerjakan dengan baik, makin terbatas *daerah* sasaran, makin bisa diselidiki pola berbagai interaksi sosial dan alamiah, yang merupakan apa yang bisa disebut *forces in history*. Kedua, ialah seperti telah disebut di atas, adanya pertanyaan pokok yang diajukan. Usaha untuk menjawab pertanyaan pokok ini — yang tentunya selalu didampingi oleh pertanyaan-pertanyaan yang lebih bersifat operasional — sekaligus merupakan "faktor pemersatu" atau *unifying factor* dalam studi.

Manakah di antara keduanya yang lebih menentukan? Barrington Moore tentang lebih mendahulukan pertanyaan pokok — soal "ketidakadilan" — sedangkan Laslett lebih dulu menentukan daerah dan waktu — Inggris menjelang abad industri. Jadi pilihan lebih ditentukan oleh si sejarawan atau, biasa juga, oleh, si pemberi biaya. Namun sekali pilihan ditentukan, tuntutan teoritis dan metodologis akan berbeda, seperti kedua studi di atas telah memperlihatkan.

Sudah barang tentu pilihan daerah dan waktu tertentu lebih sesuai dengan kerja seorang sejarawan. Bukankah perhatian lebih tertuju kepada hal yang bersifat partikularistik dan unik? Keumuman dalam studi sejarah hanyalah muncul bila studi perbandingan telah dilakukan — waktu suatu peristiwa atau fenomena harus diberi nama dan di saat gagasan umum ingin didapat dari rekonstruksi.

Sudah barang tentu pilihan daerah adalah yang paling kritis. Dalam daerah terpautlah di dalamnya pengertian "perbatasan" — baik dari sudut geografis ataupun administratif. Jika geografis berarti kita berhadapan dengan soal ekologis, sedangkan secara administratif kita akan menghadapi kemungkinan selalu berubahnya "perbatasan" itu. Namun yang lebih sukar, tentu saja, jika perbatasan itu harus didasarkan pada konsep kultural. Kalau ini yang terjadi, maka bagaimana pun pilihan yang "arbitrer" terpaksa dilakukan —. Kesewenangan dalam pengertian bahwa suatu patokan yang telah dirumuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu harus dipakai secara konsisten. Masalahnya tentu saja disebabkan oleh kenyataan bahwa *claim* atau imbauan kultural itu hampir tak pernah menetap dan tak pula didukung oleh seluruh anggota masyarakat. Sebab itu makin jelas "daerah" sasaran penelitian, maka lebih kurang sukar pengerjaan sejarah sosial.

Demikian pula halnya dengan pilihan *waktu*. Tiada ketentuan yang pasti bisa dikemukakan terhadap hal ini. Bisa saja berdasarkan suatu anggapan hipotetis tentang adanya suatu kesatuan waktu yang merupakan suatu episode (atau episode-episode) tertentu dan dapat pula berdasarkan kesediaannya bahan-bahan. Jika yang pertama lebih ditentukan oleh pertimbangan teoritis, maka yang kedua lebih bersifat praktis.

Masalah "perbatasan" (daerah) dan "penggalan" (waktu) *boundaries* dan *limits* ini sangat penting, karena dalam realitas yang sesungguhnya hal-hal tersebut kabur. Dinamik sosial tak mudah dibatasi oleh batas-batas alamiah, apalagi politis-administratif. Dan keberlakuan sesuatu sikap atau nilai tak pula dihabiskan pada suatu tanggal, bulan atau bahkan tahun tertentu. Justru karena kaburnya "perbatasan" dan "penggalan" dalam realitas ini maka suatu ketegasan dalam pilihan diperlukan. Dengan begini *daerah* dan *waktu* yang telah dipilih akan mendapat sorotan yang lebih tajam sedangkan yang sekitar hanyalah disinari sekedarnya sepanjang hal-hal itu langsung berkaitan dengan sasaran pokok. Kalau begitu, maka sekali lagi adanya

suatu *unifying factor* kembali merupakan suatu keharusan.

Tentu harus pula dicatat bahwa yang disebut *unifying factor* itu bukan saja berarti thema pokok, yang mencari kaitan berbagai sektor dalam dinamik sosial, tetapi bisa pula berarti pilihan atas atau sektor sentral. Namun sektor sentral ini hanyalah pula dilihat secara kontekstual — ia harus dilihat dalam kaitan dengan yang lalu.

IV

Sejarah sosial yang mendalam biasanya lebih bersifat sejarah lokal — sejarah sosial adalah pendekatannya, sejarah lokal adalah sasarannya. Tetapi hubungan keduanya telah pernah saya bicarakan dalam dua tulisan terdahulu (*Sejarah Lokal di Indonesia* dan *Beberapa Aspek Penelitian Sejarah Lokal*). Yang disampaikan dalam makalah ini lebih merupakan tambahan dan lanjutan saja dari hal-hal yang telah dibicarakan.

MENULIS BIOGRAFI TOKOH

Oleh : Suwadi Sjafei

Tulisan ini hanyalah sekedar merupakan pokok-pokok pikiran pembimbing untuk memberi batasan-batasan pengertian kita dalam melakukan penelitian dan penulisan biografi tokoh nasional di Indonesia. Mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya bagi mereka yang ingin akan melakukan penelitian dan penulisan peranan seorang tokoh nasional di Indonesia. Biografi seorang tokoh rupa-rupanya dulu lebih digemari dari pada sejarah sosial politik, sejarah ekonomi ataupun sejarah budaya, meskipun sebenarnya di antara semuanya itu saling kait-mengkait atau saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Hal ini mungkin disebabkan karena penghargaan terhadap prestasi seorang dianggap amat penting, masyarakat pada waktu itu percaya kepada peranan individu.

Menulis biografi itu tidak mudah. Menulis biografi sama saja dengan menulis sejarah. Ia harus memulai dengan penelitian untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berasal dari sumber seotentik mungkin, untuk kemudian mengolahnya dan merangkai fakta-fakta yang berdiri sendiri-sendiri itu menjadi sebuah kisah sejarah. Dalam hal biografi ialah kisah sejarah seseorang. Biografi ialah "*the account of and actual life*" atau dapat disebut se-

bagai kisah hidup seseorang yang benar-benar terjadi, yang meliputi segenap ikhlaw mengenai diri seseorang itu di dalam lingkungan hidupnya. Oleh karena itu penulis biografi harus benar-benar jujur terhadap obyek yang ditulisnya, penulis biografi harus dapat menghadapkan dirinya lurus-lurus terhadap obyeknya. Untuk apa menulis biografi? Jawabnya sama dengan jawab untuk pertanyaan, untuk apa menulis sejarah?" Menjawab pertanyaan ini sama saja dengan menguraikan apa guna sejarah dalam kehidupan masyarakat masa kini. Betapa penting sesungguhnya nilai sejarah itu bagi kehidupan masyarakat sekarang, saya kira semua orang sudah mengetahui. Nilai sejarah adalah mendidik. Sejarah dapat mendidik jiwa manusia dengan membawanya kepada renungan masa lampau. Yang menjadi tema tertinggi dalam sejarah dan yang menjadi pelajaran luhur dari masa lampau itu bukanlah evolusi manusianya, melainkan hasil yang telah dicapai oleh manusia itu. (G.M. Travelyan, 1957: 223). Ada sarjana sejarah mengatakan bahwa guna sejarah bagi manusia kini adalah untuk mengenal dirinya sendiri. Mengetahui dirinya sendiri berarti mengetahui apa yang harus dilakukan. Pada umumnya orang tidak tahu apa yang harus dilakukan sebelum ia mencobanya, maka dari itu satu-satunya petunjuk mengetahui apa yang dapat dan harus dilakukan ialah dengan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu nilai sejarah terletak pada kenyataan bahwa ia mengajarkan kepada kita apa yang telah dilakukan oleh manusia dan dengan itu maka ia tahu apa sesungguhnya manusia itu. (*Collingwood*, 1961 : 205).

Kalau kita melihat judul sebuah buku biografi seseorang tokoh, maka kita mengharapkan akan dapat membaca secara jelas dan mudah untuk mengerti mengapa seseorang itu akhirnya menjadi tokoh yang diakui oleh masyarakat sebagai tokoh nasional. Dari buku biografi tersebut diharapkan adanya contoh-contoh sikap dan perilaku dari tokoh yang diriwayatkan di dalam buku biografi itu, yang dapat dijadikan suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekarang. Misalnya, sikap kepe-

mimpinannya dari tokoh itu, keterbukaannya, kreativitasnya, kewibawaannya, kebijaksanaannya, keberaniannya untuk mau was diri, sikapnya yang wajar, tegas dan jujur, berjiwa besar, berani dan mampu mengatasi berbagai kesulitan dan juga penuh pengabdian kepada tugas. Dengan demikian tujuan kita membaca biografi ialah untuk mendapatkan pengetahuan tentang peri kehidupan seorang tokoh, mendapatkan contoh teladan bagi hidup kita sekarang, dan di samping itu juga untuk memperoleh kesenangan membaca.

Dari hal-hal seperti yang diaharapkan dari biografi tersebut, kalau begitu penulis biografi seorang tokoh, diperlukan syarat-syarat yang antara lain, ialah :

1. penulis biografi dituntut mampu menghidupkan kembali tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman dari seorang tokoh yang dibuat biografinya melalui kemampuan bahasanya.
2. penulis biografi harus mampu menempatkan tokohnya itu dalam kerangka sejarah.

Menulis biografi memang perlu juga menonjolkan kelebihan atau pun keunikan dari seorang tokoh yang sedang disoroti, sehingga dapat menimbulkan rasa kagum bagi pembaca biografi. Pelukisan watak adalah suatu hal yang penting dalam biografi. Terutama penting untuk menempatkan peranan tokoh yang sedang ditulis itu dalam konteks sejarah. Penting untuk diperhatikan ialah bahwa hidup seseorang itu selalu ada hubungannya dengan zamannya. Harus disadari bahwa hidup seseorang itu terjalin erat ke dalam banyak riwayat hidup orang lain. Karena sudah menjadi kodratnya bahwa manusia sebagai makhluk pribadi, ia sekaligus adalah makhluk sosial. Seseorang hanya mempunyai arti dalam kaitannya dengan manusia lain di dalam masyarakat. Tanpa ada manusia lainnya atau tanpa hidup bermasyarakat, seseorang tidak akan dapat berbuat apa-apa. Faktor-faktor kodrat manusia yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang harus diperhatikan dan diketahui benar-benar oleh penu-

lis biografi. Ini berarti bahwa penulis biografi harus dapat menempatkan tokoh yang disoroti dan ditulis itu di dalam kerangka sosial, politik, budaya ataupun ekonomi. Bukan untuk mengkisahkan suatu riwayat yang terpencil, yang hanya melihat jaman dari tokoh itu melalui kaca mata tokoh itu sendiri, sehingga terlalu menjadikan tokoh itu pusat kegiatan. Penulis yang demikian itu memiliki egosentrisme yang terlalu besar. Biografi semacam ini tidak lebih dari suatu mitologi mengenai seseorang tokoh. Jadi jangan sampai penulis biografi itu melukiskan seolah-olah seseorang itu sejak lahir sudah diberi nasib untuk kelak menjadi tokoh nasional. Jangan sampai diada-adakan atau dipaksakan pada unsur-unsur dari kehidupannya itu. Hendaknya kita menulis biografi seorang tokoh jangan sebagai mitos atau pun sebagai cerita peri perahyangan, tetapi kita melukiskannya setelah mengadakan penelitian dan pengolahan sumber-sumber data secara cermat.

Apa sebenarnya tokoh itu? Secara umum tokoh ialah seseorang yang memiliki kelebihan atau keunikan dalam kehidupannya di dalam meningkatkan dan mengembangkan kehidupan masyarakat. Tokoh Nasional Indonesia ialah seorang yang amat berjasa baik dalam bidang politik, ketatanegaraan, sosial, ekonomi, kebudayaan ataupun dalam bidang ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Adapun kriteria tokoh nasional menurut Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional ialah tokoh-tokoh yang memenuhi ketentuan seperti tertuang di dalam Surat Keputusan Presiden dan Menteri P dan K. Dalam pengertian yang khusus di sini ialah tokoh yang masih perlu diselidiki dan diusahakan prosedur formalnya.

Penelitian dan penulisan biografi tokoh Nasional ini menggunakan dasar berfikir fungsional. Artinya, diusahakan penyajian dalam suatu sistem kehidupan yang utuh, dengan memperhatikan aspek-aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya

dari tokoh yang bersangkutan di dalam konteks kehidupannya di dalam masyarakat. Penyajian aspek-aspek kehidupan dalam konteks kemasyarakatan itu diharapkan seimbang, sehingga akan tercipta suatu uraian yang mencerminkan nilai-nilai moral, edukatif dan cita-cita atau pikiran untuk menjangkau masa depan yang lebih baik dalam rangka melaksanakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Langkah-langkah penulisan

Para penulis biografi tentu saja harus memiliki latar belakang bacaan dan pengalaman yang luas, artinya menyediakan waktu yang cukup banyak untuk membaca dan melakukan pengamatan yang teliti mengenai berbagai segi kehidupan masyarakat. Bekerja di perpustakaan untuk membaca karya biografi lain yang sezaman sebagai bahan bandingan. Ini adalah merupakan permulaan dari pengamatan sebelum mulai dengan penulisan.

Langkah berikutnya mencoba mulai dengan membuat skets biografi sebagai kerangka penulisan, dimulai dari data kelahiran sampai kepada kematian dari tokoh yang akan ditulis. Kerangka penulisan itu biasanya dalam biografi disusun dalam susunan sub-sub judul sebagai berikut :

1. Asal-usul keluarga dan masa kecil. (dapat juga dikemukakan keadaan alam dan lingkungan hidup keluarga itu).
2. Masa sekolah dan menginjak remaja.
3. Masa dewasa dan menghadapi tantangan hidupnya.
4. Perjalanan karir dan memebentuk rumah tangga.
5. Keberhasilan dan atau kegagalan dalam kedudukan.
6. Masa-masa menjelang kematian.
7. Catatan-catatan.
8. Daftar kepustakaan sumber

Tentu saja pembagian sub judul tersebut di atas hanya sekedar contoh. Banyak atau sedikitnya sub-sub judul disesuaikan dengan bahan sumber yang dipakai dan juga pandangan

penulis sendiri dengan obyek tokoh yang ditulisnya. Kalau tokoh tersebut merupakan tokoh intelektual yang banyak meninggalkan karya tulisnya, maka bahan-bahan tertulis yang mana saja yang dapat dikumpulkan. Sebaliknya apabila tokoh itu tidak menulis, maka untuk menyusun data-data hidupnya diperlukan ketrampilan khusus dari penulis biografinya. Penulis harus menjalankan wawancara yang intensif. Artinya ia harus memilih dan menetapkan orang-orang yang dekat atau sezaman, sanak keluarga, kawan atau pun lawan untuk diwawancarai.

Langkah berikutnya ialah mulai pekerjaan menulis, penulis mengarahkan penanya sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan pada tahap awal. Di sinilah diperlukan kemampuan berimajinasi, dan kemampuan menyusun kalimat yang baik dan benar, penggunaan bahasa yang lugas dan tidak terlalu panjang kalimatnya, akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Usahakan dalam penulisan biografi ini dengan kalimat sesingkat mungkin tanpa mengurangi kejernihannya. Tentu saja bukan bahasa lisan yang dituangkan dalam tulisan, karena keduanya itu berlainan. Hindarkan penggunaan bahasa yang berbelit-belit sehingga seolah-olah kita hidup pada zaman dahulu kala ketika orang berbicara secara kias-mengias sehingga akhirnya orang tidak mengerti apa yang dimaksud.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL MELALUI PROSES PEMBINAAN BUDAYA BANGSA

Oleh : S. Budhisantoso

Pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dapat diibaratkan sebagai suatu usaha pembinaan suatu sistem. Hidup matinya suatu sistem tergantung dari pada kelengkapan (unsur-unsurnya) serta komponen pendukungnya. Dalam hal kebudayaan sebagai keseluruhan perwujudan tanggapan manusia terhadap lingkungan dalam arti luas merupakan suatu sistem yang utuh dan menyeluruh (*integrated whole*) dan terdiri unsur-unsur yang saling mengisi. Untuk mempermudah pembicaraan, kita gunakan salah satu pegangan oprasional bahwa perwujudan dan pernyataan (*manifestation and expression*) of culture itu nampak dalam 7 kultural universal (lihat Koentjaraningrat, 19).

Tiada masyarakat yang hidup di dunia ini dengan kebudayaan yang tidak utuh elements atau unsur-unsurnya yang universal itu. Masyarakat yang dikatakan "primitif" sekalipun mempunyai unsur kesenian walaupun kesenian itu biasa dianggap sebagai hal yang mahal dan bersifat mewah. Kalu suatu masyarakat tidak mempunyai kesenian atau sistem pengungkap-

an rasa keindahan, maka ia tidak akan bertahan lama, karena tiada rangsangan jiwa untuk hidup lebih lama didunia yang penuh tantangan. Setiap orang memerlukan selingan bagi kehidupan sehari-hari (*monotonous day to day life*).

Mengenai komponen, setiap sistem harus mempunyai komponen. Dalam hal ini kebudayaan sebagai sistem (*cultural system*) yaitu perangkat model-model tindakan hanya hidup selama ada komponen pendukung atau pemangku yaitu manusia yang setiap kali mati dan perlu peremajaan. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan kebudayaan tidak lepas dari pembinaan manusia-manusia pendukungnya.

Enkulturasasi dan Pembinaan Serta Pengembangan Nasional

Pembinaan komponen pendukung sistem kebudayaan itu biasa dikenal sebagai kegiatan enkulturasasi atau pembudayaan yang berlangsung sepanjang hidup. Banyak wadah, media dan kegiatan enkulturasasi yang berkembang dalam setiap masyarakat. Perwujudan wadah, sarana dan kegiatan itu beraneka ragam sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan fisik yang ada.

Sesungguhnya dengan ataupun tanpa usaha nyata dari pemerintah, setiap masyarakat akan menyelenggarakan pembinaan budaya warganya yang sekaligus melaksanakan usaha pelestarian kebudayaan yang mendominasi pola tingkah laku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akan halnya pembinaan dan pengembangan kebudayaan di Indonesia diperlukan usaha dan pengarahannya yang mantap mengingat berbagai masalah sosial budaya yang ada seperti :

1. *Masalah Masyarakat Majemuk* . Sebagaimana kita ketahui penduduk Indonesia yang tersebar di Kepulauan Nusantara yang terpisah-pisah oleh karena letak geografisnya telah membentuk kelompok-kelompok sosial yang masing-masing mengembangkan kebudayaan setempat. Walaupun kalau dikaji yang sungguh-sungguh keanekaan kebudayaan yang

dikembangkan oleh suku-suku bangsa ataupun kelompok sosial itu mempunyai kesamaan dasar, namun untuk menjamin efektifitas pergaulan lintas suku/kelompok sosial diperlukan kerangka acuan sebagai pedoman yang memadai. Atas dasar kenyataan itulah, sejak awal pembentukan negara kita, para pendiri negara kita ini terlalu menyatakan akan arti pentingnya memajukan kebudayaan bangsa (nasional) sebagai kerangka acuan bagi pola tingkah laku sosial yang bersifat nasional.

Sungguhpun demikian, tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan atau melupakan kebudayaan suku-bangsa ataupun kebudayaan daerah yang justru menjadi akar atau sumber kebudayaan nasional. Dalam penjelasan pasal 32 dikatakan: "kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia sebagai kebudayaan bangsa".

Bunyi penjelasan itu berarti bahwa dalam usaha memajukan kebudayaan nasional hendaknya jangan terlepas dari sumbernya yang justru akan memberikan warna atau kepribadian kebudayaan yang kita kembangkan. Dalam kenyataan kita sekarang hidup dengan aneka ragam kebudayaan suku bangsa maupun kebudayaan lokal (daerah) yang berfungsi sebagai kerangka acuan pada lingkungan sosial tertentu. Sedang kebudayaan bangsa yang bersifat nasional masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangannya.

Mengingat bahwa kebudayaan bangsa itu merupakan hasil usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya, maka cepat lambatnya pertumbuhan tergantung pada keaktifan serta segenap warga negara Indonesia.

2. *Masalah Pembangunan.* Kita artikan sebagai usaha ke arah peningkatan kesejahteraan penduduk di segala sektor kehidupannya. Dalam prosesnya, usaha itu mendorong kita untuk mengambil alih teknologi dan ilmu pengetahuan

guna mempercepat proses. Pengambilalihan teknologi dan ilmu pengetahuan yang kita perlukan itu pada gilirannya akan menuntut penyesuaian sosial budaya dalam proses penyerapannya. Teknologi dan ilmu pengetahuannya yang berkembang atas dasar nilai serta gagasan tertentu itu belum tentu sesuai dengan nilai-nilai dan gagasan utama yang selama ini mendominasi kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu besar kemungkinan pembangunan itu akan menggeser nilai-nilai dan gagasan utama yang selama ini mendominasi kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu besar kemungkinan pembangunan itu akan menggeser nilai-nilai baru ataupun menggantikannya dengan nilai-nilai dan gagasan yang mendominasi teknologi dan ilmu pengetahuan yang mereka ambil alih. Dengan demikian pembangunan yang dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan itu dapat diartikan merupakan proses pembaharuan kebudayaan.

Seandainya proses pembaharuan itu berjalan secara alamiah maka tidak banyak persoalan yang kita hadapi karena kebudayaan itu bersifat dinamis, selalu berkembang mengikuti kemajuan masyarakat yang mendukungnya. Akan tetapi proses pembaharuan yang disebabkan oleh pembangunan yang biasanya dilaksanakan dalam tempo yang relatif singkat dan mencakup segala sektor kehidupan itu akan menimbulkan berbagai ketegangan karena adanya "lag" atau kesenjangan yang terjadi dalam proses adopsi unsur-unsur kebudayaan asing.

Kini kita dapat merasakan betapa ketegangan dan keresahan sosial mulai tampak memenuhi berita-berita di surat-surat kabar. Berbagai bentuk keresahan, kejahatan dan kenakalan anak-anak seolah-olah menjadi hiasan keberhasilan pembangunan. Kesemuanya itu merupakan petunjuk timbulnya berbagai kesenjangan dalam pranata sosial

yang mengatur ketertiban pergaulan. Dari kesemuanya itu harus diatasi terutama dengan pengembangan kebudayaan atau kompleks nilai dan gagasan yang memadai pedoman bagi tingkah laku sosial.

3. *Masalah Kontak Kebudayaan Asing* . Merupakan budaya yang tidak dapat kita hindarkan dalam pergaulan antar bangsa di zaman moderen ini. Kemajuan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan transportasi, telah memperlancar kontak-kontak kebudayaan antar bangsa. Interaksi sosial, tukar-menukar pengalaman, pengetahuan dan gagasan dagang mudah dilakukan setiap orang tanpa mengenal batas lingkungan geografi, politik maupun kebudayaan, baik secara langsung maupun melalui berbagai perantara. Akibatnya pengaruh kebudayaan asing bukan suatu hal yang mustahil, apalagi kalau diingat bahwa kebutuhan hidup sebagai akibat pembangunan ataupun kontak-kontak antar kebudayaan itu akan cenderung meningkat baik dalam jumlah maupun ragamnya. Semakin hari semakin banyak ragam kebutuhan yang tidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat sendiri karena pembagian kerja yang semakin tajam dari lingkungan masyarakat lain, bahkan dalam proses pembangunan yang sedang diselenggarakan di Indonesia kita terpaksa harus membina kontak-kontak dengan kebudayaan asing melalui kerja sama teknologi dan ilmu pengetahuan yang sifatnya mendasar.

Sesungguhnya sebagaimana halnya dengan kecenderungan kebudayaan untuk selalu berkembang, kontak-kontak kebudayaan itu merupakan hal yang alamiah. Artinya baik melalui hubungan damai seperti tukar-menukar misi kebudayaan atau perdagangan, kontak-kontak kebudayaan juga dapat terjadi melalui peperangan. Melalui kontak-kontak kebudayaan itu biasanya kebudayaan berkembang dengan lebih pesat, karena ia tidak hanya mengandalkan pada *internal forces* ke arah pembaharuan, melain-

kan juga pada *external forces* lewat kontak-kontak langsung maupun difusi.

Apa yang jadi masalah kita sekarang ialah derasnya arus pengaruh kebudayaan asing sebagai akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kebutuhan yang timbul sebagai akibat pembangunan. Derasnya arus pengaruh kebudayaan asing yang melanda negara kita itu menyebabkan daya seleksi/filtering penduduk lemah. Mereka tidak/kurang mampu memilih unsur-unsur kebudayaan asing mana yang benar-benar diperlukan dan sesuai dengan nilai-nilai serta gagasan utama yang ada. Dengan mengadopsi unsur-unsur kebudayaan asing yang kurang terarah itu dapat mengakibatkan tersisihnya nilai-nilai dan gagasan utama yang selama ini mendominasi pola tingkah laku penduduk dan akhirnya akan memperlemah kepribadian dan semangat kebangsaan.

4. *Masalah Pertambahan Penduduk.* Menimbulkan berbagai pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa. Selain diperlukan penambahan sarana dan prasarana fisik yang diperlukan untuk menampung pertumbuhan penduduk pola-pola interaksi yang menyangkut sistem sosial maupun sistem nilai dapat terpengaruhi oleh karena proses penyesuaian sosial anggota masyarakat terhadap situasi dan kondisi yang ada. Orang-orang tidak sekedar harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kebudayaan, melainkan mereka juga harus mengembangkan cara-cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Dengan demikian diperlukan pengembangan sistem sosial yang memadai dan bahkan pergeseran dan perluasan sistem nilai yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dengan segala kemampuannya memajukan kebudayaan bangsa dengan melalui kegiatan enkulturasi yaitu menanamkan pengetahuan tentang

nilai-nilai dan gagasan utama menjadi kerangka acuan nasional agar dengan demikian setiap warga negara bukan hanya akan mampu memainkan peranan sosial dengan kedudukan mereka dalam masyarakat, akan tetapi juga secara aktif ikut melestarikan dan bahkan ikut mengembangkan ke arah peradaban.

Atas dasar masalah-masalah kebudayaan yang kita hadapi, maka perlu segera diambil kebijaksanaan guna menanggulangi perlunya kerangka acuan yang bersifat nasional, meningkatkan kemampuan penduduk dalam proses pembaharuan kebudayaan serta membina ketahanan nasional di bidang budaya. Untuk itu maka perlu segera mempergiat dan mengintensifkan penanaman sikap dan ketrampilan pada anggota masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan gagasan utama yang telah ada sebagai bekal agar mereka mampu secara selektif menyerap unsur-unsur kebudayaan asing demi peningkatan kesejahteraan bersama menuju ke arah peradaban.

Arti pentingnya kegiatan enkulturasi di Indonesia semakin besar mengingat kenyataan bahwa masyarakat kita merupakan masyarakat majemuk (*plural society*) dengan aneka ragam latar belakang kebudayaan. Tidaklah mudah bagi seseorang untuk bergaul secara efektif dengan anggota masyarakat Indonesia dari suku bangsa yang berlainan, mengingat latar belakang kebudayaan yang berbeda, sementara kebudayaan nasional sebagai kerangka acuan (*frame of reference*) yang utuh belum sepenuhnya berkembang. Pergaulan antar suku menimbulkan berbagai masalah terselubung, baik karena perasaan kesukubangsaan (*ethnocentric*) maupun karena belum ditemukannya kerangka acuan yang memadai bagi semua pihak. Oleh karena itu penanaman nilai-nilai dan gagasan utama pada anggota masyarakat di lingkungan rumah tangga merupakan modal yang amat berharga sebelum seseorang dilepas ke dalam pergaulan masyarakat yang lebih luas tanpa pegangan. Dalam proses sosialisasi di lingkungan keluarga secara informal inilah peranan orang tua terutama kaum ibu menjadi amat penting. Melalui anak-anak

mereka itulah nilai-nilai budaya dan gagasan utama yang menjadi inti jiwa perwujudan kebudayaan di Indonesia ditawarkan dalam pergaulan antar suku untuk mengembangkan kebudayaan nasional yang tangguh.

Pendidikan dalam arti luas, yaitu menanamkan sikap dan ketrampilan pada anggota masyarakat agar mereka itu nantinya mampu memainkan peranan sesuai dengan kedudukan sosial masing-masing dalam masyarakat, merupakan kegiatan yang secara tidak langsung juga merupakan usaha melestarikan kebudayaan. Sikap dan ketrampilan yang ditanamkan kepada anggota masyarakat melalui berbagai bentuk pendidikan itu disesuaikan dengan nilai-nilai dan gagasan utama yang berlaku sosial secara efektif sesuai dengan kerangka model-model pemahaman, penilaian, perencanaan dan tindakan.

Proses enkulturasi atau biasa juga disebut proses sosialisasi itu juga bisa diselenggarakan melalui bangku sekolah, atau pendidikan formal. Akan tetapi proses pendidikan formal bagi kebudayaan di negara yang sedang berkembang merupakan kebiasaan yang baru, dan lebih banyak dipergunakan untuk menanamkan sikap dan ketrampilan yang diperlukan untuk tujuan tertentu dan terbatas ruang lingkupnya.

Di negara-negara moderen dari mana sistem pendidikan formal kita ambil alih, mulai dirasakan betapa banyak hal diperlukan dalam kehidupan sosial seseorang tidak mungkin diperoleh di bangku sekolah. Salah satu contoh yang konkrit ialah tidak adanya mata pelajaran di sekolah yang mengajarkan tentang kekerabatan dan istilah kekerabatan agar anak-anak itu tahu sopan-santun atau mampu bersikap dan trampil dalam pergaulan antar anggota keluarga. Demikian pula tidak ada mata pelajaran yang mengajarkan sopan-santun pergaulan sosial secara luas antar anggota masyarakat. Oleh karena itu dirasa perlu adanya wadah ataupun perkumpulan yang memungkinkan anak-anak melakukan latihan untuk bersikap dan membina ketrampilan sosial dalam bentuk pendidikan non formal.

Di Indonesia kita sekarang mempunyai berbagai wadah dan kegiatan di mana anak-anak bisa memperoleh pendidikan non-formal seperti kepramukaan, karang taruna dan lain-lain perkumpulan itu hanya menampung anggota masyarakat yang kebetulan mempunyai persamaan minat dan kebutuhan yang terbatas dan menjurus sifatnya. Kita kenal perkumpulan bulu tangkis, perkumpulan pecinta alam, perkumpulan kedaerahan (suku bangsa), perkumpulan kelompok usia maupun agama. Sementara itu walaupun ada perkumpulan yang agak umum sifatnya, tentunya tidak akan dapat memenuhi kebutuhan anggota akan pembinaan kemampuan bertindak sosial secara memadai.

Apa yang nampaknya sangat penting dalam proses enkulturasi, terutama di negara yang sedang berkembang ialah pendidikan formal yang berlangsung sepanjang hidup manusia baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial yang lebih luas. Mengingat bahwa anak manusia itu memerlukan perawatan dan bimbingan sampai dianggap mampu untuk berdikari secara jasmaniah maupun rohaniah, maka pendidikan informal di lingkungan keluarga dan kehidupan masyarakat yang lebih luas menjadi amat penting artinya sebelum seseorang dilepas pada pergaulan sosial yang bersifat nasional dalam masyarakat majemuk.

Harapan dan Kenyataan

Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam mengemban misinya lebih mengutamakan pendidikan non-formal, terutama yang berlangsung dalam kehidupan keluarga dan masyarakat luas.

Dari hasil pengamatan sementara kegiatan enkulturasi atau pendidikan kebudayaan di lingkungan keluarga pada akhir-akhir ini nampak mulai kabur; orang tua tidak lagi seketat pendahulu mereka dalam menanamkan pengetahuan kebudayaan pada generasi muda atau keturunannya.

Satu dan lain hal karena kesibukan atau karena mereka sendiri mulai ragu-ragu tentang manfaat atau kegunaan penge-

tahuan kebudayaan (nilai-nilai, gagasan dan keyakinan) sebagai pedoman bagi pola tingkah laku masyarakat yang sedang mengalami transisi. Mungkin juga karena mereka kurang memahami bahkan sulit untuk menghayati nilai-nilai, gagasan dan keyakinan yang selama ini mereka serap melalui generasi terdahulu. Demikian pula keadaan masyarakat yang sedang berkembang yang sedang mencari-cari pegangan dalam menghadapi berbagai tantangan baru baik yang timbul dari lingkungan maupun sejarah. Keadaan masyarakat sedemikian itu sangat tidak menguntungkan bagi pembinaan budaya anggota masyarakat khususnya generasi muda yang diharapkan akan menggantikan kedudukan dan memainkan peranan pendahulu mereka sebagai komponen suatu sistem kebudayaan.

Dalam hati kecil setiap warganegara Indonesia kita selalu dihantui oleh pernyataan adakah keluarga masih mampu melaksanakan tugas dan fungsi sucinya membina anak-anak dan mempersiapkan mereka sebagai pemangku kebudayaan di masa mendatang. Banyak di antara kesatuan sosial terkecil akan tetapi terpenting dalam masyarakat kita itu kini sekedar berfungsi sebagai ikatan yang syah untuk berkembang biak dan kadang-kadang juga sekedar membentuk kerjasama ekonomi. Sementara itu dalam hal pendidikan anak-anak diserahkan pada lembaga pendidikan formal atau paling-paling diserahkan pada pembantu karena kesibukan suami-istri yang bersangkutan. Kalaupun ada keluarga yang memperhatikan pendidikan kebudayaan anak-anak, seringkali orang tua itu sendiri kurang menguasai nilai-nilai, gagasan serta keyakinan mana yang akan ditanamkan pada anak-anak. Di antara banyak contoh yang dapat dikemukakan di sini ialah soal penghormatan terhadap orang tua (senior) yang mulai bergeser sebagai akibat menyempitnya orientasi keluarga ke arah nuklirisasi (*nuclear family oriented*).

Wadah kegiatan enkulturasi yang nampaknya mulai memudar ialah berbagai bentuk upacara tradisional yang semula merupakan salah satu kegiatan simbolis untuk menanamkan

dan mengukuhkan nilai-nilai budaya pada anggota masyarakat, kini tinggal sisa-sisanya (*survival*) yang dikenal orang. Sifat edukatifnya telah menghilang dan apa yang tertinggal ialah sifat *show businessnya*. Demikian pula berbagai wadah-wadah kegiatan pendidikan non-formal telah hilang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Mengenai sarana, pada umumnya juga mengalami pergeseran dan bahkan ada yang menghilang, antara lain peer group-larangan, yang berlatih ketrampilan sambil bekerja di tempat-tempat pengembalaan. Pertunjukan tradisional sebagai media penyebarluasan pesan-pesan kebudayaan sudah bergeser fungsinya sekedar sebagai hiburan atau pengisi waktu luang. Dongeng-dongeng rakyat mulai dilupakan orang bahkan tradisi mendongeng menjelang tidur telah digantikan *audio visual products* yang diimpor bersama nilai-nilai, gagasan dan keyakinan asing.

Mengenai kegiatan enkulturasi sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat telah bergeser dari bentuk pendidikan non formal cenderung bertemu pada pendidikan formal. Tanpa mengurangi arti pentingnya pendidikan formal yang menanamkan sikap dan ketrampilanpraktis dalam proses adaptasi di masa kini, walaupun nyatanya masih banyak keluhan akan kurang trampilnya lulusan sekolah dewasa ini, pendidikan itu memang tidak dimaksud ntuk mengambil alih keseluruhan kegiatan enkulturasi yang semula ditangani lewat keluarga dan masyarakat luas.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut serta kenyataan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan tanggapan manusia terhadap lingkungannya dalam arti luas, maka pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional harus memberikan kesempatan sebanyak mungkin agar setiap anggota masyarakat mampu mengembangkan prakarsa kearah pembaharuan sesuai dengan pilihan hidupnya.

Mengenai penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi segenap anggota masyarakat mengembangkan kreativitas inovatif dalam menanggapi lingkungan dalam arti luas, itu merupakan tugas dan kewajiban masyarakat bersama. Apa yang perlu dan dapat kita lakukan sebagai salah satu organ pemerintah ialah menyediakan data dan informasi tentang kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagai bahan yang diperlukan untuk menyusun kebijaksanaan.

Disamping itu kita berkewajiban untuk merangsang kegiatan pembinaan budaya di lingkungan keluarga dan masyarakat luas dengan pengadaan data dan informasi tentang kebudayaan yang diperlukan oleh setiap anggota masyarakat sebagai perorangan maupun kolektif sebagai pendukung kebudayaan yang aktif. Ini berarti bahwa data dan informasi yang dikumpulkan selain harus memberikan gambaran yang benar juga harus komunikatif dalam arti mudah dicernakan oleh orang kebanyakan untuk disebarkan lebih lanjut dalam proses dan kegiatan enkulturasi terutama di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas. Dalam kaitan ini perlu kiranya diperhatikan dan digalakan cara-cara penyajiannya, baik yang melalui media cetak, media pandang-dengar (*audio visual aids*) maupun lain-lain sarana yang dapat dimanfaatkan dengan cara yang lebih menarik sehingga dapat mengungguli hasil cultural industry asing yang semakin deras pengaruhnya dalam kehidupan sosial budaya bangsa. Demikian pula hasil rekaman kebudayaan bangsa itu hendaknya diolah sesuai dengan sarana penyebarluasan informasi khususnya yang menyangkut pendidikan humaniora di lingkungan pendidikan formal.

Apabila kegiatan tersebut dilakukan dengan baik dan bersinambung maka pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional melalui proses pembinaan budaya bangsa dapat terselesaikan dengan baik dan lebih mantap.

PENULISAN BIOGRAFI FOKOH-TOKOH YANG MASIH HIDUP DAN PERMASALAHANNYA

Oleh : Bambang Sumadio

Biografi tidak selalu merupakan kisah tentang kehidupan seorang tokoh yang telah tiada. Banyak biografi yang berkisah tentang kehidupan seseorang yang masih ada, bahkan ditulis oleh orang yang bersangkutan, yaitu suatu autobiografi.

Menulis biografi seseorang yang masih hidup nampaknya lebih mudah karena penulis selalu dapat berkonsultasi dengan sumber kisahnya. Namun, justru hal ini yang dapat memberi pengaruh tertentu kepada hasil penulisannya sehingga hasil itu kurang akurat. Misalnya karena mengikuti pandangan subyektif tokoh biografi itu atau karena khawatir menyinggung perasaan. Dalam hal inilah dituntut dari penulis biografi itu suatu *sofistikasi dan "finesse"*. Suatu kemampuan menilai yang hanya dapat lahir dari keakraban dengan jenis kesusastraan biografi yang ditulis oleh penulis-penulis yang berpengalaman. Sofistikasi dan finesse tentu mempunyai ukuran nilai yang ber-sumber pada lingkung budaya tertentu. Baik lingkung budaya tokoh biografi itu maupun lingkung budaya penulisnya. Dan akhirnya masyarakat pembaca yang akan menilai apakah bio-

grafi itu ditulis dengan baik dan pantas memperkaya khasanah kesusastraan kita.

Menulis biografi seseorang tokoh yang masih hidup tentu tidak hanya bertumpu pada ungkapan lisan yang diberikan oleh tokoh tersebut dalam wawancara. Lebih-lebih dalam rangka Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional ini. Tokoh-tokoh yang digarap adalah tokoh pilihan berdasarkan karyanya, pengabdianya, dan baktinya dalam bidang tertentu. Tentu mereka telah menciptakan pengaruh. Luas pengaruh ini belum tentu dapat dinilai dengan tepat oleh tokoh yang bersangkutan. Oleh karenanya, maka untuk dapat menampilkan tokoh itu dalam ruang waktu dan tempat yang menjadi panggung kegiatannya diperlukan sumber lain.

Untuk memperoleh "fakta sejarah", baik keterangan lisan yang diperoleh dari tokoh yang bersangkutan, maupun keterangan dari sumber-sumber lain dikaji menurut kelaziman metode sejarah. Dengan kata lain, walaupun suatu biografi mengisahkan seorang tokoh yang masih hidup, dan memperoleh keterangan langsung dari yang bersangkutan, semua keterangan itu tetap dikenakan kritik sumber sebagaimana seharusnya.

Metode wawancara yang tentunya banyak digunakan dalam penulisan biografi tokoh yang masih ada sesungguhnya memerlukan penguasaan kemahiran tertentu. Wawancara mengenal berbagai teknik yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan sebelum digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam pertimbangan ini termasuk pula kemampuan si tokoh untuk menceritakan sesuatu. Juga tentang kemampuan untuk mengingat berbagai peristiwa yang telah dialaminya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang harus disadari oleh si pewawancara. Selain itu tentu kita harus dapat menerima kenyataan bahwa egosentrisme bukan hal yang asing dalam keterangan yang diperoleh dari wawancara langsung dari seorang tokoh itu.

Dalam berbagai karangan mengenai penulisan biografi dianjurkan agar penulis berusaha memahami tokohnya dan mengembangkan rasa ikut mengalami apa yang dialami oleh tokoh itu. Pendekatan ini mungkin akan menimbulkan "bias" pada penulis. Tetapi, apakah bias itu dapat dihindari seluruhnya? Dan apakah bias itu selalu merugikan tujuan penulisan? Sebenarnya selain kemungkinan bias pada si penulis, bias itu ada pula pada tokoh biografi itu. Keterangannya mengenai berbagai hal pasti diwarnai oleh pengalaman maupun lingkungannya. Apalagi kalau hal-hal tersebut telah mengental menjadi paham pada orang itu.

Bias pada penulis yang agaknya sulit untuk dihilangkan sepenuhnya pada penulisan suatu biografi, lebih-lebih biografi tokoh yang masih hidup, dapat "diarahkan" dengan tema. Penulisan biografi pada Proyek IDSN, kecuali penyusun Biografi Nasional, pada umumnya jelas bertema kepahlawanan atau keteladanan, atau kedua-duanya.

Sepintas lalu menulis tentang kepahlawanan seseorang nampak mudah. Namun sesungguhnya sangat mudah kita terjerumus dalam klise-klise atau semacam stereotipe yang kehilangan unsur manusiawinya sama sekali. Tema yang digariskan oleh proyek sebaiknya benar-benar direnungkan. Kemudian dianalisa dalam hubungan dengan tokoh utama dalam biografi yang akan ditulis itu. Dalam usaha menulis biografi seorang tokoh yang masih hidup hal ini sangat penting, karena mungkin yang bersangkutan tidak merasa dirinya ditampilkan secara wajar dalam kerangka tema yang akan dikembangkan oleh si penulis. Oleh karenanya, penulisan biografi seorang tokoh yang masih hidup mungkin akan makan waktu yang lebih lama. Bukan karena kurangnya bahan, tetapi justru karena banyaknya bahan yang harus dianalisis dan diolah dalam konteks tema dan pandangan tokoh yang bersangkutan.

Dalam berbagai petunjuk mengenai penulisan sejarah selalu dinyatakan pentingnya kemampuan si peneliti untuk mengaju-

kan pertanyaan, baik kepada dokumen yang sedang diteliti maupun kepada seorang yang diwawancarai. Karena penulisan biografi tokoh-tokoh yang masih hidup tentu banyak memerlukan wawancara, maka sebelum seseorang mulai usaha penelitian dan penulisan, sebaiknya ia memahirkan diri dalam berbagai teknik wawancara dan mengetahui nilai dan bobot keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara tersebut. Mereka sebaiknya sudah memahami jenis-jenis pertanyaan yang tidak dianggap tepat untuk memperoleh keterangan untuk penulisan sejarah. Misalnya "*leading question*", "*loaded question*", "*hypothetical question*" dan sejenisnya.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara adalah tingkat atau ragam bahasa yang digunakan. Selain itu, sebaiknya pewawancara mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bidang tokoh yang akan diwawancarai. Adalah sangat menjengkelkan menghadapi pewawancara yang sama sekali awam tentang subyek wawancaranya. Hal tersebut menghambat kelancaran wawancara dan mengurangi kepercayaan tokoh yang bersangkutan terhadap kesungguhan pewawancara.

Persediaan pengetahuan seorang pewawancara tidak perlu sepenuhnya sama dengan pengetahuan seorang tokoh profesional mengenai bidangnya. Namun pengetahuan itu harus meliputi hal-hal baku yang pada umumnya diketahui oleh seorang "*informed layman*", seorang awam yang mengetahui. Batasnya memang relatif.

Dalam daftar tokoh yang akan ditulis dalam rangka Proyek IDSN tahun 1983/1984, terdapat tokoh-tokoh yang masih hidup dan bahkan masih berkarya. Misalnya Prof. Ir. Rooseno Soeriahadikoesoemo, Prof. Mr. Soenarjo, dan Gesang. Dua orang di antara tokoh tersebut ini adalah tokoh intelektual. Yang seorang adalah tokoh seni musik, khususnya musik keroncong. Professor Rooseno dan Professor Soenarjo tentunya mempunyai bidang karya maupun bidang minat yang jauh lebih luas dari Gesang. Dan sehubungan dengan itu, wawasannya mengenai

berbagai hal di luar bidangnya tentu berbeda pula. Semua ini harus dipertimbangkan oleh pewawancara sebelum menyusun pertanyaan-pertanyaan. Bukanlah suatu tindakan yang bijaksana untuk langsung mengadakan wawancara dengan seorang tokoh sebelum mengadakan studi persiapan mengenai tokoh itu. Studi itu harus setuntas mungkin. Jangan sampai terjadi bahwa kisah yang sebenarnya tidak terungkap bukan karena tokoh yang bersangkutan tidak menceritakan tetapi karena pewawancara tidak mengerti uraian tokoh itu.

Hal lain yang selalu harus diingat oleh pewawancara adalah bahwa sesungguhnya dialah yang memerlukan wawancara itu. Jangan sampai timbul suatu sikap seakan-akan tokoh itu harus berterima kasih bahwa dirinya telah dipilih untuk diungkapkan biografinya. Dalam hubungan ini sebaiknya ada pertanyaan yang jelas terlebih dahulu dari yang bersangkutan, bahwa ia tidak berkeberatan, kita harus menghargai hak azasnya tidak mengungkapkan sejarah hidupnya jika ia ingin bersikap demikian.

Akhirnya dapatlah disimpulkan, bahwa menulis biografi seorang tokoh yang masih hidup, selain tetap harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan sejarah yang benar, juga harus menghadapi masalah-masalah psikologi dalam fase penelitiannya. Selain itu mungkin juga ada masalah-masalah lain yang mungkin timbul dalam hubungan antara peneliti dengan tokoh biografi itu. Penulisan biografi tokoh-tokoh yang masih hidup dan masih berkarya memerlukan penguasaan teknis kesejarahan yang cukup dan kedewasaan pribadi pada penulisnya.

Acuan

1. Gottschalk, Louis; *Understanding History*, New York 1969
2. Leirissa, Drs. R.Z., Biografi, dalam *Pemikiran Biografi, Kepahlawanan, dan Kesejarahan*. Proyek IDSN 1980/1981
3. Ong Hok Ham, Dr., Biografi dan Sejarah, dalam *Pemikiran*

*Biografi, Kepahlawanan, dan Kesejarahan. Proyek IDSN
1970/1981.*

SEGI-SEGI PRAKTIS PENULISAN BIOGRAFI TOKOH

Oleh : RZ. Leirissa,

Idealnya suatu biografi harus mengandung tiga unsur, yaitu (1) ungkapan perwatakan tokoh, (2) rentetan tindakan tokoh, dan (3) keadaan zaman tokoh. Ungkapan perwatakan tidak selalu mudah karena membutuhkan pengetahuan psikologis. Ini tidak berarti bahwa biografer harus menjadi psikolog atau menguasai seluruh ilmu psikologi (sekalipun hal ini pernah ada, yaitu biografi Marten Luther oleh psikolog Eric Ericson umpamanya). Sering biografer mengungkapkan perwatakan tokoh dengan menonjolkan tindakan-tindakannya yang khas, atau mengemukakan ucapan-ucapannya yang khas. Seorang seniman seperti Chairil Anwar yang sering eksentrik, tentu berbeda dengan watak seorang ilmuwan yang serba serius.

Mengenai unsur kedua, yaitu rentetan tindakan tokoh, saya kira tidak akan menimbulkan permasalahan. Tetapi unsur yang ketiga, yaitu zaman di mana tokoh hidup, bisa membawa persoalan. Diskripsi atau analisa mengenai zaman sering memerlukan penelitian khusus. Selain itu biografer juga harus memahami permasalahan-permasalahan yang timbul dalam historiografi jaman yang bersangkutan. Pada pokoknya selain segi-segi politik, perlu pula dikemukakan segi-segi ekonomi, masyarakat dan

budaya. Hanya dengan analisa yang komprehensif tersebut keadaan zaman seorang tokoh bisa diungkapkan dengan baik. Hal ini dengan sendirinya tidak mungkin dilakukan untuk tugas yang kita hadapi, yang waktunya telah ditentukan.

Sebab itu cara yang sebaiknya adalah dengan membatasi unsur ketiga ini menjadi "latar belakang" saja. Latar belakang dari setiap tokoh tentu tidak sama. Tokoh ilmuwan mempunyai latar belakang yang berbeda dengan tokoh seniman, atau tokoh olahragawan, dan lainnya. Masing-masing mempunyai konteks sendiri. Inilah sebabnya aspek latar belakang ini perlu mendapat pemikiran yang serius dari biografer. Untuk mempelajarinya seorang biografer terpaksa harus membuka buku-buku yang menyangkut permasalahan itu. Untuk menyusun biografi seorang arsitek, dengan sendirinya kita harus mengetahui garis besar perkembangan arsitektur di Indonesia. Untuk menempatkan seorang ahli hukum dalam konteksnya kita perlu mengetahui perkembangan bidang ini di Indonesia. Dan seterusnya. Sudah barang tentu ada tokoh yang selain menonjol dalam profesinya, juga berjasa dalam kegiatan-kegiatan sosial, sehingga sang biografer pun diharuskan menjelajahi perkembangan kegiatan sosial yang bersangkutan. Dan tentu saja banyak pula tokoh yang selalu menonjol dalam profesinya juga berjasa dalam bidang politik. Tetapi kebiasaan untuk menempatkan setiap tokoh dalam konteks pergerakan nasional atau revolusi sekedar untuk menonjolkan patriotismenya, bukan kebiasaan yang baik. Patriotisme seseorang bisa diukur dari prestasinya itu sendiri.

Bahan-bahan sejarah yang terkumpul dalam suatu penelitian biografis tentu perlu disusun sedemikian rupa sehingga mudah dibaca orang. Susunannya tidak perlu mengikuti urutan yang disebut di atas, yaitu satu bab untuk watak, satu bab untuk tindakan-tindakan, dan satu bab untuk latar belakang. Aspek-aspek tersebut (watak, tindakan, latar belakang) bisa disusun dalam pelbagai macam urutan. Ada dua cara yang memudahkan kita menyusun bahan-bahan sejarah ini dalam suatu

cerita yang memudahkan kita menyusun bahan-bahan sejarah ini dalam suatu cerita yang menarik dan jelas. Pertama-pertama adalah pemahaman (pencernaan) bahan-bahan, atau lebih tegas lagi, dihapalkan garis-garis pokok cerita. Seorang sejarawan Inggris, Macaulay, terkenal karena berkemampuan untuk menghapalkan semua bahan sejarahnya sebelum menulis bukunya. Malah seringkali kalimat-kalimatnya pun sudah disusunnya di luar kepala sebelum bukunya mulai ditulis. Tidak semua orang mempunyai kemampuan ini. Tetapi menghapalkan bahan-bahan untuk satu bab saja saya kira masih dapat dilakukan oleh setiap orang yang melakukan penelitiannya sendiri. Tentu saja hal-hal seperti angka tahun, nama orang, nama tempat, tidak selalu bisa dihapalkan seluruhnya. Juga liku-liku tertentu dari cerita yang harus dimuat dalam bab yang bersangkutan, sering tidak bisa diingat semuanya. Tetapi ini bisa diatasi dengan sekali-sekali menengok pada buku catatan penelitian. Kegunaan mencernakan bahan-bahan (paling kurang dari satu bab) sebelum dituliskan adalah agar pikiran kita terbatas dari keharusan untuk setiap kali membaca buku/kartu catatan penelitian, dan dengan demikian kita pun mempunyai kemampuan untuk mencurahkan pikiran dan tenaga pada aspek-aspek struktur kalimat, atau penggunaan kata-kata yang tepat. Sebab acapkali aspek penggunaan bahasa inilah yang tidak dikuasai oleh sejarawan atau biografer.

Cara yang kedua untuk menyusun hasil penelitian kita dalam suatu cerita yang lancar dan bermakna, adalah dengan membuat *outline* (kerangka tulisan) hal ini acapkali dianggap tidak penting dan sepele. Namun *outline* bisa memberi gambaran sekilas mengenai susunan tulisan kita. Melalui *outline* kita bisa mengetahui bagian-bagian mana yang sudah mendapat tempat yang cocok, dan bagian-bagian mana yang masih perlu dimasukkan. *Outline* dengan sendirinya tidak perlu ketat. Perubahan-perubahan dan pencocokannya berjalan sejajar dengan perkembangan penelitian kita. Mengubah-ubah *outline*

merupakan suatu hal yang biasa juga dilakukan oleh setiap sejarawan. Data-data baru, peristiwa-peristiwa baru yang terungkap dalam penelitian, bisa saja menyebabkan kita mengubah *outline*.

Perubahan dengan *outline* adalah plot atau rangka cerita. Seluruh biografi, mulai dari kelahiran tokoh sampai meninggalnya, perlu disusun dalam suatu plot. Plot ini tercermin dalam out-line tersebut di atas. Tetapi setiap bab juga harus dibagi dalam plot-plot atau rangka-rangka cerita. Umpamanya bab mengenai masa kanak-kanak tokoh biasanya dibagi-bagi lagi dalam bagian-bagian kecil seperti kelahiran, balita, sekolah, hubungan dengan keluarga, dan lain-lain yang di sana-sini diselang-seling dengan lukisan mengenai watak anak. Bagian yang kecil itu adalah plot-plot pula. Dalam susunan karangan plot-plot ini dimuat dalam alinea-alinea. Apabila bahan-bahan sejarah untuk bab ini telah kita cernakan ("hapal") seperti disebut di atas, maka penyusunannya dalam bentuk cerita juga mudah. Dengan demikian kita bisa mengetahui apa yang harus diceritakan terlebih dahulu, dan apa yang menyusul, berapa alinea dibutuhkan untuk plot ini dan berapa untuk plot itu.

Sudah tentu tidak semua biografi sama isi dan bentuknya. Kita ketahui, umpamanya bahwa kini terdapat beberapa biografi mengenai Kartini, demikian pula beberapa biografi mengenai Presiden Sukarno, dan tokoh-tokoh politik lainnya. Ada biografi yang berhasil menyajikan ketiga aspek tersebut di atas dengan seimbang, tetapi ada pula biografi-biografi yang hanya menekankan karier politik dan mengabaikan perlukisan watak. Malah di Inggris pernah ada biografi yang hanya menekankan penampilan watak saja yang dibuat secara karikaturis sehingga menimbulkan hasrat tertawa, kalau bukan mengejek (biografi model Lytton Strachy).

Secara teoritis ada tiga bentuk biografi yang baik, pertama biografi interpretatif, kedua biografi populer, ketiga biografi sumber. Biografi interpretatif adalah biografi yang selain mem-

perhatikan keseimbangan dalam hal isi (watak, tindakan, dan zaman) juga mencoba menganalisa bahan-bahan itu menurut teori-teori interpretasi tertentu yang berasal dari sejarah ataupun dari ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan psikologi. Bobotnya justru terletak pada kekuatan interpretasi yang akademik itu. Untuk keperluan Inventarisasi Dokumentasi dan Sejarah Nasional agaknya bentuk biografi ini tidak diperlukan. Sebabnya terutama terletak pada kenyataan bahwa biografi interpretatif memakan waktu yang sangat lama (bertahun-tahun), sedangkan Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional terpakai pada jangka waktu yang sangat singkat (lebih kurang setengah tahun).

Bentuk biografi kedua, biografi populer, juga tidak sesuai dengan kepentingan Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Biografi populer biasanya ditulis dengan pertimbangan komersial, agar lekas laku di pasaran. Selain itu biografi populer tidak selalu mementingkan kebenaran ilmiah. Pelbagai gaya retorika dipergunakan untuk menjadikannya menarik. Sampai-sampai ada kutipan tentang percakapan-percakapan antara tokoh dengan orang-orang lain yang sama sekali tidak berdasarkan bahan sejarah. Percakapan atau dialog-dialog semacam itu sengaja dikarang oleh penulisnya berdasarkan pengetahuannya tentang fakta-fakta tertentu. Mungkin saja isi dari ucapan-ucapan itu benar, tetapi tidak pernah disampaikan dalam bentuk dialog oleh sang tokoh. Namun bentuk semacam ini memang mengasyikan. Biografi aliran Emil Ludwig (dengan karyanya yang terkenal Napoleon) merupakan salah satu contohnya.

Bentuk ketiga, yaitu biografi sumber, agaknya lebih cocok untuk kepentingan Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Biografi sumber pada umumnya adalah biografi pertama yang pernah ditulis mengenai seorang tokoh. Dengan demikian sang biografer tidak diwajibkan membuat studi perbandingan dengan biografi-biografi lain yang perlu ditulis mengenai tokoh

yang sama. Selain itu biografi sumber tidak mengharuskan biografer membuat suatu analisa atau diskripsi interpretatif. Yang penting di sini adalah mengemukakan sebanyak mungkin fakta tentang hidup tokoh yang disajikan dengan cara yang menarik. Dengan sendirinya ketentuan-ketentuan di atas, yaitu pembuatan outline, pencernaan bahan sebelum ditulis, dan penyusunan plot-plot, merupakan keharusan pula di sini. Karena cara-cara itulah yang menjamin munculnya suatu biografi yang dapat dibaca orang (dapat dipahami).

Bahan-bahan yang diperlukan untuk biografi sumber dapat diperoleh dari sumber apa saja, dokumen, wawancara, dan lain-lain. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan biografis untuk biografi sumber. Pada umumnya yang ditulis adalah tokoh-tokoh yang diakui berjasa bagi nusa dan bangsa. Sebab itu dengan sendirinya jasa-jasa mereka bagi nusa dan bangsa baru nampak di masa mereka berkarya, yang sering merupakan masa yang cukup lanjut dari jalan hidup mereka. Sudah tentu bukan masa yang "produktif" ini saja yang menjadi isi biografi, karena biografi pada umumnya menyangkut keseluruhan riwayat hidup.

Dengan demikian timbul masalah, aspek-aspek apa saja dari masa "pra produktif" yang perlu dimasukkan dalam biografi. Aspek-aspek apa saja dari masa kanak-kanak yang perlu dikemukakan, atau aspek-aspek apa saja dari masa sesudahnya, dan seterusnya. Di sini mau tidak mau kita masuk dalam permasalahan teoritis lagi. Umpamanya, ada yang berpendapat bahwa pembawaan seseorang lebih penting dari pengaruh lingkungannya. Ada yang berpendapat bahwa tokoh-tokoh yang kemudian menonjol dalam masyarakat (yang berprestasi tinggi) disebabkan karena lingkungan sosial-budayanya. Ada pula sementara biografer yang berpendapat, bahwa masa kanak-kanak dari tokoh tidak penting dalam pembentukan pribadinya, di masa-masa kemudian ia menonjol dengan tindakan-tindakannya yang luas biasa, sehingga ia dianggap tokoh.

Agaknya pendapat bahwa pribadi seseorang tidak bisa muncul begitu saja tanpa ada bibit-bibit dan pengaruh-pengaruh di masa-masa sebelumnya lebih menarik. Pembawaan seseorang cukup penting, dan pembawaan itu bisa mengalami perkembangan sesuai dengan kemampuan penyesuaian seseorang dengan lingkungannya. Sebab itu dalam suatu biografi tokoh, masa kanak-kanak perlu mendapat perhatian penuh. Di masa ini seseorang mengalami sosialisasi untuk pertamakalinya. Lingkungan sosialisasi pada masa kanak-kanak ini adalah lingkungan keluarganya. Saling mempengaruhi antara individu bersangkutan dengan keluarganya cukup penting untuk dikemukakan dengan agak terperinci. Tidak cukup dengan hanya mengatakan, bahwa di masa kanak-kanak si anu penurut, sayang pada orang tua, cerdas, pandai bernyanyi, dan lain-lainnya.

Dengan "modal dasar" yang terbentuk di masa kanak-kanak dan sekolah itu, si tokoh menghadapi dunia sekelilingnya, dan akhirnya muncul sebagai seorang yang berguna bagi nusa dan bangsanya. Ini berarti bahwa banyaknya tantangan yang harus dihadapinya, banyak usaha yang harus dilakukannya untuk mencapai keadaan yang menjadikannya tokoh. Bagaimana ia menanggulangi tantangan-tantangan, dan bagaimana keadaan membantunya dalam usahanya, merupakan plot-plot penting yang harus dikemukakan. Proses penyesuaian diri dengan pelbagai situasi yang silih berganti timbul dalam hidupnya perlu disoroti. Proses penyesuaian diri ini memang dihadapi setiap orang, sebab itulah ada konsep "pendidikan seumur hidup". Dengan sendirinya penyesuaian diri tersebut tidak selalu dilakukan melalui pendidikan formal. Tetapi bagaimana seseorang menerima dan menjadikan dirinya bagian dari perkembangan umum merupakan usaha pribadi masing-masing. Ada yang berhasil, tetapi ada pula yang tidak berhasil. Tetapi di samping itu ada pula orang-orang yang karena kemampuannya bisa lebih menonjol dari pada yang lain, sehingga justru bisa menciptakan kondisi-kondisi baru. Orang-orang yang menciptakan kondisi-kondisi di sini bisa diartikan sebagai penemuan ilmiah, kemam-

puan managerial, aliran seni lukis baru, dan lain-lainnya. Keberhasilan-keberhasilan inilah yang perlu disoroti.

Ini berarti bahwa paling kurang satu bab harus disediakan untuk melukiskan (mendiskripsikan) pencapaian-pencapaian ini. Bab-bab sebelumnya memberi gambaran mengenai keadaan umum dari bidang kegiatan sang tokoh. Dalam bab-bab ini diceritakan faktor-faktor yang memungkinkan sang tokoh melakukan hal-hal yang luar biasa tersebut. Selain itu juga dilukiskan dalam bab-bab ini hambatan-hambatan apa yang dihadapi sang tokoh dan bagaimana ia mengatasinya. Keseluruhannya mengkristalisasikan dalam bab yang khusus disediakan untuk menceritakan pencapaian-pencapaian yang luar dari biasa tersebut. Kemudian bab-bab selanjutnya bisa diisi dengan masa-masa akhir hidupnya.

Yang perlu diperhatikan juga adalah lampiran-lampiran. Selain lampiran yang lazimnya dikemukakan seperti ijazah, surat pengangkatan, surat penghargaan dan lain-lain, perlu pula lampiran-lampiran yang memperlihatkan segi-segi keistimewaan sang tokoh. Bagi seorang pelukis barangkali lampiran ini berupa fotokopi dari lukisannya yang paling terkenal. Bagi seorang ahli hukum lampiran ini bisa berupa kutipan koran mengenai salah satu prestasinya. Bagi seorang arsitek lampiran ini bisa berupa skema dari gagasan-gagasannya, dan lain-lain. Kemudian foto-foto pun tidak harus selalu mengenai masa kecil, orang-tua dan lain-lain dari si tokoh. Tetapi selain itu foto-foto terutama harus memberi visualisasi dari pencapaiannya yang istimewa itu. Daftar karya tulis dari seorang ilmuwan juga merupakan lampiran yang perlu dikemukakan.

SEJARAH SOSIAL KOTA

Oleh : FA. Sutjipto

1. *Pengeritan Sejarah Sosial Kota*

Judul di atas dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Yang dimaksud, apakah sejarah sosial dengan lokalitas suatu kota ataukah sejarah kota dengan menitikberatkan pada kegiatan masyarakatnya. Apabila yang dimaksud yang pertama, maka uraian dapat bertemakan macam-macam atau salah satu di antaranya, asalkan kegiatan itu tidak keluar dari lingkup kota. Sebagai contoh : Sejarah pendidikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Di sini Kota Yogyakarta lebih merupakan batas lingkup spasial dari uraian. Cntoh lain ialah sejarah organisasi pelajar di Jakarta atau di Surabaya. Kota Jakarta dan Kota Surabaya hanya merupakan wadah atau lokasi dari kegiatan.

Alangkah berbeda apabila yang ditekankan adalah sejarah kota, dengan titik berat pada pendidikan. Di sini harus terlihat hubungan timbal balik antara kota dan pendidikan; seberapa jauh berkembangnya pendidikan berpengaruh pada berkembangnya kota, baik mengenai fisik maupun fungsinya. Mengenai ini dapat diambil contoh misalnya kaitan pendidikan dengan Kota Yogyakarta. Pertanyaan-pertanyaan dapat ditimbulkan, seperti : Mengapa Kota Yogyakarta dipilih menjadi tempat di-

dirikannya Universitas Gajah Mada? Dengan membanjirnya calon-calon mahasiswa dari berbagai pelosok tanah air ke kota ini, bagaimanakah pengaruhnya kepada masyarakat setempat? Pertanyaan ini dapat dijawab misalnya : penduduk Kota Yogyakarta menjadi bertambah setiap tahun; makin ramainya arus lalu lintas kendaraan pada jam-jam kuliah; bertambahnya jumlah gedung-gedung baru dalam kampus ditepi kota; makin meningkatnya jumlah perguruan-perguruan tinggi dan universitas baru swasta di pinggiran kota; tertelannya desa-desa pertanian oleh pembangunan rumah-rumah dosen maupun karyawan; belakngan muncullah perusahaan atau koperasi transportasi kota untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, seperti adanya kol kampus, atau bis kota yang makin menambah ramainya lalu lintas dalam kota.

Di sisi lain makin berkembangnya Kota Yogyakarta menjadi kota pendidikan membawa perubahan-perubahan orientasi masyarakat. Terjadi kontak-kontak budaya dan adat isitiadat antara penduduk setempat dan suku-suku bangsa lain di rumah-rumah keluarga yang menyediakan pondokan. Pandangan sempit tradisional berangsur-angsur berubah; konsep wawasan Nusantara makin berkembang di kalangan penduduk.

Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas tampak jelas kaitan antara proses pendidikan dengan kota, baik menyangkut fisik kota maupun proses kehidupan masyarakatnya. Data-data kuantitatif dapat digunakan untuk menerangkan proses perkembangan masyarakat kota tersebut. Dalam hubungan ini maka untuk menangani Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, dengan tema *Sejarah Sosial*, dan telah pula ditetapkan sekitar dua puluh kota di Nusantara sebagai obyek penelitian dan penulisan, kiranya perlu ditentukan model penulisan yang mana yang akan dipilih, apakah sejarah sosial dengan tema tertentu di suatu kota, dengan tidak usah menyinggung pada kotanya sendiri, ataukah menonjolkan perkembangan kota tertentu, baik menyangkut fisik maupun fungsinya, yang sudah tentu melibatkan kegiatan masyarakatnya.

Jika yang diambil yang pertama kiranya tidak begitu sukar, karena hampir sebagian besar sejarah yang pernah ditulis berlokasi di kota, seperti sejarah proklamasi, sejarah kepartaian, sejarah perguruan tinggi, sejarah kelembagaan negara dan sebagainya. Sejarah pergerakan nasional yang kita kenal sekarang adalah berlokasi di kota-kota penting, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Surakarta, Yogyakarta dan lainnya, sesuai dengan di mana mulainya berperan suatu partai atau organisasi, serta tempat domisili tokoh-tokohnya. Namun apabila yang diambil model uraian yang kedua, maka titik berat uraian adalah kotanya sendiri, termasuk peranan yang dimiliki dalam hubungan dengan kegiatan masyarakatnya.

2. *Beberapa contoh penulisan*

Sebelumnya perlu dikemukakan bahwa penelitian dan penulisan sejarah kota-kota di Indonesia selama ini memang kurang mendapat perhatian di kalangan para sejarawan kita. Beberapa kota lama pernah ditulis oleh penulis-penulis Belanda, seperti Van der Chijs mengenai Kota Banten lama (*Oud Bantam*)¹, De Haan mengenai Kota Batavia lama (*Oud Batavia*)², Von Foerster mengenai Kota Surabaya Lama (*oud Sourabaya*)³, dan lainnya. Rekan-rekan dari arkeologi Islam juga telah menulis beberapa karangan tentang kota-kota pantai di Indonesia pada periode abad ke-16 dan ke-17 dengan menggunakan sumber-sumber Portugis, Arab, Cina dan Belanda⁴. Dari karangan-karangan itu pengetahuan kita mengenai kota-kota lama, terutama kota-kota pantai yang banyak berperan dalam penyebaran agama Islam, menjadi bertambah. Di samping itu terdapat juga tulisan-tulisan lain dari penulis asing yang sebagian besar mengenai kota-kota pantai periode abad ke-16 dan ke-17.

Tulisan-tulisan baru mengenai Kota Jakarta⁵ dan Kota Semarang⁶ ju telah terbit, meskipun tekanan pembahasan masing-masing agak berbeda. Proyek yang akan menangani penulisan sejarah kota-kota di Indonesia pada periode abad sekarang dapat dipandang sebagai usaha yang maju.

Sudah disebutkan bahwa sebagian besar kota-kota yang akan diteliti dan ditulis dalam proyek ini adalah kota-kota pantai, yang mempunyai tradisi perdagangan laut cukup lama. Kota Banjarmasin, Pontianak, Palembang, Ujung Pandang Semarang, Surabaya dan lainnya adalah kota-kota yang telah lama. Penelitian kota dapat menitik beratkan pada unsur numerik dengan meninjau perkembangan fisik kota, seperti luas kota, demografi, segregasi permukiman baik menurut penggolongan etnis, okupasi, tingkat kekayaan, tingkat pendidikan dan sebagainya. Juga dapat diamati perkembangan penyediaan sarana dan prasarana kota, seperti jaringan jalan, gedung-gedung perkantoran, taman, jembatan, pasar dan lainnya. Penelitian kota pada unsur numerik akan banyak manfaatnya untuk mengetahui tingkat dan arah perkembangan dan perluasan kota, baik horizontal maupun vertikal.

Di samping itu penelitian kota juga dapat dilakukan dengan menitik beratkan pada unsur non-numerik, ialah pada fungsi kota. Fungsi kota satu dan lainnya adakalanya tidak sama. Penggolongan kota menurut fungsi dapat membedakan apakah suatu kota sebagai pusat pemerintahan, kota perdagangan, kota kebudayaan, kota produksi, kota kesehatan, atau kota rekreasi⁷. Meskipun umumnya kota memiliki beberapa fungsi, namun ada fungsi yang menonjol. Jakarta misalnya, lebih menonjol sebagai ibukota Negara Republik Indonesia dan Pusat Administrasi Pemerintahan, meskipun kota ini juga berperan dalam bidang perdagangan laut. Kota Surabaya lebih menonjol sebagai kota bandar besar, meskipun juga menjadi pusat kota daerah propinsi Jawa Timur. Kota Yogyakarta lebih menonjol sebagai kota pendidikan dan kota budaya, meskipun juga menjadi kota propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikianlah tiap kota mempunyai sifat khusus yang dimilikinya. Dalam hubungan ini penggarapan sejarah kota-kota yang telah ditentukan oleh proyek ini dapat ditekankan pada fungsi menonjol dari kota itu. Sungguh aneh bahwa sebagian besar yang terpilih adalah kota-kota pantai. Dengan demikian

fungsi pokok dari kota-kota itu adalah sebagai kota perdagangan laut. Ini tidak berarti bahwa didalam kota itu tidak pernah terjadi kegiatan masyarakat di bidang lain. Pada dasarnya masyarakat kota melakukan kegiatan macam-macam; politik, ekonomi perdagangan, kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan. Dalam menggarap kota aspek-aspek inipun dapat diuraikan perkembangannya.

Sungguh menarik bahwa beberapa kota di Inodnesia terletak di tepi sungai besar, seperti Banjarmasin, Palembang, Pontianak, dan lain-lainnya. Letak kota di tepi sungai mengingatkan kita pada teori Cooley yang menekankan peranan transportasi dalam menentukan timbulnya kota atau letak suatu kota. Menurut teori ini kota timbul di tempat pemindahan barang angkutan, seperti muara sungai, persimpangan jalan, ujung jalan di tepi sungai pertemuan jalan antara dua buah desa dan sebagainya.⁸ Jelas bahwa jalur tranportasi lewat sungai memegang peranan penting dalam kota-kota sungai (*riverine cities*) seperti itu. Dalam kondisi seperti ini daerah *hinterland* sangat berperan dalam menghidupi kota. Kegiatan-kegiatan perdagangan sungai dapat ditonjolkan sebagai salah satu kegiatan masyarakat yang cukup penting.

Selain dari sudut fungsi kota dan tipe kota menurut lokasinya, dapat juga diadakan pembedaan kota menurut tempatnya di alam hirariki kota-kota, seperti apakah itu kota metropolitan, kota besar atau kota kecil, juga klasifikasikan menurut hirarki sebagai pusat administrasi pemerintah, seperti ibukota negara, kota pusat daerah propinsi, kota pusat daerah kabupaten, atau hanya kota kecamatan. Sudah tentu cabang-cabang kegiatan di dalam kota besar metropolitan lebih banyak dari pada kota kabupaten. Menguraikan Kota Jakarta, sebagai ibukota dan sekaligus kota administratif daerah. Daerah khusus ibukota setingkat propinsi akan lebih rumit daripada Kota Indramayu yang merupakan kota kabupaten di Propinsi Jawa Barat.

Meskipun seluruh aspek kegiatan masyarakat Kota Jakarta sebagai bahan penulisan akan terlalu luas, sebaliknya mengamobil salah satu aspek kegiatan bagi kota kecil mungkin bahannya agak sulit. Oleh karenanya bagi kota besar dapat diambil salah

satu atau dua aspek tertentu untuk dibicarakan, sedang untuk kota kabupaten yang lebih kecil dapat diuraikan aspek kegiatan.

Mengingat kota-kota pantai di Indonesia, mempunyai tradisi perdagangan yang cukup lama, maka uraian mengenai aspek perdagangan sangat menarik. Uraian seperti ini dapat mempertanyakan faktor-faktor yang mendorong mengapa suatu kota pantai dapat berkembang menjadi kota bandar yang penting. Dalam hubungan ini dapat ditinjau bagaimana lokasi pantai dalam jaringan jalur perdagangan laut, apakah ada potensi daerah *hinterland* sebagai produksi hasil bumi untuk diperdagangkan. Bagaimana jalur komunikasi daerah produksi itu dengan kota bandar. Uraian seperti ini untuk kota pantai Banjarmasin dan Palembang sangat cocok. Selanjutnya dapat dipermasalahkan sifat heterogeen masyarakat kota dan bagaimana komposisi penduduk dari segi etnis dan perubahan-perubahan jumlahnya. Dalam hubungan dengan perubahan jumlah penduduk kota selain karena perubahan alami (perbedaan angka kelahiran dan angka kematian) juga menarik untuk dibicarakan secara mendetail perubahan yang disebabkan karena proses mobilitas geografis (perpindahan masuk kota dan keluar kota), baik dari desa ke kota (urbanisasi) ataupun dari daerah atau pulau lain (migrasi intern).

Penempatan berbagai macam penduduk ke dalam permukiman-permukiman tertentu adalah masalah yang juga perlu dibicarakan. Bagaimanakah sifat masing-masing kelompok etnis dalam permukiman, dan bagaimana interaksi sosial antar kelompok, baik antara suku-suku bangsa di Indonesia maupun dengan kelompok asing. Apakah dalam perkembangan waktu (sesuai dengan periode yang diteliti, lebih kurang 1900 – awal kemerdekaan) terdapat perubahan mata pencaharian di kalangan kelompok etnis yang semula pedagang itu.

Sebagai akibat dari kegiatan kota bandar di sektor perdagangan dapat dibahas juga perkembangan arus barang masuk (impor) dan barang keluar (ekspor), dengan dijelaskan proses pengangkutan barang dagangan, dan peredarannya di pasar-pasar dalam kota. Peranan golongan pedagang baik yang besar maupun yang kecil dijelaskan dalam rangka stratifikasi dan

penggolongan masyarakat. Dalam hubungan ini mau tidak mau akan disinggung mekanisme perdagangan kota, dengan alat-alat birokarasi kota yang mengatur dan mengawasi. Demikian pula dapat disinggung kontak sosial antara golongan pedagang dengan golongan-golongan lain dalam masyarakat.

Apa yang dikemukakan di atas adalah beberapa contoh pokok-pokok pembahasan, seandainya aspek perdagangan dari kegiatan kota dipilih menjadi tema penulisan. Masih dapat juga dipilih tema-tema yang lain. Tema pendidikan dan hubungannya dengan perkembangan kota di muka telah sedikit diuraikan dengan mengambil sebagai contoh kota pedalaman Yogyakarta, yang juga dikenal sebagai kota kebudayaan dan kota pendidikan. Sudah tentu pokok-pokok yang dibahas dapat dikembangkan, misalnya dengan organisasi mahasiswa dan pelajar, beserta kegiatannya di bidang olahraga, kesenian, kemasyarakatan, dan lainnya. Juga dapat diteliti seberapa jauh akulturasi budaya terjadi akibat dari kontak yang terus-menerus antara kelompok kelompok etnis mahasiswa yang banyak belajar di Kota Yogyakarta, baik di universitas dan perguruan tinggi negeri/swasta. Dalam hubungan ini cukup menarik pula diteliti makin meluapnya jumlah calon mahasiswa yang menempuh ujian setiap tahun (bila periode penulisan diperpanjang sampai tahun 1980—an), sedang yang akan diterima hanya sekitar 10% jumlah calon. Masalah ini sangat erat hubungannya dengan munculnya perguruan-perguruan tinggi swasta baru sebagai tempat penampungan mahasiswa yang tidak berhasil ujian di universitas atau institut negeri. Jumlah universitas dan perguruan tinggi, termasuk akademi, makin banyak dengan berbagai segi keuntungan dan kerugiannya dipandang dari sudut perkembangan pendidikan.

Sejarah sosial juga dapat mengambil aspek-aspek lain dalam masyarakat sebagai tema penulisan, seperti : perkembangan kerajinan dalam suatu kota, juga industri kecil pembuat alat pertanian, perusahaan batik dan tenun, dan sebagainya.⁹ Untuk mengulas kota kabupaten yang mempunyai tradisi kerajinan yang cukup lama, seperti Kota Jepara misalnya, tema ini cukup menarik. Naik turunnya jumlah pengusaha parang-barang kerajinan, baik disebabkan karena perubahan persediaan bahan baku, tingkat keahlian para pengrajin, daerah pemasaran, harga

dan jumlah produksi adalah merupakan pokok-pokok yang dibahas dalam uraian. Demikian pula rekruting tenaga pengrajin dengan cara sekolah atau belajar kerja (*magang, apprentice, meelopen*) dapat dikaitkan dengan asal calon pengrajin itu, dari lingkungan kerabat pengusaha atau dari orang lain, dari daerah sekampung atau dari daerah lain; juga dapat dibahas jaminan sosial kepada para tukang atau tenaga pengrajin, upah pekerja, modal, daerah asal bahan baku, daerah pemasaran, dan lain sebagainya.

Untuk mengambil tema-tema lain yang berupa perusahaan-perusahaan atau industri lain, pokok-pokok di atas dapat ditambah dan dikembangkan. Namun dalam memilih tema seperti ini harus disadari bahwa akhirnya tugas kita adalah menulis sejarah, yang mementingkan pada proses perkembangan gejala dalam masyarakat. Apabila diduga, setelah mengadakan orientasi sumber, bahwa suatu tema tidak menunjukkan proses perkembangan yang berarti, dan apabila ditulis akan lebih berupa uraian sinkronis tanpa perkembangan, maka tema itu lebih baik ditinggalkan. Apabila tema terlalu sempit untuk diuraikan, dapat juga dirangkum dengan tema-tema lain dengan diberi satu judul. Sebagai contoh apabila untuk menguraikan sejarah perkembangan industri kerajinan ukiran tidak cukup bahannya, maka dapat ditambah dengan industri perkakas rumah, industri pengrajinan, perusahaan dan pedagang kayu, dan lainnya. Tema kecil-kecil ini dicakup dalam tema besar berjudul : sejarah industri perkayuan di Kota Banjarmasin. Uraian akan menjadi bulat jika dihubungkan dengan daerah hutan Kalimantan Selatan yang mempunyai produksi kayu sangat melimpah. Dengan demikian penguraian dapat ditarik ke dalam periode lebih panjang, misalnya tahun 1900—1950. Meskipun dalam masa tertentu salah satu tema kecil, misalkan industri perkakas rumah mengalami kemunduran dan tidak berkembang, ini tidak akan mengganggu uraian keseluruhan; bahkan dapat dipersoalkan mengapa jenis-jenis industri perkayuan tetap maju dan berkembang, sedangkan industri perkakas rumah mengalami kemerosotan.

Dapat juga tema kecil industri kayu digabungkan dengan industri lain, seperti industri besi, industri semen, industri dan lainnya, menjadi satu tema besar, misalnya dengan judul : Sejarah perindustrian di Kota Palembang, dengan memerinci pokok-pokok yang dapat dibahas. Apabila uraian semacam ini dihubungkan dengan dua model uraian tentang sejarah sosial kota di muka, maka uraian semacam ini termasuk model penulisan yang pertama, ialah lebih mementingkan uraian tentang kegiatan tertentu dalam masyarakat, sedang kotanya hanya merupakan wadah atau tempat, di mana kegiatan itu terjadi dan berkembang. Dengan demikian pengaruh timbal-balik antara kota dan kegiatan masyarakat tidak dibahas secara khusus.

3. *Masalah Sumber Sejarah*

Karena luas lingkup waktu penulisan sejarah sosial kota ini telah disepakati antara tahun 1900 sampai awal masa kemerdekaan (mungkin masa diperpanjang sampai masa-masa *pelita*), maka pencaharian sumber sejarah harus meliputi tiga jaman, ialah jaman kolonial Belanda, jaman Jepang, dan jaman kemerdekaan. Untuk zaman kolonial Belanda sudah pasti sumber sejarah harus dicari di dalam dokumen-dokumen pemerintahan Hindia Belanda, surat kabar atau majalah pada waktu itu. Untuk zaman Jepang yang singkat itu, apabila tidak diketemukan sumbernya, dapat disinggung secara selintas atau dilangkahi untuk terus masuk ke dalam kemerdekaan. Sumber sejarah pada masa kemerdekaan sebenarnya baru agak banyak jumlahnya setelah priode revolusi fisik, pada waktu usaha-usaha mengisi kemerdekaan. Mengenai periode yang lebih resent dapat ditempuh pencarian sumber dengan observasi dan wawancara.

Untuk mengakhiri tulisan singkat ini perlu sekali lagi diingatkan, bahwa untuk proyek ini kita diminta untuk menulis sejarah, dan bukan yang lain; oleh karenanya uraian yang akan disajikan harus tentang perkembangan dan perubahan, yang mempunyai arti penting bagi masyarakat.

Catatan

1. J. Van der Chijs, "Oud Bantam", *TBC*, XXVI (1882), hal. 1 - 62.
2. F. de Haan, *Oud Batavia*, 2 jilid, Bandung, 1955.
3. G. H. Von Faber, *Geschiedenis van Indie's cerste koopstad (Oud Soerabaia)*, Soerabaia, 1931.
4. Sebagai contoh adalah tulisan Uka Tjandrasasmita di dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid III, Jakarta, 1977, hlm. 148 - 245.
5. Abdurrachman Surjomihardjo, *Pemekaran Kota Jakarta*, Jakarta, 1977.
6. Amen Budiman, *Semarang Riwayatmu Dulu*, I, Semarang, 1978; juga tulisannya yang berjudul : Semarang Juwita : *Semarang Tempo Doeloe, Semarang Masa Kini dalam Rekaman Kamera*, Semarang 1979.
7. J.D. Comair & Werner J. Cahnman melihat fungsi ekonomis kota dengan menggolongkannya menjadi dua tipe, ialah tipe kota konsumen dan kota kota produsen; lihat J.D. Comhair & Werner J. Cahnman, *How Cities Grew : The Historical Sociology of Cities*, Madiosn, N.J., 1959, hlm. 12 dst.; cf. John. Friedman, "Cities in Social Transformation", dalam *Comparative Studies in Society and History*, vol. IV, number 1, November 1961, the Hague, hlm. 8
8. Pendapat Charles H. Cooley ini diuraikan oleh Don Martin-dale dalam "Prefarory Remarks : The Theory of the Ciry", pada Max Weber, *The City*, New York/London 1966, hlm. 16.
9. Ibn Khaldun memberi contoh berbagai macam kegiatan kota terutama dalam hubungan dengan penemuan kebutuhan hidup, seperti perdagangan, kerajinan, keagamaan, pengadilan, pengajaran dan lainnya; lihat Ibn Khladun, *The Muqaddimah : In Introduction to History*, Princeton, N.J., 1970, hlm. 297-332.

TEKNIK MEMBUAT CATATAN DALAM PENELITIAN

Oleh : T. Ibrahim Alfian

Hal membuat catatan adalah masalah yang sangat penting dalam melakukan sesuatu penelitian. Persoalan ini tidak hanya penting bagi orang yang melakukan *library research*, penelitian melalui bacaan pustaka, tetapi juga bagi seorang penyelidik yang menghadapi sumber lainnya secara langsung, misalnya di dalam laboratorium. Tidaklah mungkin menggantungkan semua data dari penelitian semua essay yang baik tidak akan dapat dihasilkan tanpa membuat catatan dari sumber-sumber yang telah ditelaah.

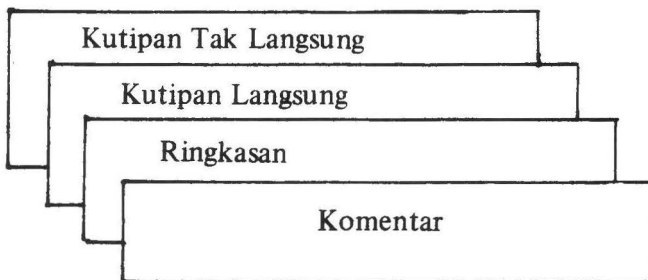
Biasanya seorang pemula dengan enaknya menuliskan catatan dari apa yang telah dibacanya di dalam sebuah buku tulis dan di dalam setiap halaman buku tulis itu dicatatnya pula berbagai butir hasil bacaannya. Cara seperti ini adalah cara yang tidak praktis dan sangat tercela. Bila ia hendak menyusun kelak dalam bentuk karangan, misalnya menyusun sesuatu bab, maka kerjanya hanya membolak-balik buku tulis itu untuk mencari halaman mana yang ada tertulis hal-hal yang bersangkutan dengan bab yang sedang digarapnya. Demikian pula bila ia menulis bab berikutnya, maka buku catatan itu terpaksa dibolak-baliknya kembali melihat apakah ada pula hal-hal yang perlu

pada halaman-halaman tadi. Ini terpaksa dilakukannya karena ketika menulis dahulu beberapa butir atau hal telah dicatat dalam satu muka atau halaman saja. Kalau buku-buku yang dibacanya misalnya lebih dari 20 buah, maka di samping waktunya terbuang untuk mencari-cari dengan membolak-balik halaman buku tulis tadi, dapat ia terjerumus dengan mudah ke dalam kesilapan dan kekeliruan.

Bagaimanakah cara yang terbaik untuk membuat catatan?. Satu-satunya cara yang tepat ialah dengan menggunakan kertas lepas atau kartu yang dipotong-potong menurut tiga jenis ukuran *standard*, yaitu : $7\frac{1}{2}$ cm x $12\frac{1}{2}$ cm atau 10 cm x 15 cm, atau pun 13 cm x 21 cm.

Bagi orang yang baru melakukan *research* hal mana dan apa yang harus dicatat masih sulit dapat ditentukannya. Ada pula tendensi untuk menganggap semuanya itu penting hingga semuanya itu mau dicatat, dan dengan lengkap pula. Kadang-kadang ia lupa bahwa hasil *research* dalam bentuk karangan itu merupakan hasil karyanya dengan pokok-pokok dalam bentuk karangan itu merupakan hasil karyanya dengan pokok-pokok pikiran dan interpretasinya sendiri. Oleh karena itu tidaklah semua hal perlu dicatat sama dengan yang didapati dalam sumber informasi yang sedang dihadapi.

Miskipun catatan itu ada berbagai ragam bentuknya, tetapi rasanya cukuplah dibagi seperti yang dikemukakan oleh Florence M.A. Hilbish (1952), yakni atas *quotation* (kutipan langsung) *citation* (kutipan tidak langsung), *summary* (ringkasan), dan *comment* (komentar). Perbedaan itu harus jelas untuk menghindari kealpaan kita di kemudian hari yang apakah catatan itu merupakan kutipan tidak langsung, ringkasan atau komentar dari pada kita sendiri. Lihatlah contoh di bawah ini :



Membuat catatan ini harus diusahakan sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk kembali lagi ke sumber bacaan semula. Perlu pula diingat bahwa catatan kita jangan terlalu singkat hanya karena alasan untuk mempermudah pekerjaan saja, karena mungkin catatan itu kurang lengkap bila kelak kita pergunakan ketika kita menulis.

Bila seorang pemula telah memilih kerangka sementara (*tentative outline*) maka baginya telah lebih mudah memilih mana di antara bahan-bahan yang sedang dibacanya yang perlu untuk dicatatnya. Akan tetapi sering pula terjadi kerangka sementara itu mengalami perubahan selama *research* dijalankan. Maka oleh karena itu yang patut dicatat ialah segala sesuatu, baik berupa fakta atau opini, yang berhubungan dan yang berguna bagi topik yang sedang diselidiki.

Saran yang patut diperhatikan ialah tidak perlunya kita menurun terlalu kerap keterangan-keterangan atau bahan-bahan yang terdapat di dalam buku yang kita baca itu. Jika kita membaca sesuatu hal yang menarik dan kita perlu memberikan komentar selagi kita ingat, maka untuk memudahkan di kemudian hari bila menulisnya dalam bentuk bab-bab, sebaiknya dikutip dulu hal yang menarik perhatian itu. Kemudian pada kertas yang sama atau pada kertas lepas yang lainnya dituliskan komentar kita dan kertas itu dikepilkan menjadi satu dengan kertas yang berisi kutipan yang menarik tadi (lihat halaman 9).

Dalam sistem lembaran lepas atau sistem kartu, sebaiknya janganlah mencatat lebih dari satu butir atau fakta di dalam lembaran itu. Kalau pun dibuat lebih dari satu, perlu ada catatan di sebelah kanan atas dari pada kartu catatan itu. Pada setiap kartu atau lembaran kertas perlu ada petunjuk dari sumber mana kita peroleh bahan-bahan catatan itu, siapa tahu kelak jika kita terpaksa melihat kembali ke sumber itu kita akan menghemat waktu. Di samping itu pula sebagai pertanggung jawab ilmiah kita wajib memberi tahu pembaca dari mana sumber-sumber informasi kita peroleh. Oleh sebab itu di sebelah kiri atas kartu

lepas itu, haruslah ditulis nama pengarang, judul bukunya, tahun terbit atau edisi mana, jilid berapa dan dari halaman berapa informasi itu kita ambil. Sebetulnya tempat terbit dan nama penerbitnya tidaklah perlu dituliskan; karena sebelum buku tersebut mulai dibaca, seharusnya kita telah membuat kartu bibliografi yang berukuran 7,5 cm x 12,5 cm. Dalam kartu ini segala data tentang publikasi, baik nama pengarang maupun judulnya semestinya telah kita catat. Lihat contoh berikut ini :

KUTIPAN LANGSUNG

Garraghan,
A Guide to Historical Method
hlm. 33.

Metode Sejarah
Definisi

A systematic body of principles and rules designed to aid effectively in gathering the source-materials of history, appraising them critically, and presenting a synthesis (generally in written form) of the results achieved.

Contoh kartu bibliografi yang sebenarnya telah kita buat sebelumnya adalah sebagai berikut :

Nomor kode
perpustakaan.

Garraghan, Gilbert J.

A Guide to Historical Method
New York : Rordham Univ. Press, 1957,
482 pp. Index, bibl.

Jika kita menemukan bahan-bahan yang sangat penting yang dapat memperkuat jalan pikiran yang hendak kita kemukakan dalam karangan kita, maka bahan-bahan atau pendapat seperti itu perlu kita kutip secara langsung (*quotation*). Yang

termasuk dalam golongan ini adalah definisi-definisi, opini-opini yang berlainan dengan pendapat yang lazim dalam masyarakat, dan lain-lain hal yang amat istimewa yang dapat dianggap akan memperkuat posisi karangan kita. Tidaklah semua hal perlu dikutip secara langsung. Hal-hal yang dapat dikemukakan dengan kata-kata kita sendiri tidaklah perlu dikutip tapi cukup disadur saja (*citation indirect quotation*), terkecuali jika bahan-bahan yang menarik itu akan kehilangan potensinya bila dikutip secara tidak langsung.

Jika sebagian dari kalimat-kalimat yang kita kutip ternyata tidak kita perlukan karena tidak memenuhi maksud dan tujuan kita makan kalimat yang tidak ada hubungannya itu dapat dihilangkan. Jika yang dihilangkan itu termasuk bagian awal atau bagian tengah sesuatu kalimat maka diberilah titik tiga (. . .) sebagai gantinya. Jika bagian yang tidak diikuti (bagian yang ingin dihilangkan itu) terdiri dari bagian akhir sesuatu kalimat, maka bagian yang dihilangkan itu haruslah diganti dengan titik empat (. . . .).

Sebagai sekedar ilustrasi lihatlah contoh berikut ini. Prof. H. Soebadio, menulis sebagai berikut :

1. "Apa yang saya sebutkan di atas itu sebetulnya sudah menyatakan, bahwa melihat pengaruh bahasa Sanskerta, sama sekali tidak aneh, jika kebanyakan daripada kita cenderung untuk menjadikan bahasa itu sumber pinjaman dalam pembentukan istilah baru".
2. "Untuk menterjemahkan kata 'partikelir', misalnya sekarang telah dipakai kata 'swasta' pinjaman langsung dari bahasa sanskerta : *sva. stha-*, semua kata majemuk yang terdiri dari kata *sva* dan nomen verbal *stha-*,

Kutipan no. 1 di atas, jika yang dihilangkan bagian awal dan bagian tengah kalimat, menjadi demikian :

KUTIPAN LANGSUNG

H. Subadio,
 "Penggunaan bahasa Sanskerta
 dalam pembentukan istilah
 baru", *MISI*, 1963, hlm. 50.

. . . melihat pengaruh bahasa Sanskerta kebanyakan daripada kita cenderung untuk menjadikan bahasa itu sumber pinjaman dalam pembentukan istilah baru.

Sebagai contoh kedua, jika yang dihilangkan bagian akhir, ditulis sebagai berikut :

KUTIPAN LANGSUNG

H. Soebadio,
 "Penggunaan bahasa Sanskerta dalam
 pembentukan istilah baru",
MISI, 1963, hlm. 54.

Untuk menterjemahkan kata "partikelir, . . . sekarang telah dipakai kata "swasta" pinjaman langsung dari bahasa Sanskerta : *sva*, *stha*— . . .

Bila kita membuat sebuah kutipan langsung haruslah kita kutip dengan seksama dan teliti. Jika di dalamnya terdapat kesalahan, misalnya ejaan, maka untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa bukanlah kita yang membuat kesalahan tersebut, maka di belakang kata atau kata-kata yang salah itu berilah tanda kurung persegi (*bracket*) dengan menuliskan kata (sic) di dalamnya yang artinya demikianlah atau begitulah adanya;

Lihatlah contoh berikut ini.

Vieke,
Geschiedenis van den
Indischen Archipel :
1947, hlm. 494

Zich rochtsstreeks bemoeiend met zuiver politieke problemender teekmost-die toch zoker buiton zijn bevoegheid lagen verklaarde hij (Sir Alexander Christison): "It is quite hopeless, for a small country like Holland, to attempt to police the East Indies with Forces sent from the homeland and it will be necessary for the Dutch to incorporate the nationalist militia into the colonial structure". Aan Van Mook Zou hij bericht hebben : "You must weet (meet) with these chaps (Soekarno e.a) and give them a clear-out statement of their future status".

Yang dimaksud dengan "hij" (artinya "ia" atau "beliau") pada baris ketiga kutipan di atas adalah Sir Alexander Christison. Di dalam teks yang dikutip memang tidak perlu dijelaskan oleh penulis, oleh karena telah disebut-sebut dalam kalimat-kalimat sebelumnya. Kita yang meneliti perlu menjelaskan siapa yang dimaksud dengan "ia" dalam kutipan itu, yang kita tuliskan dalam tanda kurung perseg (*bracket*)

Demikian pula dalam kutipan di atas kata "weet" pada baris ketiga dari bawah, adalah salah. Oleh karena itu di belakang kata "weet" harus ditulis [*sic*] atau kita perbaikilah kesalahan dengan kata yang benar dan kita letakkan anatara tanda kurung perseg (*lihat kata [meet] di atas*).

Kalau kita ingin memberikan komentar terhadap sesuatu kutipan langsung (*quotation*) itu selagi kita sedang teringat, janganlah memakai tanda kurung" ()". Tanda kurung kecil (*parenthese*) seperti ini dipakai seorang pengarang dalam buku atau karangannya (yang hendak kita kutip itu) untuk menjelaskan lebih lanjut supaya menjadi terang kepada pembaca apa

yang menjadi maksudnya. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan sebagai berikut ini. Misalnya kita hendak mengutip sebuah *passage* dari karangan Prof. Dr. Nugroho Notokusanto, demikian :

KUTIPAN LANGSUNG

Nugroho Notokusanto,
Sejarah dan Hankam, 1968 hlm. 55.
hlm. 55

Persoalan yang timbul di kalangan sejarawan, yakni sejak kapan sesungguhnya Indonesia dijajah (oleh Belanda), ada yang mengatakan kurang lebih 350 tahun, dan ada yang mengatakan hanya kurang lebih 30 tahun saja, kiranya merupakan persoalan caranya mengajukan pertanyaan. Jika kita "strikt", maka memang, selama masih ada saja negara Indonesia yang berdaulat, maka Belanda belum sepenuhnya menjajah Indonesia (dalam arti seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke).

Tetapi sebaliknya, jika kita bertumpu kepada kesatuan nasionalitas Indonesia, maka sebagian saja daripada tubuh nasionalitas itu mengalami penjajahan, betapa pun kecilnya, maka kita sudah dapat berkata, bahwa nasionalitas Indonesia sudah mulai mengalami penjajahan pada saat itu juga.

Kata-kata yang di belakang tanda kurung "oleh Belanda", dan "dalam arti seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke", adalah kata-kata dari pengarang sendiri yang sedang kita kutip, yakni dari Nugroho Nutosusanto, bukan komentar kita sebagai seorang yang sedang melakukan penyelidikan.

Bila hendak membuat komentar, maka boleh juga kita buat kutipan langsungnya terlebih dahulu, baru kemudian kita beri komentar di bawahnya.

KUTIPAN LANGSUNG

David Thomson,
 The Aims of History,
 1974, hlm. 17.

dokumen
 pengertian

It was widely held, even by leading professional historians at the beginning of this century, that the only source worthy of the historian's serious attention was documents. 'No documents, no history', was the doctrine, astonishingly enough at a time when archaeology and numismatics and a dozen other specialized studies were already contributing enormously to knowledge of the past without much reliance on documents.

No historian would maintain this attitude today. Relies of the past from which he can extract valuable knowledge may be bits of bone or pot, ruined buildings or old coins,

(Thomson keliru dalam menafsirkan pengertian kata "dokumen" yang menganggap "dokumen" hanya berarti sumber-sumber yang tertulis saja. Kalau yang dikutipnya dictum "no documents, no history", maka arti kata "dokumen" adalah segala sesuatu baik yang tertulis, maupun yang tidak, yang dapat menerangkan atau yang dapat memberi informasi atau mengajarkan pada kita tentang masa lampau umat manusia. Kata ini berasal dari kata Latin documentum dari kata docere, yang berarti mengajar. Lihat Garraghan, *A guide to Historical Method*. Dokumen dalam luas, sesuai dengan dictum di atas, adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber sejarah, termasuk tradisi lisan, dan peninggalan-peninggalan arkeologis. Dalam arti yang lebih khusus, dokumen adalah semua rekaman tertulis yang orisinal, public (umum) atau privat, resmi atau tidak, tercetak atau tidak tercetak. Dalam arti yang sangat sempit, kata "dokumen" berarti rekaman-rekaman tertulis yang orisinal yang bersifat resmi atau publik. Tentang pengertian orisinal ada juga diterangkan oleh Garraghan).

Perlu sekali kita membuat komentar atau catatan jika ada, bilamana kita tengah membuat suatu kutipan. Tentu ada faedahnya bagi kita kelak. Sudah barang tentu komentar yang dibuat dalam tanda kurung persegi itu adalah sesuatu yang timbul dengan spontan pada waktu kita membaca suatu karangan. Kelak atas dasar catatan yang kita buat itu dapat kita adakan penyelidikan lanjutan terhadap sumber-sumber lainnya untuk lebih dapat menilai pernyataan yang dibuat oleh Thomson itu. Juga harus kita cari halaman berapa, cetakan tahun berapa, dari buku Garraghan, *A Guide to Historical Method*, yang memuat pernyataan-pernyataan mengenai kata "dokumen" itu.

Adapun mengenai bahan-bahan yang nomer dua pentingnya dalam hubungan karangan kita itu, cukuplah kita buat kutipan tidak langsung saja, artinya bukan kita kutip dengan kata-kata yang persis sama dan tempat sebagaimana pada kutipan langsung. Ini kita lakukan dengan kata-kata kita (si pengutip) sendiri, asalkan isinya tidak menjadi hilang atau kabur. Dari mana sumber tidak langsung ini diperoleh, perlu dicatat juga. Di dalamnya termasuk nama pengarang, judul dan fakta tentang publikasinya dan nomer halamannya. Hal ini perlu untuk diteliti atau diperiksa oleh orang-orang lain bila mereka menginginkan, dan karena itu wajiblah kita masukkan dalam catatan bawah atau catatan halaman (footnote) untuk dapat diteliti orang kebenarannya.

Bila kita berhadapan dengan sebuah buku, dan dalam buku tersebut pengarang mengutip tidak langsung sesuatu dan kutipan tidak langsung ini ingin kita pakai, maka sebaiknya perlu kita lihat sendiri darimana sumber itu dikutipnya. Tetapi bilamana sumbernya tidak mungkin kita peroleh pada waktu itu, padahal kita perlu segera menulis, maka memadai yang menjadi pegangan kita sumber sekunder itu tadi. Di dalam catatan halaman (footnote) haruslah kita tulis nama pengarang, judul buku, fakta tentang publikasinya, halaman berapa dari buku yang kita kutip secara tidak langsung itu, serta dari sumber ma-

na pula pengarang tadi memperoleh sumbernya itu (kutipan atas kutipan).

Adapun mengenai contoh dari kutipan tidak langsung dan contoh daripada ringkasan tidak dikemukakan di sini; cukuplah kiranya dengan dua contoh yaitu kutipan langsung dan komentar.

Setelah selesai kita membuat catatan, haruslah dengan segera kita susun di dalam tempat simpanan catatan kita (kalau kertasnya tebal dapat dalam sebuah kotak) menurut topik dan sub topiknya. Misalnya yang terletak di sebelah kanan atas catatan kita adalah Filsafat Sejarah, maka semua kertas-kertas yang ada tulisan Filsafat Sejarah di sebelah kanan atas, kita kumpulkan menjadi satu. Jika sub topiknya adalah definisi Filsafat Sejarah, maka semua kertas-kertas lepas yang berisi definisi-definisi Filsafat Sejarah dikumpulkan menjadi satu. Bersama dengan lembaran-lembaran lepas definisi sejarah, kertas-kertas mengenai jenis filsafat sejarah ini maupun satu kumpulan.

Dengan adanya susunan catatan seperti ini, bacaan kita dapat terkawal; kita tahu bagian mana yang belum banyak kita selidiki, artinya bahan-bahannya masih terlalu kerdil, dan bagian mana yang terlalu banyak bahan-bahannya. Hal ini perlu kelak untuk keseimbangan bab, umpamanya jangan sampai Bab II isinya terlalu sedikit, sedangkan Bab III misalnya akan mempunyai jumlah halaman enam kali jumlah Bab II.

Dengan memakai sistem kertas lepas ini amat mudahlah bagi kita mengadakan revisi atau perubahan terhadap kerangka (*outline*) atau susunan bab-bab karangan kita itu. Misalnya ada catatan-catatan dalam kertas lepas itu yang sedianya termasuk dalam Bab I; tetapi setelah kita pikirkan kembali urutannya yang logis, catatan-catatan itu harus dipindahkan ke Bab terakhir, maka kertas-kertas tadi dengan mudahnya dapat kita pindahkan pula ke tempat yang dikehendaki.

Bilamana pendatang-pendatang baru dalam sesuatu bidang penelitian ini bersedia menuruti langkah-langkah yang dikembangkan di atas, maka bolehlah dijangka ia akan dapat dengan cepat dan tepat menyelesaikan tugas penelitiannya.

BIBLIOGRAFI

- Garraghan, Gilbert J. *A Guide to Historical Method*, New York; Fordham University Press, 1957.
- Haryati Soebadio, "Penggunaan Bahasa Sankerta dalam Pembentukan Istilah Baru" dalam *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, Jilid I, Jakarta : Yayasan Penerbit Karya Sastra, 1963.
- Hilbish, Florence M.A., *The Research Paper*. New York; Bookman Associates, 1952.
- Nugroho Notosusanto, *Sejarah dan Hankam*. Jakarta : Departemen Pertahanan Keamanan, 1968.
- Thomson, David. *The Aims of History*. London : Thames and Hudson, 1969.
- Vlekke, Bernard H.M. *Geschiedenis van den Indischen Archipel*. Reormond – Masseik : J.J. Romen & Zonen, 1947.

